

**Analisis Neo-Developmentalism dalam Strategi Pembangunan
Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh**

Tahun 2004-2014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat *Global*

Political Economy



Oleh :

Bayu Catur Permata Sari

NIM. 125120401111012

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Neo-Developmentalism dalam Strategi Pembangunan Ekonomi India
Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama: Bayu Catur Permata Sari

NIM: 125120401111012

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian sarjana pada tanggal 1 Agustus 2017

Ketua Majelis Penguji

Dian Mutmainah, S.IP., MA
NIP. 197803192005012002

Anggota Majelis Penguji I

Aswin Afriyanto Azis, S.IP., M.DevST
NIP. 197802202010121001

Sekretaris Majelis Penguji

M. Riza Hanafi, S.IP., M.IA
NIK. 2011028002071001

Anggota Majelis Penguji II

Joko Purnomo, S.IP., MA.
NIP. 197804012009121002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Um Ludigdo, SE, M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERSETUJUAN

**Analisis *Neo-Developmentalism* dalam Strategi Pembangunan Ekonomi India
Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014**

SKRIPSI

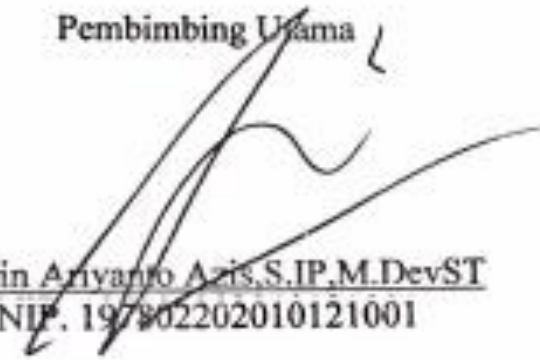
Disusun Oleh:

Nama: Bayu Catur Permata Sari


NIM: 125120401111012

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama



Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevST
NIP. 197802202010121001

Pembimbing Pendamping


Joko Purnomo, S.IP., MA.
NIP. 197804012009121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional


Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevST
NIP. 197802202010121001



LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bayu Catur Permata Sari

NIM : 125120401111012

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Prodi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Analisis *Neo-Developmentalism* dalam Strategi Pembangunan
Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun
2004 - 2014**

Adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan sejauh yang saya ketahui, bukan merupakan tiruan/ duplikasi/ plagiat dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Brawijaya maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun. Adapun materi yang bukan berasal dari pemikiran Saya, telah dikutip dengan mencantumkan sumber asli, melalui catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku, berupa pencabutan predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 13 Juli 2017

Pembuat pernyataan,



Bayu Catur Permata Sari

125120401111012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahilabbilalamin.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta segala bantuan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam rangkaian pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hubungan Internasional (HI) di Universitas Brawijaya. Serta tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas segala bentuk tauladan beliau dalam menjalankan hidup di dunia ini.

Adapun dalam tugas akhir skripsi yang penulis kerjakan ini dengan penuh kesadaran diri penulis anggap masih jauh dari kata sempurna, karena disebabkan oleh segala keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Dengan judul “Analisis *Neo-Developmentalism* dalam Strategi Pembangunan Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014” penulis harap skripsi ini dapat berkontribusi dalam kajian keilmuan HI dan bermanfaat bagi siapa saja di masa mendatang. Adapun atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan begitu banyak terima kasih atas segala dukungan dan doa dari pihak-pihak yang membantu penulis setiap waktu dan setiap saat. Pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, H. Agus Mulyanto, MM dan Ibu Hj. Suprpti yang tak pernah lupa mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Berkat doa dan segala bentuk dukungan moril maupun materil dari mereka, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah anakmu kini sarjana :D

2. Kemudian seluruh kakak penulis, Mas Jati, Kak Arie dan Mas Topik yang tak pernah lupa untuk mengingatkan penulis, yang selalu membantu penulis, yang selalu mendengarkan cerita penulis, yang selalu mau menjelaskan semua keluh kesah adikmu ini ke Bapak dan Ibu. *Love You ma bro & ma sissy.*

3. Pak Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevST dan Pak Joko Purnomo, S.IP, MA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan sepenuh hati memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terlebih kepada Pak Aswin yang menjadi mentor sekaligus pembimbing utama penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan nasihat beliau-beliau penulis sadar masih jauh dari penulis untuk merangkai kata-kata pengantar pertanda telah usainya tahapan tugas akhir skripsi ini. Penulis akan selalu mengingat nasihat dan semangat yang pernah diberikan untuk kebaikan dan perkembangan penulis.
4. Dian Mutmainah, S.IP., MA. Dan M. Riza Hanafi, S.IP., M.IA selaku dosen dewan penguji penulis dalam ujian skripsi, yang mana atas saran dan masukan beliau membantu skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
5. *My special one* ER, seseorang yang selalu ada untuk mendukung dan menemani penulis setiap saat. Terimakasih sudah hadir tak hanya pada saat skripsi ini dibuat namun sejak pertama kali bertemu pada masa perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan cerita indah dalam kehidupan penulis di Kota Malang ini. *Meeting you was fate, becoming your friend was choice, but falling in love with you was completely out of my control.*
6. Gerombolan kesayanganku Uget-Uget: Erwin, Dhandi, Dika Yudhistira, Ang, Iqbal, Dika Wahyu, Adjam, Mae, Pieter, Ella, Sitta, Arene, dan Irine. Terlalu banyak kata sifat untuk menggambarkan hidupku selama kuliah bersama kalian. Senang, sedih, tawa, canda, dan berbagai macam luapan emosi lainnya menjadi pertanda berwarnanya kehidupan kuliahku bersama kalian. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan, semoga silahturahmi selalu terjaga dan sukses untuk kita semua.
7. Teman-teman WatuAji Squad: Novita, Winda, Thifal, Tya, Lia, dan Venny yang selalu menjadikan kosan kita seperti rumah ke-dua dan memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis yang juga selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga yang impikan selama ini dapat terwujud yaaa. *Miss You Gurls*

8. Teman-teman Bekasi Squad: Sandra, Hani, Qonita, Intan, Cindy, Ajeng, Dian.

Terimakasih juga untuk doa dan dukungan kalian. Akhirnya kita bisa ketemu kapan saja tanpa harus menunggu diriku pulang ke Bekasi. Sukses juga untuk kita semua.

9. Seluruh teman-teman HI yang sudah mendukung dan membantu penulis dalam skripsi ini. Terimakasih telah hadir selama aktivitas perkuliahan penulis.

Penulis sadar bahwa rangkaian tulisan dalam bentuk skripsi ini juga banyak memiliki kekurangan. Namun atas selesainya tugas akhir ini penulis ucapkan syukur begitu dalam dan terbersit harapan agar penelitian ini selalu memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Merujuk *quotes* dari film *Winnie The Pooh* *You're brave than you believe and stronger than you seem and smarter than you think*. Jangan pernah takut untuk melakukan apapun karena kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan dan percaya kamu bisa tanpa harus mendengarkan pikiran orang lain mengenai diri kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 17 Agustus 2017

Penulis

ABSTRAK

Analisis *Neo-Developmentalism* dalam Strategi Pembangunan Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014

Oleh :
Bayu Catur Permata Sari

Pada tahun 2004-2014, India dipimpin oleh Perdana Menteri Manmohan Singh. Pada masa pemerintahannya, Singh mengeluarkan strategi pembangunan yang tak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil namun juga ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Hal ini berdampak baik pada perekonomian India. Dimana India tak hanya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat namun juga berkelanjutan.

Strategi pembangunan yang dikeluarkan oleh India saat itu memiliki karakter yang sama dengan pandangan baru tentang pembangunan yakni *Neo Developmentalism*. Pandangan ini keluar etika *Washington Consensus* mengalami krisis legitimasi karena banyak negara yang gagal dalam menerapkannya. Sehingga *Neo Developmentalism* memiliki strategi pembangunan baru yang dapat membantu negara berkembang untuk bertransisi keluar dari *Washington Consensus*. Strategi pembangunan yang terdapat pada *Neo Developmentalism* memiliki aktivitas pendukung, yang mana aktivitas tersebut akan membantu mendeskripsikan suatu negara memiliki kesamaan dengan *Neo Developmentalism*.

Sehingga dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melihat apakah India menerapkan *Neo Developmentalism* dalam strategi pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014. Dimana pada masa pemerintahan Singh, India mencapai perekonomian terbaik sepanjang sejarah India. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana hasilnya akan menjelaskan fenomena *Neo-Developmentalism* di India.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya terdapat sembilan aktivitas India yang sama dengan aktivitas yang terdapat pada perspektif pembangunan *Neo-Developmentalism*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian India yang dicapai pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014 melakukan strategi pembangunan dan menerapkan aktivitas yang sama dengan perspektif pembangunan baru yakni *Neo-Developmentalism*.

Kata Kunci: *Development, Washington Consensus, Neo-Developmentalism, India, Manmohan Singh.*

ABSTRACT***Neo-Developmentalism Analysis in India's Economic Development Strategy on
Manmohan Singh 2004-2014***

By :
Bayu Catur Permata Sari

In 2004-2014, India was led by Prime Minister Manmohan Singh. During his reign, Singh issued a development strategy that not only focused on fast and stable economic growth but also wanted to create an inclusive economic growth. This has a good impact on the Indian economy. Where India not only get high economic growth and fast but also sustainable.

The development strategy issued by India at that time has the same character with the new view of development that is Neo Developmentalism. This view comes out of the Washington Consensus ethic of a crisis of legitimacy because many countries fail to implement it. So Neo Developmentalism has a new development strategy that can help developing countries to transition out of the Washington Consensus. The development strategy found in Neo Developmentalism has a supportive activity, which will help to describe a country similar to Neo Developmentalism.

So in this study the author aims to see whether India implemented Neo Developmentalism in the economic development strategy during the reign of Manmohan Singh in 2004-2014. Where during the reign of Singh, India achieved the best economy throughout India's history. This study is descriptive qualitative in which the results will explain the phenomenon of Neo-Developmentalism in India.

This study found that there are nine similar Indian activities with the activities of the Neo-Developmentalism perspective. So it can be concluded that in the achievement of India achieved during the reign of Manmohan Singh in 2004-2014 to do development strategy and apply the same activity with the new development perspective that is Neo-Developmentalism.

Key Words: Development, Washington Consensus, Neo-Developmentalism, India, Manmohan Singh.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1. Studi Terdahulu.....	9
2.2. Kajian Teoritik	14
2.2.1. Pembangunan	14
2.2.2. <i>Neo-Developmentalism</i>	18
2.3. Operasionalisasi Teori	27
2.4. Alur Pemikiran.....	38
2.5. Argumen Utama.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4. Teknik Analisis Data.....	41
3.5. Sistematika Penulisan	42
BAB IV GAMBARAN UMUM INDIA DAN PERGESERAN MODEL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDIA	45
4.1. Model Pembangunan di India	46
4.1.1. Model Pembangunan India Awal Kemerdekaan.....	48





4.1.2. Model Pembangunan India Pasca Krisis Ekonomi India tahun 1991 . 55

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN INDIA PADA MASA PEMERINTAHAN MANMOHAN SINGH TAHUN 2004-2014..... 61

5.1. *Economy Policy menurut Neo-Developmentalism..... 62*

5.1.1. *Control Inflation Through Inflation Targeting 64*

5.1.2. *Market-Determined but Preferably Moderate Interest Rates 68*

5.1.3. *Market-Determined Exchange Rates but with Selective Use of Capital Control 73*

5.1.4. *Independent Central Bank Tasked to Control Inflation..... 77*

5.1.5. *Primary Surplus : Current Account Balance, The Accumulation of Domestic Public Savings to Finance Investment and Strong Counter-cyclical Fiscal Policy Through The State Banks and Sovereign Wealth Funds..... 82*

5.1.6. *Broadening The Tax Base, Cuts in Marginal Tax Rate but more Progressive Income Tax and with Counter-Cyclical Reforms of Direct and Consumption Taxes During Crises 85*

5.1.7. Hasil Analisis 86

5.2. *Economy Oriented menurut Neo-Developmentalism..... 87*

5.2.1. *Remove Barriers to Entry For International Financial Institutions but Consolidate State Banks and Subsidize Domestic Financial Market Consolidation 89*

5.2.2. *Trade Liberalization With Extensive Export Subsidies and The Active Transformation of Inherited Comparative Advantage, Trade Structure and Trade Partners 91*

5.2.3. *Selective Privatization of State Enterprises with Restricted Access to Foreign Bidders 94*

5.2.4. *Selective Industrial Policy..... 95*

5.2.5. Hasil Analisis 97

5.3. *Role of The State 97*

5.3.1. *Secure Property Rights 100*

5.3.2. *Privatization of State Enterprises but With State Control Over Industrial Champions and With The Exclusion From Privatization of Federal Banks, Utilities and Strategic Commodities 104*

5.3.3. *No Privatization of Public Services 108*

5.3.4. *Moderate Financial Deregulation 110*

5.3.5. *No Labor Market Deregulation and Consolidation of Corporatist Institution 112*

5.3.6. *Conditional Cash Transfers to The Poor Plus Expansionary Minimum Income Policy..... 115*



5.3.7. Hasil Analisis	119
BAB VI PENUTUP	122
6.1. Kesimpulan	122
6.2. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pandangan antara Old Developmentalism dan New (Neo)-Developmentalism.....	26
Tabel 2. Operasionalisasi Teori Neo-Developmentalism	31
Tabel 3. Pendapatan Rata-Rata di India	45
Tabel 4. Tingkat Pembangunan di India pada awal Kemerdekaan India 1950 sampai 1990	52
Tabel 5. Tingkat Pembangunan di India pada Masa Model Pembangunan Washington Consensus	57
Tabel 6. Tingkat Inflasi di Negara Berkembang Berdasarkan Indeks Harga Konsumen	66
Tabel 7. Pengaruh Bank Sentral dalam mengontrol Inflasi di India pada tahun 2008-2010	81
Tabel 8. Current Account Balance di India.....	83
Tabel 9. Pengeluaran Pemerintah.....	85
Tabel 10. Tarif Pajak Progresif di India.....	86
Tabel 11. Tingkat Ekspor India.....	89
Tabel 12. Pangsa pasar dan Hasil Perdagangan dengan Negara Mitra Tahun 2012-2013.....	94
Tabel 13. Tingkat Pengangguran di India	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi India telah memberikan banyak pengaruh bagi negara India sendiri bahkan dunia internasional. Hal ini mendorong meningkatnya peran dan kehadiran India dalam forum Internasional.¹ Saat ini India telah menjadi anggota yang aktif dalam forum internasional seperti *United Nations* dan *The Common Wealth* dan juga aktif melakukan kerjasama dengan negara di kawasan Asia.² India saat ini telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tercatat pada tahun 2015 pendapatan negaranya menduduki peringkat ke-7 dan melebihi pendapatan negara Brazil.³

Kemajuan ekonomi India tak lepas dari adanya pengaruh globalisasi dimana pasar memegang peran penting dalam pencapaian tersebut.⁴ Namun hal ini bukan berarti segala aktivitas di India ditentukan dan dikendalikan oleh mekanisme pasar melainkan masih terdapat peran pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya sebuah tujuan pembangunan negaranya melalui strategi pembangunan. Hal ini tercermin dari terciptanya program rencana pembangunan di India guna mencapai tujuan pembangunan. Meskipun pada awal kemerdekaan

¹ Swaran Singh. 2005. *China-India Economy Engagement Building Mutual Confidence*. Diakses melalui <https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id2013.html>

² India Country Brief. Diakses melalui <http://dfat.gov.au/geo/india/pages/india-country-brief.aspx>

³ Data WorldBank GDP diakses melalui <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>

⁴ Stiglitz, Joseph. 1998. *Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes*. Diakses melalui https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/1998_2_Towards_a_New_Paradigm_for_Development.pdf

orientasi ekonomi India masih tertutup namun pasca perubahan orientasi ekonomi India tahun 1991, India tetap mengeluarkan program rencana pembangunan atau biasa disebut dengan *Five Year Plans*.

Pada tahun 1991, India mengalami kondisi perekonomian yang memburuk dan mengakibatkan krisis berkepanjangan. Krisis ekonomi tersebut membawa India dikenal sebagai negara yang hampir gagal. Namun karena tindakan pemerintah India yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengubah orientasi ekonomi menjadi ekonomi yang terbuka berdampak besar bagi kondisi perekonomian India saat ini. Untuk mendukung perubahan orientasi ekonomi, pemerintah dalam menjalankan program *five year plans* nya didominasi untuk fokus dalam mendukung aktivitas liberalisasi guna memperbaiki kondisi perekonomian India.

Pada masa tersebut dapat dikatakan bahwasanya India mengadopsi nilai dan resep yang terdapat pada *Washington Consensus*. Pada masa tersebut India dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan resep *Washington Consensus* disaat banyak negara gagal bahkan terpuruk setelah menerapkan hal tersebut. Dengan menerapkan *Washington Consensus* di India memberikan dampak baik pada pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat di setiap tahunnya dan hampir mencapai 8 persen sejak tahun 2003.⁵

Disaat banyak negara yang gagal dalam menerapkan resep yang ditawarkan oleh *Washington Consensus* India mengalami perubahan strategi pembangunan.

Perubahan ini dimulai pada saat *Five Year Plans* kesepuluh keluar dengan mulai

⁵ Ibid.

memperhatikan nasib kesejahteraan seluruh masyarakat India.⁶ Selain itu pada tahun 2004 terpilihlah Manmohan Singh sebagai Perdana Menteri India yang ke-13.⁷ Manmohan Singh kerap dianggap sebagai bapak ekonomi India karena telah membawa banyak perubahan pada kondisi perekonomian India pasca krisis 1991.⁸

Pada masa pemerintahan Singh 2004-2014, strategi pembangunan di dominasi dengan tujuan-tujuan untuk mendapatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan secara inklusif) dan tetap unggul dalam percepatan pertumbuhan ekonomi global.⁹ Dimana pertumbuhan inklusif dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi menjangkau seluruh elemen masyarakat atau grup di India.¹⁰ Untuk mendukung gagasan tersebut Singh mengeluarkan kebijakan yang memastikan secara hukum bahwa rakyatnya akan mendapatkan hak yang sama dalam sektor pangan, pendidikan, pekerjaan dan informasi.¹¹

Karakter dari strategi pembangunan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Singh cenderung mengalami perubahan dengan strategi pembangunan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dimana strategi pembangunan yang terdapat di antara tahun 2004-2014 lebih mengarah pada aktifnya peran negara dalam pengentasan kemiskinan yang ditandai dengan perhatian pemerintah

⁶ *Five Year Plans* India. Chapter 7 diakses melalui http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical_year_book_india_chapters/Five%20Year%20Plan%20writeup_0.pdf

⁷ Ibrahim Novansyah. *Kebangkitan India : Dari Model Nehru ke Model Knowledge Based Society*. Universitas Gajah Mada. Diakses melalui https://www.academia.edu/9497019/Kebangkitan_India_Dari_Pembangunan_Model_Nehru_ke_Model_Knowledge_Based_Society

⁸ Ibid.

⁹ *Five Year Plans* India. Op.Cit

¹⁰ *India Nasionalist Congress*. Profil Dr. Manmohan Singh diakses melalui <http://inc.in/organization/21/profile>

¹¹ Ibid.

untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Selain itu guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan perekonomian yang berkelanjutan pemerintah masih berorientasi pada ekonomi terbuka guna memanfaatkan potensi yang tersedia. Pada masa pemerintahan Singh pula semangat *Look East Policy* dikembalikan guna menguatkan hubungan dagang dengan negara dikawasan Asia.¹²

Strategi pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Singh menjadikan India dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia.¹³ Tak hanya itu dalam meningkatkan kualitas dagang sektor perindustrian India telah mendapatkan respon yang cukup baik pada skala ekonomi global. Pada masa pemerintahan Singh pula, India berhasil tak hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun juga berhasil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pada masa pemerintahan Singh ini India mendapatkan pertumbuhan ekonomi terbaik sepanjang sejarah perekonomian di India.

Untuk mengukur sebuah tingkat keberhasilan pembangunan di suatu negara maka dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, perekonomian berkelanjutan, serta lingkungan yang baik.¹⁴ Jika dilihat dari tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara, maka India telah mencapai hal tersebut. Namun dalam hal ini penulis tertarik untuk melihat aktivitas pendukung dari strategi pembangunan yang dikeluarkan oleh Manmohan Singh 2004-2014.

¹² Annual Report 2012-2013. *Commercial Relations, Trades Aggrements and International Trade Organizations*. Diakses melalui http://commerce.nic.in/publications/annualreport_chapter6-2012-13.asp#a1

¹³ *Five Year Plans India*. Op.Cit

¹⁴ Richard Peet dan Elaine Hartwick. 2009. *Theories of Development : Contentations, Arguments, Alternatives Second Edition*. New York: The Guilford Press

Di samping itu muncul sebuah paradigma pembangunan yang baru, dimana paradigma ini memiliki keunikan dalam melancarkan sebuah strategi pembangunan. Keunikan yang dimaksud mengenai peran pemerintah yang dikembalikan pada aktivitas ekonomi namun tidak membatasi mekanisme pasar.

Salah satu turunan dari paradigma tersebut adalah *Neo-Developmentalism*. *Neo-Developmentalism* merupakan strategi pembangunan yang memiliki karakter kapitalis nasionalis.¹⁵ Dimana untuk mencapai tujuan dari strategi tersebut terdapat 16 aktivitas yang akan mencerminkan sebuah negara memiliki pandangan yang sama dengan *Neo-Developmentalism*.¹⁶

Dengan pencapaian ekonomi yang India dapatkan pada masa pemerintahan Manmohan Singh pada tahun 2004-2014 tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti aktivitas apa saja yang mendukung agar tujuan dari strategi tersebut tercapai. Terlebih lagi muncul model pembangunan baru pasca krisis legitimasi atas resep atau strategi yang terdapat pada *Washington Consensus*. Dimana *Washington Consensus* dianggap gagal dalam membantu negara berkembang untuk membangun perekonomian. Salah satu model pembangunan baru tersebut adalah *Neo-Developmentalism*. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah aktivitas yang India lakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam strategi pembangunan sama dengan aktivitas yang terdapat pada strategi pembangunan yang digagas oleh *Neo-Developmentalism*.

¹⁵ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?!*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

¹⁶ Ibid.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tujuan dari strategi pembangunan ekonomi yang India terapkan pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014 yang memiliki tujuan yang sama dengan model pembangunan *Neo-Developmentalism*, maka penulis memiliki rumusan masalah “Apakah India menerapkan *Neo-Developmentalism* dalam strategi pembangunan ekonomi India pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti bahwasanya strategi pembangunan India pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014 menerapkan strategi yang sama dengan strategi pembangunan yang terdapat pada *Neo-Developmentalism*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Program Studi Hubungan Internasional

- a) Memberikan pemahaman terhadap paradigma baru dalam studi pembangunan yakni *Neo-Developmentalism*.
- b) Memberikan pemaparan isu pembangunan di kawasan Asia Selatan khususnya negara India.
- c) Memberikan pemaparan dan analisis tentang pandangan *Neo-Developmentalism* dalam melihat isu pembangunan ekonomi.

1.4.2. Bagi Masyarakat

Memberikan referensi, informasi, dan wawasan mengenai isu-isu pembangunan dan perdagangan bebas selama era liberalisasi produk. Sehingga dapat membantu masyarakat untuk berpikir kritis dan analitis.

1.4.3. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran akademis dan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi beberapa sub-bab, antara lain adalah studi terdahulu, kajian teoritik, operasionalisasi teori, alur pemikiran dan yang terakhir adalah hipotesis. Studi terdahulu sendiri berfungsi sebagai referensi dan acuan bagi penulis, sehingga penulis akan mendapatkan hal-hal yang belum dijelaskan lebih dalam.

Pada sub-bab pertama, penulis akan menggunakan dua studi terdahulu dimana masing-masing studi terdahulu memiliki persamaan pada kasus yang diteliti dan juga teori yang sama dalam penelitian ini. Pada sub-bab kedua merupakan kajian teoritik dimana pada bagian ini penulis menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan isu yang penulis angkat dalam penelitian ini, yakni Analisis *Neo-Developmentalism* Dalam Melihat Strategi Pembangunan Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014.

Pada sub-bab ini, penulis akan menggunakan teori *neo-developmentalism* yang berkaitan dengan pembangunan negara dalam memanfaatkan pasar global yang ada. Dalam sub-bab ini pula, penulis akan menjelaskan dan memaparkan variabel dan indikator yang akan penulis gunakan untuk menganalisis isu yang diteliti.

Pada sub-bab ketiga yaitu operasionalisasi teori, dimana penulis akan menjelaskan secara detail aktivitas yang terdapat dalam strategi pembangunan dari *neo-developmentalism* yang akan langsung di operasionalisasikan pada isu yang penulis teliti. Selain itu penulis juga akan menampilkan tabel terkait

operasionalisasi teori untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memetakan isu yang akan diteliti. Sub-bab keempat yakni alur pemikiran dimana penulis akan menjelaskan alur penelitian yang dibuat agar memudahkan penulis dan pembaca memahami maksud dan alur penelitian.

Sub-bab terakhir adalah mengenai argumen utama, dimana penulis akan menjabarkan dugaan hasil penelitian yang penulis lakukan.

2.1. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti tentang Analisis *Neo-Developmentalism* Dalam Melihat Strategi Pembangunan Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014, di antaranya adalah :

Studi terdahulu pertama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada tahun 2012 dengan judul "*Twenty Years of India's Liberalization Experiences and Lessons*".¹ Dalam penelitian ini UNCTAD membahas mengenai pengalaman dan pelajaran dalam aktivitas liberalisasi yang telah India lakukan sejak awal era liberalisasi samapai tahun 2012.

Dalam penelitian ini, UNCTAD membahas mengenai awal kebangkitan ekonomi India yang dimulai pada tahun 1990. Dalam penelitiannya disebutkan

¹ *United Nations Conference of Trade and Development*. 2012. *Twenty Years of India's Liberalization : Experiences and Lessons*. Diakses melalui http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpg2420093_en.pdf

bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis dan juga reformasi yang dilakukan menjadikan India sebagai sorotan dunia. Reformasi yang dilakukan oleh India sangat khas dengan melibatkan tahapan liberalisasi dan mulai memperkenalkan reformasi di berbagai sektor. Sektor tersebut dirasa memiliki peluang yang baik dalam era liberalisasi saat itu yakni sektor keuangan, pertanian dan juga sektor manufaktur.

Dalam penelitiannya, UNCTAD menjelaskan bahwa kebangkitan perekonomian tak lepas dari usaha kemandirian yang telah India jalankan untuk lepas dari krisis neraca pembayaran. Sehingga pada tahun 1991 India melakukan reformasi yang mencakup program stabilitas ekonomi makro dan rezim mata uang asing. Reformasi tersebut juga termasuk kedalam kerangka kebijakan industri dan perdagangan. Dalam hal ini pemerintah India telah melakukan kemudahan dalam perizinan dan mengurangi hambatan dagang. Sehingga akan mendorong aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, pemerintah India juga merangsang perdagangan domestik sehingga dapat melakukan perdagangan asing.

Berdasarkan uraian yang ada dalam UNCTAD, India telah melakukan reformasi di sektor perdagangan dan industri. Sehingga dalam penelitiannya UNCTAD membaginya dalam beberapa bagian yang akan menjelaskan reformasi yang telah terjadi di masing-masing sektor. Sektor tersebut diyakini memiliki pengaruh besar dalam kebangkitan ekonomi di India. Terdapat empat bagian yang ada dalam penelitian ini antara lain ;

Bagian pertama menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan perdagangan pada sektor manufaktur sejak tahun 1991. Kunci utama dalam hal ini ada dalam isu ekspor, impor dan permintaan domestik terhadap pertumbuhan dalam sektor manufaktur. Dalam bagian ini menjelaskan mengenai apakah sektor manufaktur memiliki hubungan dan pengaruh dalam reformasi yang dikeluarkan mengenai kebijakan perdagangan India. Serta apakah akan berdampak pada pertumbuhan di sektor manufaktur.

Selanjutnya pada bagian kedua menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan perdagangan pada sektor pertanian. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India mengenai pertanian dimaksudkan agar menjaga stabilitas harga produk pertanian domestik terhadap harga global. Pada bagian ini juga menerangkan mengenai perubahan kebijakan di sektor pertanian pada dua puluh tahun terakhir serta dampaknya pada perekonomian India.

Pada bagian ketiga, UNCTAD menjelaskan mengenai liberalisasi yang dilakukan di sektor keuangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mempermudah alokasi anggaran dengan mudah. Reformasi ini dipercaya akan dapat meningkatkan keamanan dan kestabilan sistem keuangan India. Menurut UNCTAD reformasi ini juga tidak akan tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah ada di India.

Terakhir mengenai peran liberalisasi yang dilakukan oleh India dalam sektor perbankan. Hal ini bertujuan pada peningkatan performa bank dalam negeri. Secara senganja dan bertahap pemerintah India memperbolehkan bank

swasta atau bank asing berperan besar dalam perekonomian agar dapat meningkatkan efisiensi melalui kompetisi perbankan. Pada bagian ini juga membahas mengenai perbandingan bank yang lebih produktif antara bank sektor publik, bank swasta dan juga bank asing yang terdapat di India.

Dalam buku yang dikeluarkan oleh UNCTAD membantu penulis untuk mengetahui sejarah perkembangan perekonomian yang telah dilalui di India.

Dalam hal ini penulis akan melihat perkembangan perekonomian India dengan sudut pandang *Neo-Developmentalism* dimana akan mengeluarkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Selanjutnya adalah penelitian yang di tulis oleh Cornel Ban (2012) mengenai *Brazil's liberal neo-developmentalism : New paradigm or edited orthodoxy?*² Dimana penelitiannya menjelaskan mengenai model pembangunan yang berada di Amerika Latin khususnya di Brazil. Dalam penelitiannya Ban sedikit menjelaskan mengenai perbandingan antara *neo-developmentalism* dengan *'old' developmentalism* dan *Washington Consensus*. Dimana dalam penelitiannya Ban menyebutkan bahwa Brazil melakukan pencampuran strategi dan aktivitas pembangunan antara pandangan *Washington Consensus* dengan pemikiran *neo-developmentalism*, sehingga percampuran ini disebut dengan *liberal neo-developmentalism*.

² Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

Dalam penelitiannya, Ban meyakini bahwa pemerintah Brazil telah melakukan percampuran strategi antara *Washington Consensus* dengan pemikiran *neo-developmentalism*. Hal ini dibuktikan dengan melihat pengalaman Brazil dalam menyikapi sebuah masalah ekonomi. Dalam hal ini Brazil telah mengalami privatisasi, liberalisasi dan deregulasi namun di saat yang bersamaan Brazil menguatkan peran negara sebagai pemilik dan investor di sektor industri dan perbankan. Hal ini terjadi ketika kebijakan industri di era ekonomi terbuka dan pergerakan modal.

Selanjutnya Ban menjelaskan mengenai perbedaan *neo-developmentalism* dengan *Washington Consensus* melalui aktivitas negara yang dilakukan. Dalam penelitiannya ini Ban menyebutkan bahwa tidak ada penghapusan strategi yang dicanangkan oleh *Washington Consensus*, namun yang terdapat di Brazil adalah menambahkan strategi *Washington Consensus* dengan *neo-developmentalism*. Sehingga aktivitas Brazil dalam membangun negaranya merupakan perpaduan aktivitas yang terdapat pada *Washington Consensus* dengan *neo-developmentalism*.

Aktivitas yang terjadi di Brazil diyakini efektif untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Aktivitas yang dimaksud dalam perpaduan antara *Washington Consensus* dengan *neo-developmentalism* adalah cara untuk menyetabilkan makro ekonomi, cara pandang sebuah negara untuk melihat peluang keluar, dan juga memaknai pasar bebas yang sudah ada.

Studi terdahulu yang kedua ini membantu penulis untuk melihat aktivitas negara dalam membangun perekonomian India. Aktivitas yang terdapat dalam paradigma *neo-developmentalism* ini akan penulis jadikan asumsi untuk mempermudah pengklasifikasian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah India.

Aktivitas Barzil yang terdapat didalam penelitian Ban juga akan memberikan pengetahuan baru kepada penulis dan juga akan menjadi pembanding, karena Brazil dan India merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi baru dimata dunia internasional.

2.2. Kajian Teoritik

Pada kajian teoritik, penulis akan menjawab rumusan masalah dengan melihat aktivitas yang mendukung dari strategi pembangunan yang terdapat pada *Neo-Developmentalism*. Strategi yang dibawa oleh *Neo-Developmentalism* memiliki karakter kapitalis nasionalis yang membawa kembali peran negara dalam aktivitas ekonomi. Dimana dalam strategi tersebut terdapat tiga variabel atau tujuan dan 16 aktivitas yang akan mencerminkan *Neo-Developmentalism*.

2.2.1. Pembangunan

Development atau pembangunan akan melambangkan sebuah perubahan atau transformasi di berbagai elemen disuatu negara, baik dari cara berpikir, perubahan masyarakat, pergerakan dari suatu hubungan. Inti dari sebuah pembangunan adalah bertransformasi berubah menjadi lebih modern.³ Perubahan

³ Stiglitz, Joseph. 1998. *Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes*. Diakses melalui https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/1998_2_Towards_a_New_Paradigm_for_Development.pdf

memberikan kesempatan pada masyarakat dan individu untuk mendapatkan kontrol atas diri mereka sendiri. Pembangunan memperkaya kehidupan masing-masing individu dengan cara memperluas wawasan mereka dan mengurangi perasaan terisolasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah bertujuan untuk memfasilitasi transformasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul pada saat menuju perubahan.⁴ Dalam memaknai sebuah strategi pembangunan negara memiliki peran penting guna mencapai tujuan dari strategi pembangunan yang telah dibuat.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pandangan untuk memaknai sebuah pembangunan dimana dalam hal ini terlihat dari peran suatu negara dalam pembangunan itu sendiri. Pertama adalah pandangan yang melihat negara sebagai pemegang kendali atau berperan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dilihat dengan aktifnya peran negara pada sektor ekonomi yang bertujuan untuk membantu atau menuntun sebuah perekonomian negara tumbuh dengan ekonomi yang baik.⁵ Pandangan ini biasa di sebut dengan pandangan merkantilis dimana membawa karakter proteksi guna melindungi perindustrian negaranya dari politik ekonomi sehingga hal ini dirasa dapat menjaga dan meningkatkan kekayaan negaranya.

Selanjutnya adalah pandangan yang menganggap bahwasanya negara hanya mengacaukan mekanisme pasar sehingga peran di negara harus dihilangkan.

Pandangan ini membawa karakter terbuka dan berorientasi pada pasar dan biasa

⁴ Ibid.

⁵ Balaam, David N. dan Bradford Dillman. 2011. *Introduction to International Political Economy 5th edition*. Pearson : United State

disebut dengan pandangan liberalis.⁶ Namun pandangan ini tidak bertahan lama, sebab muncul pandangan baru yang mengakui bahwa terdapat sebuah kegagalan pasar yang tidak dapat menyalahkan salah satu pihak. Pandangan ini sering disebut dengan pandangan Keynesian. Dimana menganggap bahwa sebuah aktivitas ekonomi dan pasar bisa berjalan dengan baik namun tidak dapat dipungkiri aktivitas tersebut bisa juga gagal. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah peran dari negara untuk bisa memperbaiki dan mencegah kegagalan yang terjadi akibat *market failure*.⁷

Terdapat beberapa model pembangunan yang memiliki pandangan serupa yang telah penulis jelaskan, antara lain *old-developmentalism*, *developmental state*, *washington consensus* dan sebagainya. Model pembangunan ini memiliki karakter tersendiri. Pertama adalah model pembangunan *Old-Developmentalism* yang populer sekitar tahun 1930-1980.⁸ Karakter model pembangunan *old-developmentalism* memiliki pandangan yang sama dengan pandangan merkantilis. Selanjutnya adalah model pembangunan *Washington Consensus*. Model pembangunan ini banyak diterapkan di negara berkembang sekitaran tahun 1980'an dan memiliki pandangan yang sama dengan liberal namun ada beberapa sedikit tambahan.⁹ Terakhir adalah model pembangunan *Developmental State* yang memadukan pandangan merkantilis dan juga liberal. Model pembangun ini memadukan antara sistem kapitalisme dan otoritarian. Sistem ini diartikan oleh

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Bresser-Pereira L. C. 2006. *The New Developmentalism and Conventional Orthodoxy*. Article for SEADE's Sao Paulo em Perspectiva review. Diakses melalui http://networkideas.org/featart/jul2006/Developmentalism_%20Orthodoxy.pdf

⁹ Ibid.

Meredith Woo-Cumings sebagai sebuah jaringan politik, birokrasi, dan modal yang saling berhubungan dan mempengaruhi struktur kehidupan ekonomi dalam masyarakat kapitalis di Asia Timur.¹⁰

Ciri khas dari sistem pembangunan ini adalah peran pemerintah yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara dengan memberikan insentif kepada masyarakat bisnis melalui peraturan administratif, subsidi, proteksi, hingga peninjauan pasar. Dalam model pembangunan ini terdapat tiga strategi utama antara lain¹¹ a) peran pemerintah yang sangat besar dalam sektor pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk intervensi kebijakan terhadap pasar b) kebijakan industri yang diambil sebagai prioritas utama negara dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan c) terdapatnya suatu agen utama pembangunan dalam birokrasi negara.

Namun model pembangunan *Developmental State* hanya dapat berhasil diterapkan di negara-negara kawasan Asia Timur. Sehingga banyak negara berkembang lainnya memilih atau bahkan terpaksa untuk menerapkan model pembangunan *Washington Consensus*. Banyak kisah yang terdapat dari model pembangunan *Washington Consensus* mulai dari yang berhasil menerapkan samapai yang gagal dalam menerapkan model pembangunan tersebut. Bahkan kegagalan dalam menerapkan model tersebut menyebabkan memburuknya kondisi perekonomian domestik suatu negara. Selain itu terjadi krisis di Amerika juga mengakibatkan banyak negara yang mempertanyakan nilai-nilai yang dibawa

¹⁰ Meredith Woo-Cumings, *The Developmental State*, (New York : Cornell University Press, Ithaca, 1999), page 1.

¹¹ U. Sagena. 2005. "*Developmental State, Japan Transformation*". *Jurnal Sosio-Politika*, Vol.6 no.12, Desember 2005. Diakses melalui [http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no12_unisagena%20\(03-14-13-04-13-13\).pdf](http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no12_unisagena%20(03-14-13-04-13-13).pdf)

oleh *Washington Consensus*. Oleh karena itu banyak pandangan baru yang muncul akibat kurangnya legitimasi dari *Washington Consensus*. Salah satu dari pandangan pembangunan adalah *Neo-Developmentalism*.

2.2.2. Neo-Developmentalism

Neo-developmentalism merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh ahli ekonom dan pembuat kebijakan Brazil yakni Luiz Carlos Bresser-Pereira.¹²

Perkembangan istilah *neo-developmentalism* tidak dilakukan sendiri, melainkan di bantu oleh pejabat bank sentral Brazil pada tahun 2003 yakni Antonio Barros de Castro dan ahli Sosiolog Cecilia Kerstenetzky yang menulis mengenai pentingnya penggabungan konsep *developmentalism* dengan negara persemakmuran.¹³

Istilah *Neo-Developmentalism* muncul saat banyak negara berkembang mengalami kegagalan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang khususnya negara di Kawasan Amerika Latin. Dengan keadaan tersebut maka negara terpaksa melakukan strategi nasionalis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini memuat kepentingan nasional negara-negara tersebut, sehingga saat ini strategi pembangunan nasional tersebut dikenal sebagai *Neo-Developmentalism* atau *New-Developmentalism*.

Pada akhir dekade 2000, istilah *Neo-Developmentalism* menarik perhatian dikalangan ahli ekonom, sosial, politik. Sehingga istilah *Neo-Developmentalism*

¹² Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

¹³ Ibid.

ini dijadikan diskursus studi pembangunan internasional yang baru.¹⁴ Pada akhir tahun 2010 istilah *Neo-Developmentalism* semakin dikenal dunia. Hal ini dikarenakan para ilmuwan dunia dan Brazil sedang dalam pertemuan di Konvensi San Paolo, sehingga terjadi penggabungan pemikiran strukturalis¹⁵ yang menekankan pada persamaan yang akan di dapatkan dari pasar bebas dan Keynesian¹⁶ yang menekankan pada peran negara dalam melakukan intervensi agar memperoleh kestabilan ekonomi dalam sebuah paradigma baru yang disebut dengan "*Ten Theses on Neo-Developmentalism*".¹⁷

Adapun asumsi atau pemikiran yang membentuk paradigma ini antara lain¹⁸;

- a. **Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang struktural.** Dimana negara mampu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk memberikan tingkat maksimal dari keberlanjutan lingkungan dalam akumulasi penggabungan teknikal. Tujuan utama dari argumen ini adalah untuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh sumber daya manusia.

Tidak hanya melibatkan peningkatan produktivitas di masing industri

¹⁴ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?l. Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

¹⁵ Balaam, David N. dan Bradford Dillman. 2011. *Introduction to International Political Economy 5th edition*. Pearson : United State

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?l. Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

¹⁸ Structuralist Development Macroeconomics Center. 2010. *Ten Theses on New Developmentalis*. Diakses melalui <http://www.tentheseonnewdevelopmentalism.org/>

melainkan melibatkan sektor keuangan dan transfer pekerja untuk industri barang dan jasa yang bernilai tinggi dan memberikan upah yang tinggi.

- b. Fokus utama dalam proses ini adalah pasar, namun **Negara** juga memiliki peran yang strategis dalam memberikan kerangka kerja institusi untuk mendukung proses ini. Hal ini termasuk dalam hal mempromosikan struktur keuangan dan lembaga keuangan yang menyalurkan sumber daya dalam negeri untuk mengembangkan inovasi pada sektor-sektor strategis. Kerangka kerja ini juga melibatkan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidak seimbangan struktural dan daya saing internasional.

- c. Dalam konteks globalisasi, **pembangunan ekonomi memerlukan strategi pembangunan nasional** yang dapat melihat peluang global. Contohnya ekonomi skala global dan sumber pembelajaran teknologi, mengurangi hambatan untuk inovasi dengan menciptakan *intellectual property regimes* yang kuat, menjamin stabilitas keuangan, dan menciptakan peluang investasi kepada perusahaan swasta.

- d. Meskipun pandangan *the Schumpeterian* mengenai proses pembangunan dan kebijakan industri sangat relevan, namun **sisi permintaan adalah salah satu penyebab hambatan pertumbuhan**. Sejak masa Keynesian, hal tersebut telah diakui bahwa penawaran tidak akan menciptakan permintaan secara otomatis. Bagaimanapun, di negara berkembang memiliki dua kecenderungan struktural yang membatasi permintaan dan investasi yakni ; Kecenderungan upah meningkat di bawah rata-rata

pertumbuhan produktivitas, dan kecenderungan struktural untuk overvaluasi nilai real atau kurs nominal.

e. **Kecenderungan upah meningkat lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan produktivas.** Hal ini disebabkan oleh banyaknya

penawaran tenaga kerja dan politik ekonomi pasar buruh. Selain membatasi permintaan domestik dan memaksakan pendapatan di kelas tinggi, kecenderungan ini dapat mempengaruhi tingkat negatif pada pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Menurut hukum, minimum upah, transfer tunai kepada yang miskin, dan pada prinsipnya pemerintah menjamin untuk menyediakan pekerja dalam upah hidup dapat menetralsisir kecenderungan buruh yang tidak terbayar. Sebagai alternatif, overvaluasi kronis pada mata uang nasional untuk meningkatkan pembelian adalah bukan strategi berkelanjutan.

f. **Kecenderungan siklus nilai mata uang asing yang berlebihan di**

negara berkembang disebabkan oleh ketergantungan yang berlebihan pada tabungan luar negeri dalam bentuk arus modal asing dan *the dutch disease*¹⁹. Dalam konteks ini mengacu pada terbukanya pasar modal yang berlebihan dan kurangnya aturan yang tepat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa nilai tukar dinegara berkembang tidak hanya stabil namun memberikan kontribusi pada krisis mata uang secara berulang dan

¹⁹ *The Dutch Disease* adalah istilah ekonomi yang mengacu pada konsekuensi negatif yang timbul dari adanya kenaikan besar dalam nilai mata uang suatu negara. Hal ini biasanya terjadi karena adanya penemuan sumber daya alam, namun dapat meningkatkan arus mata uang asing ke suatu negara, termasuk investasi langsung asing, bantuan asing atau peningkatan substansial dalam harga sumber daya alam. Hal ini akan berdampak pada menurunnya daya saing internasional atas sektor tradable lainnya karena ekspor berbasis sumber daya mendesak untuk segera di ekspor. Biasanya negara ini menghadapi risiko proses de-industrialisasi.

menggelembung di pasar keuangan. Hal ini juga menyiratkan bahwa peluang pada orientasi ekspor investasi sangatlah kronis sebab nilai tukar yang berlebih membuat perusahaan yang pada awalnya efisien dan berkompeten menjadi tidak efisien dan tidak berkompeten secara internasional.

g. **The Dutch Disease dapat dikarakteristikan sebagai overvaluasi yang**

permanen dari mata uang nasional. Hal ini dikarenakan *The Dutch Disease* ini dapat menghambat industri tradable²⁰ dari kemakmuran. Hal ini terjadi karena adanya irisan dalam kurva keseimbangan kurs transaksi berjalan dengan keseimbangan kurs industri.

h. **Pembangunan ekonomi harus dibiayai oleh tabungan domestik.** Untuk

mencapai tujuan tersebut, pemegang kuasa dalam lembaga keuangan publik harus memastikan untuk memanfaatkan penuh atas sumber daya yang dimiliki dalam negeri, khususnya tenaga kerja, inovasi keuangan dan dukungan investasi yang diperlukan. Upaya untuk menggunakan tabungan asing melalui defisit transaksi berjalan biasanya tidak meningkatkan tingkat investasi melainkan meningkatkan utang dalam negeri dan memperkuat ketidakstabilan keuangan. Strategi pertumbuhan dengan mengandalkan tabungan asing menyebabkan kerapuhan keuangan sehingga permintaan terjebak dalam regresi untuk membangun kepercayaan permainan dan akan selalu berakhir pada krisis mata uang.

²⁰ Tradable adalah barang atau jasa yang di perdagangkan baik impor atau ekspor. Barang atau jasa ini akan menghasilkan devisa yang akan meningkatkan standar hidup masyarakat.

i. Dalam membentuk kerangka kerja yang tepat untuk pembangunan, pemerintah harus **memastikan hubungan jangka panjang antara utang publik dan pendapatan negara serta nilai tukar rill** yang memperhitungkan kebutuhan untuk melawan efek buruk pada industri manufaktur.

j. Untuk mencapai pembangunan jangka panjang, **kebijakan ekonomi harus meyakinkan bahwa pekerja penuh adalah tujuan utama**, serta memastikan harga dan stabilitas keuangan.

Sehingga yang menjadi inti dari *Neo-developmentalism* adalah sebuah strategi pembangunan kapitalis nasional yang membantu atau sebagai alternatif lain bagi negara berkembang untuk melihat strategi pembangunan selain *Old-Developmentalism* atau *Washington Consensus*. Menjadi jalan alternatif dikarenakan model pembangunan *Neo-developmentalism* menawarkan strategi lain yang tidak hanya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik namun juga terjadi pemerataan dan penurunan angka kemiskinan akibat adanya pasar bebas.

Strategi pembangunan *Old-developmentalism* terbentuk ketika negara berkembang berada dalam pertumbuhan ekonomi yang baik. Mereka memiliki strategi dimana sebuah negara dapat melihat dan mengambil keuntungan dari lemahnya pusat pemerintah sehingga mereka merumuskan strategi pembangunan nasional, yang biasanya tersirat pada perlindungan industri yang baru berkembang dan memaksa domestiknya untuk menabung.

Hal tersebut menjadi strategi pada masa model pembangunan *Old-developmentalism* atau *national developmentalism*. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu kata *nation* memiliki arti bahwa seluruh elemen negara dapat bergabung bersama dalam kompetisi internasional. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan kerangka kerja sistem kapitalis yang negara memilik peran sebagai pengambil tindakan bersama yang mencakup banyak kepentingan.

Menurut Luiz Carlos Bresser-Pereira,²¹ model dan strategi pembangunan *Old-developmentalism* sudah terjadi sekitar tahun 1930-1970 di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti negara di kawasan Amerika Latin. *Old-developmentalism* bukanlah teori melainkan sebuah strategi pembangunan negara. Untuk menerapkan strategi tersebut maka di butuhkan sebuah teori ekonomi. *Old-developmentalism* bertentangan dengan ekonomi neo klasik. Hal ini terjadi dikarenakan ekonomi neo klasik hanya berisi tentang kumpulan diagnosis dan kebijakan ekonomi serta saran untuk melakukan reformasi lembaga negara yang dibuat oleh negara maju untuk negara berkembang.²²

Strategi yang di bawa oleh *Old-developmentalism* dengan *Neo-developmentalism* tidaklah jauh berbeda. Perbedaan yang mendasari dua model

²¹ Bresser-Pereira L. C. 2006. *The New Developmentalism and Conventional Orthodoxy*. Article for SEADE's Sao Paulo em Perspectiva review. Diakses melalui http://networkideas.org/featart/jul2006/Developmentalism_%20Orthodoxy.pdf

²² Bresser-Pereira L. C. 2006. *The New Developmentalism and Conventional Orthodoxy*. Article for SEADE's Sao Paulo em Perspectiva review. Diakses melalui http://networkideas.org/featart/jul2006/Developmentalism_%20Orthodoxy.pdf

pembangunan ini adalah kondisi internasional dan kondisi domestik.²³ Namun perbedaan yang sangat mencolok berada pada kondisi domestik atau nasional.

Pada masa *Old-developmentalism* membawa strategi *Import Subtituting Industrialization* (ISI)²⁴ dan strategi tersebut sangat efektif dan bekerja untuk membangun perindustrian negara berkembang khususnya di kawasan Amerika-Latin. Namun jika ISI di terapkan kembali pada saat ini sudah tidak efektif lagi.

Proteksi sudah tidak lagi efektif bagi negar-negara yang telah melewati *infant stage*. Saat ini negara berkembang membutuhkan perusahaan yang mampu berkompetisi di seluruh sektor perindustrian. Serta perusahaan tersebut juga bisa menjadi lebih kompetitif dalam ekspor. *Old-developmentalism* melihat adanya keraguan dalam melakukan aktivitas ekspor dan menganggap bahwa ekspor tidak akan mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Berbeda dengan *Old-developmentalism* yang pesimis akan ekspor, strategi yang dibawa oleh *Neo-developmentalism* lebih terbuka dan percaya akan aktivitas ekspor yang akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi sebuah negara. Selain itu *Neo-developmentalism* tidak melakukan proteksi, namun lebih selektif dalam melakukan keterbukaan pasar. Negara memiliki peran penting dalam melakukan rencana pada aktivitas di pasar bebas. Sehingga sebelum melakukan hal tersebut, negara akan melakukan negosiasi dengan aktor lain agar tujuan dari aktivitas pada

²³ *Ibid.*

²⁴ *Import Subtituting Industrialization* adalah strategi untuk memproduksi barang pengganti impor yang dihasilkan dari industri lokal, dengan demikian keuntungan penjualan barang produksi akan kembali pada produsen lokal dan juga pemerintah negara. Biasanya ISI diwujudkan kedalam bentuk kebijakan negara meliputi pembatasan hingga pelanggaran impor, memberikan tarif tinggi, pengelolaan moneter, penguasaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung komunikasi dan transportasi industri.

pasar bebas dapat tercapai. Negosiasi ini dapat dilakukan secara bilateral, multilateral atau bahkan regional.

Tabel 1. Perbedaan Pandangan antara Old Developmentalism dan New (Neo)-Developmentalism²⁵

	<i>Old Developmentalism</i>	<i>Neo-Developmentalism</i>
<i>Role of The State</i>	Negara memerankan peran utama dalam hal memaksa untuk menabung dan investasi pada sebuah perusahaan	Negara telah memberikan kemudahan dengan memberikan subsidi, namun tetap menjalankan peran utama dalam hal mengontrol untuk menabung dan investasi pada sebuah perusahaan
<i>Economy Oriented</i>	Proteksi dan pesimis	Melakukan ekspor dan realistis
<i>Economy Policy</i>	Melemahnya fiskal	Mendisiplinkan fiskal

Perbedaan yang terakhir adalah mengenai peran negara dalam mempromosikan tabungan dan investasi untuk membangun infrastruktur. Kedua strategi pembangunan sama-sama memiliki kesamaan untuk menyediakan fasilitas umum. Namun dalam strategi yang dikemukakan oleh *Old-developmentalism* peran negara menyatukan proses akumulatif primitif.²⁶ Serta membebankan

²⁵ Bresser-Pereira L. C. 2006. *The New Developmentalism and Conventional Orthodoxy*. Article for SEADE's Sao Paulo em Perspectiva review. Diakses melalui http://networkideas.org/featart/jul2006/Developmentalism_%20Orthodoxy.pdf

²⁶ Akumulasi primitif merupakan proses dimana masyarakat pra kapitalis melakukan transisi menjadi masyarakat kapitalis. Keadaan sosial dari produksi kapitalis, eksploitasi dan akumulasi



investasi yang tinggi pada sektor privat. Sedangkan strategi yang di bawa oleh *Neo-Developmentalism* dalam peran negara tetap memaksakan tabungan dan investasi di sektor industri strategis, namun sudah tidak lagi dibebankan pada privat sektor. Sebab privat sektor saat *neo-developmentalism* sudah memiliki porsinya sendiri dan oleh karena itu negara juga turun andil dalam melakukan investasi di sektor-sektor industri strategis.

Terakhir strategi *Neo-developmentalism* adalah menjunjung tinggi dalam melakukan keseimbangan fiskal. Hal ini dikarenakan *Neo-developmentalism* menganggap bahwa negara merupakan sebuah instrumen yang paling baik untuk mencapai sebuah tindakan yang diinginkan bersama. Sedangkan *Old-Developmentalism* telah mengalami kegagalan dalam melakukan penyeimbangan fiskal karena telah terjadi defisit publik dan melambungnya permintaan yang pada akhirnya membuat banyak berkembang mengalami krisis.

2.3. Operasionalisasi Teori

Dalam melakukan operasionalisasi teori, penulis akan dibantu oleh penelitian yang di tulis oleh Cornel Ban dengan judul *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*²⁷. Dalam tulisannya, Ban mengemukakan mengenai aktivitas yang dilakukan negara agar mencapai tujuan dari strategi pembangunan menurut *Neo-Developmentalism*.

telah ditetapkan melalui sarana yang tersedia pada masyarakat pra kapitalis. Dengan demikian, akumulasi primitif diidentifikasi sebagai relasi dan dinamika non pasar atau "paksaan ekonomi".

²⁷ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, strategi pembangunan dalam *Neo-Developmentalism* tercermin dari peran negara, orientasi ekonomi, dan kebijakan ekonomi. Dari tiga strategi yang telah disediakan oleh *Neo-Developmentalism* ini kemudian akan penulis persempit menjadi aktivitas yang dilakukan negara dalam mendukung ketiga strategi tersebut. Selanjutnya penulis akan menghubungkan aktivitas pendukung dari strategi *Neo-Developmentalism* dengan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah India.

Strategi yang **terakhir dalam *Neo-Developmentalism* berkaitan dengan kebijakan ekonomi.** Hal ini bertujuan untuk menyetabilkan keadaan ekonomi makro pada sebuah negara. Ketika negara ingin mempertahankan stabilitas ekonomi makro dan mengurangi pengangguran, negara harus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman asing. Sebagai contoh, Brazil yang telah mengalami reformasi privatisasi, liberalisasi dan deregulasi yang signifikan, tetapi pada saat yang sama negara ini juga mengkonsolidasikan perannya sebagai pemilik dan investor dalam industri dan perbankan saat menerapkan kebijakan industri perekonomian terbuka serta melakukan pendekatan yang hati-hati terhadap pergerakan bebas modal.²⁸

Strategi yang **kedua dalam *Neo-Developmentalism* berkaitan dengan orientasi ekonomi.** Pada strategi yang kedua ini memfokuskan untuk melakukan

²⁸ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

keterbukaan ekonomi dan melakukan ekspor.²⁹ Hal ini karena adanya anggapan bahwa banyak negara berkembang yang telah melewati masa *infant industry* sehingga tidak perlu melakukan proteksi dan pesimis akan aktivitas ekspor. Selain itu dalam melakukan keterbukaan ekonomi, tujuan negara harus dilengkapi dengan kebijakan industri yang dapat meningkatkan pangsa dari barang dan jasa bernilai tambah tinggi. Hal tersebut dilakukan melalui kebijakan industri yang ditargetkan pada perusahaan yang dinilai mampu bersaing secara internasional.

Strategi pembangunan *neo-developmentalism* ini juga membawa karakter *export-led model*, yang memiliki dua keunggulan utama dibandingkan model substitusi import (*import-substitution model*).³⁰ Pertama, pasar yang tersedia untuk industri tidak terbatas pada pasar domestik saja. Kedua, jika sebuah negara mengadopsi strategi ini, maka hanya perusahaan yang efisien untuk ekspor yang akan diuntungkan oleh kebijakan industri tersebut. Berbeda dengan *import-substitution model*, yang justru hanya perusahaan-perusahaan tidak efisien yang diuntungkan oleh kebijakan proteksi.

Strategi yang **terakhir dalam Neo-Developmentalism berkaitan dengan peran negara**. Peran negara dalam *Neo-Developmentalism* adalah mengatur birokrasi agar dapat merancang sebuah tujuan, dimana perusahaan milik negara

²⁹ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

³⁰ Bresser-Pereira L. C. 2006. *The New Developmentalism and Conventional Orthodoxy*. Article for SEADE's Sao Paulo em Perspectiva review. Diakses melalui http://networkideas.org/featart/jul2006/Developmentalism_%20Orthodoxy.pdf

dapat memainkan peran utama di banyak sektor industri.³¹ Selain itu negara juga membuat kebijakan sosial yang dirancang untuk menjaga kelas pekerja industri dan kelas menengah tetap stabil. *State activism* pada masa *neo-developmentalism*, negara memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan industri, dan mengambil langkah yang lebih agresif untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Sebagai contoh, ketika Brazil membangun *new state activism*, Brazil justru memelihara dan mengambil keuntungan dari keterbukaan pasar dengan menjamin daya saing industri domestik. Upayanya dipusatkan pada mendirikan bentuk baru kebijakan industri yang menekankan inovasi dan kemitraan dengan industri. Pada saat yang sama, negara menempatkan perhatian substansial pada kebijakan sosial dan redistribusi serta berusaha mengintegrasikan kebijakan sosial dengan strategi pertumbuhan industrial.

³¹ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

Tabel 2. Operasionalisasi Teori Neo-Developmentalism

Variabel	Tujuan	Aktivitas/Indikator	Operasionalisasi
Economy Policy	Macro Stability with Counter-cyclical during crises	<i>Control inflation through inflation targeting</i>	Pemerintah India melalui <i>Reserve Bank of India</i> melakukan kontrol inflasi dengan cara menentukan tingkat target inflasi pada periode berikutnya.
		<i>Market-determined but preferably moderate interest rates</i>	Dalam menentukan tingkat suku bunga, tidak lagi bergantung pada pasar melainkan <i>Reserve Bank of India</i> dapat ikut campur dalam menentukan tingkat suku bunga dan faktor lainnya.
		<i>Market-determined exchange rates but with selective use of capital controls</i>	Dalam menentukan nilai tukar, Pemerintah India melalui <i>Reserve Bank of</i>

		<p><i>India</i> tetap melakukan kontrol terhadap tinggi rendahnya nilai mata uang India.</p>
	<p><i>Independent central bank tasked to control inflation</i></p>	<p>Secara independen dan tanpa faktor lain <i>Reserve Bank of India</i> melakukan pengontrolan terhadap tingkat inflasi di India.</p>
	<p><i>Primary surplus plus</i> <u>(a) current account balance</u> <u>(b) the accumulation of domestic public savings to finance investment and</u> <u>(c) a strongly counter-cyclical fiscal policy through the state banks and sovereign wealth funds</u></p>	<p>Selain mendapatkan surplus India mendapatkan surplus lain pada; a) Keseimbangan transaksi berjalan b) Akumulasi tabungan domestik digunakan untuk membiayai investasi dan c) Melakukan counter-cyclical pada kebijakan</p>

		<p>fiskal melalui bank milik negara dan bank asing.</p> <p><i>Broadening the tax base, cuts in the marginal tax rate but more progressive income tax and with counter-cyclical reforms of direct and consumption taxes during crises</i></p>	<p>Dalam hal ini Pemerintah India melakukan perluasan pada basis pajak dan memotong tarif pajak serta menetapkan pajak penghasilan yang lebih progresif dan dengan reformasi counter-cyclical dari pajak langsung dan konsumsi selama krisis.</p>
<p><i>Economy Oriented</i></p>	<p><i>Selective Outward Orientation</i></p>	<p><i>Remove barriers to entry for international financial institutions but consolidate state banks and subsidize domestic financial market consolidation.</i></p>	<p>Pemerintah India menghapus hambatan masuk bagi lembaga keuangan internasional namun tetap berkonsolidasi dengan bank milik negara serta memberikan subsidi</p>

			pada pasar keuangan domestik
		<i>Trade liberalization with extensive export subsidies and the active transformation of inherited comparative advantage, trade structure and trade partners</i>	Dalam melakukan liberalisasi perdagangan, negara melakukan subsidi ekspor secara menyeluruh dan juga melakukan transformasi aktif terhadap keuntungan komperatif, serta struktur perdagangan dan partner perdagangan.
		<i>Selective privatization of state enterprises with restricted access to foreign bidders</i>	Pemerintah India memperbolehkan privatisasi BUMN secara selektif namun dengan akses terbatas ke penawar asing atau investor asing.
		<i>Selective industrial policy</i>	Pemerintah India mengeluarkan kebijakan

			industri yang selektif.
Role of The State	Free Market Capitalism enable by an activist state and constrained by development objectives	<i>Secure Property Rights</i>	Pemerintah berusaha untuk melindungi Hak Kepemilikan.
		<i>Privatization of state enterprises but with state control over industrial champions and with the exclusion from privatization of federal banks, utilities and strategic commodities.</i>	Untuk menjalankan Pasar Bebas, disini Pemerintah India melakukan aktivitas untuk mengontrol privatisasi pada <i>Public Sector Undertaking</i> yang memiliki kemampuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi.
		<i>No privatization of public services</i>	Pemerintah India membatasi dan melarang aktivitas privatisasi pada jasa publik.
		<i>Moderate financial deregulation</i>	Untuk mencapai tujuan, Pemerintah India

			<p>melakukan deregulasi secara seimbang pada sektor keuangan.</p>
		<p><i>No labor market deregulation and consolidation of corporatist institutions</i></p>	<p>Pemerintah India tidak melakukan deregulasi pada sektor pasar tenaga kerja dan berkolidasi pada institusi terkait.</p>
		<p><i>Conditional cash transfers to the poor plus expansionary minimum income policy</i></p>	<p>Agar tujuan tercapai Pemerintah India memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat tidak mampu dan mengeluarkan kebijakan pendapatan minimum ekspansif.</p>

Dalam tabel operasionalisasi teori yang tersedia, setidaknya Cornel-Ban menyebutkan tiga variabel dengan 16 instrumen yang mencirikan sebuah aktivitas pendukung atas strategi pembangunan yang dikeluarkan oleh *Neo-developmentalism*. Aktivitas tersebut memiliki perbedaan dari aktivitas yang dikemukakan oleh program *Washington Consensus*. Dimana aktivitas pada *Neo-developmentalism* merupakan aktivitas yang membantu negara berkembang untuk memilih alternatif lain untuk membangun ekonomi negaranya selain aktivitas yang dikemukakan oleh *Washington Consensus*.

Dalam tulisannya, Cornel-Ban juga menjelaskan bahwa tidak semua negara serta merta menghapus aktivitas yang terdapat pada program *Washington Consensus* dan tidak pula mengadopsi seluruh instrumen yang terdapat pada *Neo-developmentalism*.³² Terdapat beberapa aktivitas dalam *Washington Consensus* yang tetap bertahan dan ada yang terkikis sehingga digantikan oleh aktivitas yang terdapat pada *Neo-developmentalism*. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya *Neo-developmentalism* merupakan sebuah strategi pembangunan yang terhibriditas dengan program dari *Washington Consensus*.

³² Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

2.4. Alur Pemikiran

LATAR BELAKANG

Pada masa pemerintahan Manmohan Singh 2004-2014 India dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pada era ini strategi pembangunan yang dikeluarkan memiliki karakter untuk menyejahterahkan seluruh masyarakat (*inklusif growth*) dan juga meneruskan pertumbuhan ekonomi yang telah diraih. Dalam melancarkan strategi pembangunan tentu pemerintah membutuhkan sebuah tindakan atau aktivitas guna mencapai tujuan dari strategi pembangunan tersebut. *Neo-Developmentalism* merupakan salah satu pandangan baru mengenai studi pembangunan. *Neo-Developmentalism* memiliki strategi pembangunan kapitalis nasionalis, dimana nasionalis memiliki arti mengembalikan kembali peran negara dalam aktivitas ekonomi. Terdapat aktivitas dalam *Neo-Developmentalism* yang akan membantu mencapai tujuan dari Strategi pembangunan.

RUMUSAN MASALAH

Apakah India menerapkan *Neo-Developmentalism* dalam strategi pembangunan ekonomi India pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014?

Neo-Developmentalism

ECONOMY POLICY

Stabilitas ekonomi makro namun negara diperbolehkan untuk mengintervensi jika dalam keadaan krisis.

ECONOMY ORIENTED

Mendorong perusahaan domestik agar mampu bersaing dengan perusahaan asing secara global.

ROLE OF THE STATE

Negara memperbolehkan untuk melakukan aktivitas pasar bebas namun tetap dibatasi oleh tujuan pembangunan negara.

Argumen Utama

Dalam strategi pembangunan yang di keluarkan pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014 bertujuan untuk tak hanya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga harus berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut India melakukan stabilitas ekonomi untuk meredam krisis. Selain itu India juga meneruskan orientasi ekonomi yang terbuka dan mengembalikan semangat *Look East Policy*. Hal ini bertujuan untuk menguatkan hubungan dagang dan membantu perekonomian negara dengan memperbaiki perusahaan domestik agar mampu berkompetisi pada skala global. Terakhir adalah negara melakukan aturan yang ketat dalam aktivitas ekonomi terbuka, dimana dalam hal ini negara membatasi aktivitas dengan tujuan pembangunan.

2.5. Argumen Utama

Dalam penelitian ini penulis memiliki argumen utama bahwasanya dalam pencapaian yang telah India dapatkan pada masa pemerintahan manmohan Singh 2004-2014 dikarenakan strategi pembangunan yang dikeluarkan memiliki karakter yang berbeda dengan strategi pembangunan sebelumnya.

Strategi pembangunan ekonomi India pada tahun 2004-2014 memiliki tujuan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil namun juga secara inklusif. Dimana strategi pembangunan India tersebut memiliki persamaan dengan strategi pembangunan milik *Neo-Developmentalism* yakni kapitalis nasionalis. Dimana negara tidak membatasi aktivitas ekonomi kapitalis namun juga dibatasi dengan tujuan pembangunan negara. Untuk mencapai tujuan dari strategi pembangunan India melakukan aktivitas yang pendukung antara lain : Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi maka India harus melakukan stabilitas ekonomi pada negaranya; Selanjutnya untuk mendapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi India masih membuka orientasi ekonomi terbuka dimana aktivitas liberalisasi privatisasi masih dilakukan. Namun aturan dalam hal tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya *Look East Policy*; Terakhir guna mendapatkan hal tersebut, India melakukan intervensi atau mengembalikan peran negara dalam aktivitas ekonomi kapitalis, hal ini dilakukan guna mengontrol tujuan dari pembangunan itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis *Neo-Developmentalism* Dalam Melihat Strategi Pembangunan Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian lebih banyak berhubungan dengan subjek penelitian, baik berupa tulisan maupun berhubungan langsung secara lisan. Jenis penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif atau eksplanatif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari subjek penelitian penulis ataupun dari pengamatan terhadap perilaku subjek.¹ Data deskriptif disini merupakan data yang hanya bersifat menjelaskan fenomena yang terjadi. Sehingga disini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Penulis akan mengumpulkan fakta-fakta spesifik yang sesuai dengan kerangka konseptual, yang kemudian dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan terhadap suatu obyek atau kejadian.² Hal ini berkaitan dengan pandangan dalam aktivitas yang terdapat pada *Neo-Developmentalism* Terhadap Aktivitas Dalam Strategi Pembangunan Perekonomian Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014 di India.

¹ Prof.Dr.I Wayan Koyan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Diakses melalui <http://pasca.undiksha.ac.id/e-learning/staff/dsnmateri/6/1-14.pdf>

² Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES. Hlm. 102

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis akan membatasi penelitian ini pada aktivitas Pemerintah India yang berkaitan dengan strategi pembangunan India pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini dengan teknik studi kepustakaan atau literature. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber yang berupa buku, catatan, jurnal, literatur.

Penelitian ini berdasarkan pada studi literatur yang didapatkan dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
- b. Perpustakaan Universitas Brawijaya
- c. Situs Internet
- d. Buku-buku pribadi
- e. Situs berita online
- f. Journal online

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder atau melalui kegiatan studi kepustakaan.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lebih menekankan pada observasi partisipatif, dokumentasi, dan pengambilan data yang dilakukan dengan rentang

waktu relatif lama, tahap demi tahap, dan bersifat berkembang.³ Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis data dengan melalui beberapa tahap, pertama dengan melakukan pemilihan dan menyusun klasifikasi data, kedua yakni menyunting data yang kemudian akan dianalisis. Ketiga, mengkonfirmasi data yang memerlukan verifikasi data. Dan tahap terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan.

Pengolahan data sendiri dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yakni pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga rencana penelitian. Tahap kedua, melakukan pengolahan data yang lebih mendalam serta dilakukan dengan cara mengolah hasil, menganalisis kasus dan pengumpulan berbagai informasi yang berasal dari buku, surat kabar, internet ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Tahap ketiga, melakukan penelitian terhadap sumber tersebut apakah data-data tersebut faktual atau tidak.

3.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini akan terbagi menjadi 6 bab dan beberapa sub-bab di dalamnya, antara lain ;

BAB I menjelaskan mengenai latar belakang masalah mengenai kasus yang akan penulis bahas, kemudian penulis mengerucutkan masalah tersebut dengan sebuah pertanyaan pada rumusan masalah. Kemudian penulis menjelaskan tujuan penelitian yang relevan yang menjawab pertanyaan rumusan masalah yang disajikan.

³ Imam Suprayogo dan Drs.Tobroni,M.Si, 2001, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 161.

BAB II menjelaskan mengenai studi terdahulu yang memiliki *research position* yang dapat memberi penulis acuan untuk melakukan penelitian yang lebih baik.

Kemudia penulis akan memaparkan perspektif yang penulis pakai, lengkap dengan konsep, sejarah, ciri, dan tolak ukur perspektif tersebut dalam memandangi satu kasus. Kemudian penulis menyederhanakan konsep tersebut kedalam operasionalisasi konsep dan alur pemikiran. Pada sub-bab terakhir, penulis akan menyajikan argument utama penulis dalam memandangi kasus yang penulis teliti ini.

BAB III penulis memaparkan jenis dan ruang lingkup penelitian, kemudian memaparkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang penulis kumpulkan. Kemudian penulis menjelaskan sistematika penulisan pada penelitian ini.

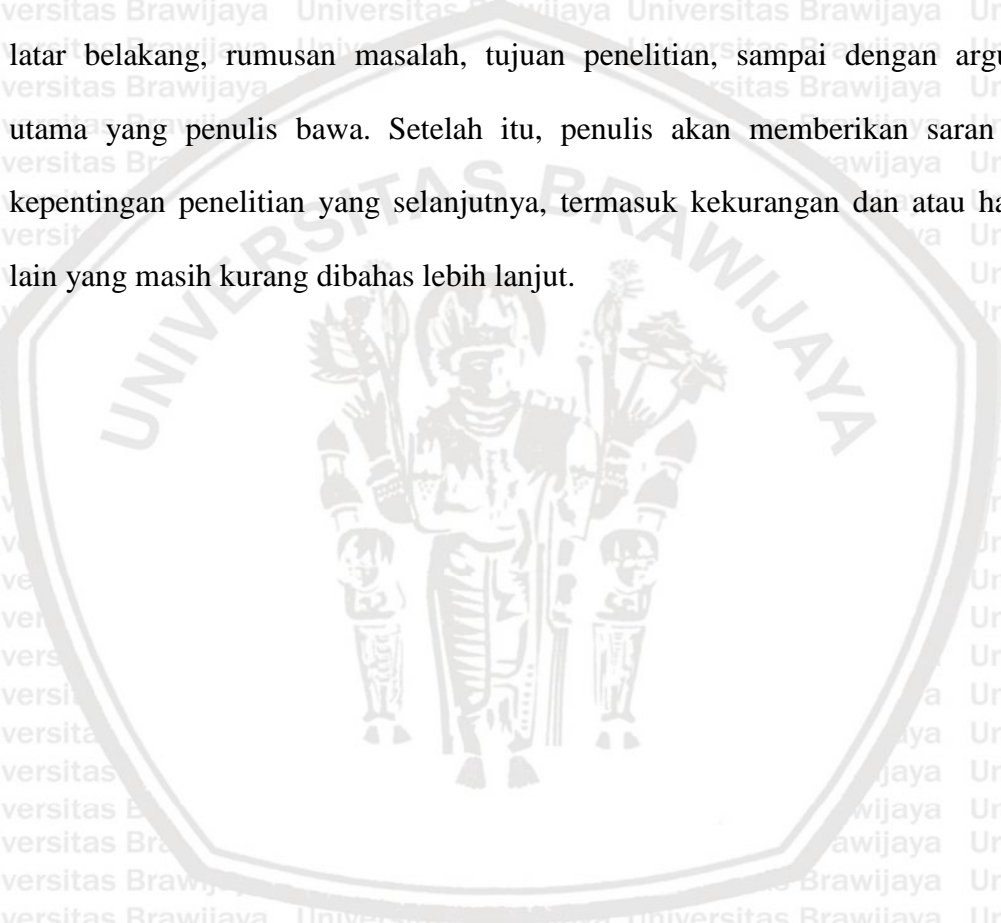
BAB IV penulis akan menyajikan bab ini dengan gambaran umum mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Gambaran umum tersebut diantaranya berupa gambaran umum tentang sejarah perkembangan perekonomian India sampai saat ini. Selain itu penulis juga akan memberi poin atas aktivitas pada strategi pembangunan yang terdapat di India melalui Model Pembangunan yang telah diterapkan India.

BAB V berisi tentang pembahasan yang penulis teliti dengan menggunakan paradigma *Neo-Developmentalism*. Penulis akan melihat *Neo-Developmentalism* Dalam Strategi Pembangunan Ekonomi India Pada Masa Pemerintahan Manmohan Singh Tahun 2004-2014. Penulis akan menerapkan *Neo-*

developmentalism, lengkap dengan operasionalisasi yang dibawa oleh penstudi yang bersangkutan.

BAB VI berisi tentang saran yang dapat penulis berikan untuk kepentingan penelitian yang lebih lanjut yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat ini.

Penulis akan memberikan kesimpulan akhir berupa narasi yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai dengan argumen utama yang penulis bawa. Setelah itu, penulis akan memberikan saran bagi kepentingan penelitian yang selanjutnya, termasuk kekurangan dan atau hal-hal lain yang masih kurang dibahas lebih lanjut.



BAB IV

GAMBARAN UMUM INDIA DAN PERGESERAN MODEL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDIA

Pada awal kemerdekaan India dikenal sebagai negara miskin.¹ India dianggap sebagai negara miskin yang memiliki banyak konflik dan bencana yang terjadi disana. Namun kondisi India saat ini sudah sangat berbeda, India saat ini dipandang sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki peran penting di berbagai aktivitas internasional. Selain itu kondisi perekonomian dan juga pasar yang besar menjadikan India sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus dan menjanjikan. Terbukti dengan pertumbuhan pendapatan domestik India yang cenderung naik yang dimulai sejak awal kemerdekaan sampai saat ini

Tabel 1. Pendapatan Rata-Rata di India²

Tahun	GDP
1961	3.72%
1971	1.64%
1981	6.0%
1991	1.05%
2001	4.82%
2011	6.63%
2014	7.24%

¹ Ibrahim Novansyah. *Kebangkitan India : Dari Model Nehru ke Model Knowledge Based Society*. Universitas Gajah Mada. Diakses melalui https://www.academia.edu/9497019/Kebangkitan_India_Dari_Pembangunan_Model_Nehru_ke_Model_Knowledge_Based_Society

² WorldBank data GDP Growth (annual %) - India. Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=IN&start=1961>

Tak hanya dari tingkat pertumbuhan pendapatan India, banyak sekali perubahan positif yang dialami oleh India. Sehingga saat ini India menjadi salah satu aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam perjanjian-perjanjian internasional negan aktor lain. Hal ini dilakukan India tidak mudah, karena pemerintah India mengambil risiko untuk mengubah model pembangunan yang sudah tertanam dan menjadi karakter pembangunan di India. Pemerintah India saat ini sudah mulai menyadari bahwasanya model pembangunan tidak stagnan melainkan dinamis sehingga sebuah negara akan dapat berkembang dan dapat mempertahankan sebuah keberhasilan yang telah dicapai.

4.1. Model Pembangunan di India

Setiap negara tentu memiliki model dan strategi pembangunan yang diterapkan di negaranya. Pembangunan itu sendiri berkenaan dengan kemampuan suatu negara untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut sebuah negara akan menerapkan model atau startegi pembangunan.³ Tujuan dari pembangunan dapat dilihat berhasil atau tidak dengan melihat GDP, tingkat ketimpangan, kualitas hidup, kerusakan lingkungan dan kesinambungan pada sebuah negara.⁴

Namun model atau strategi pembangunan itu sendiri tidak selalu berdampak positif atau berhasil diterapkan oleh sebuah negara. Hal ini bergantung pada kondisi dan pemaknaan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga model pembangunan di dunia internasional sangatlah dinamis. Sebab jika sebuah negara

³ Richard Peet dan Elaine Hartwick. 2009. *Theories of Development : Contentations, Arguments, Alternatives Second Edition*. New York: The Guilford Press

⁴ Ibid.

tidak berhasil mencapai tujuan, dari pembangunan itu sendiri maka akan melakukan perubahan bahkan menciptakan model pembangunan yang dapat mencapai tujuan tersebut.

Aspek dari model pembangunan sangat beragam namun dalam pembangunan aspek yang paling penting adalah peran negara. Hal ini menjadi penting karena negara merupakan aktor yang dapat mencapai tujuan dari pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut peran negara tidak akan terlepas dari aktivitas ekonomi. Sehingga dalam hal ini peran negara yang akan dibahas adalah peran negara dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun peran negara dalam sebuah model pembangunan juga berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi yang ada baik pada level domestik ataupun level internasional.

Pada masa liberal atau ekonomi klasik peran negara sangat di minimalisir dari aktivitas ekonomi karena dianggap sebagai penghambat dari perdagangan.⁵

Sedangkan pada masa merkantilis, peran negara sangat besar, bahkan negara dapat mengatur jalannya aktivitas ekonomi agar sebuah negara dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal.⁶ Namun peran negara dalam ekonomi klasik dan juga merkantilis masih mengalami pro dan kontra, sehingga melahirkan pemikiran baru dalam melihat peran negara dalam aktivitas ekonomi.

Melihat kegagalan dalam meminimalkan peran negara dalam aktivitas ekonomi, maka lahir pemikiran Keynesian. Keynesian menganggap bahwa hal

⁵ Balaam, David N. dan Bradford Dillman. 2011. *Introduction to International Political Economy 5th edition*. Pearson : United State

⁶ Ibid.

tersebut terjadi karena tidak adanya kontrol negara dalam aktivitas ekonomi sehingga tidak ada yang mampu menyetabilkan keadaan ekonomi. Sehingga pada masa Keynesian peran negara kembali dimunculkan hanya untuk mengontrol dan melakukan stabilitas pasar jika pasar berada dalam kondisi yang kurang baik.⁷

Selain itu terdapat pandangan lain mengenai peran negara dalam aktivitas ekonomi yang dikeluarkan oleh pemikiran strukturalis. Dalam pemikiran ini negara berperan sebagai pengontrol dari segala aktivitas ekonomi yang terdapat dalam pasar. Negara akan menentukan harga, agar masyarakat disuatu negara tidak akan dirugikan dari pasar bebas. Selain itu negara juga lebih menekankan pada perencanaan dan agenda yang dibuat oleh negara itu sendiri agar seluruh komponen negara mendapatkan hasil dan tujuan yang sama.⁸

Model pembangunan yang berhasil diterapkan di negara maju, kemudian akan dipromosikan sebagai sesuatu hal yang harus diikuti oleh negara berkembang. Hal ini dilakukan agar negara berkembang mampu membangun negaranya dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini dilakukan pula oleh India, dimana India dapat melakukan pembangunan secara berdaulat ketika mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947.

4.1.1. Model Pembangunan India Awal Kemerdekaan

Pada tahun 1947, India telah mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris.

Pada masa ini India dipimpin oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Model pembangunan yang diterapkan oleh Nehru saat awal kemerdekaan tidak jauh

⁷ Balaam, David N. dan Bradford Dillman. 2011. *Introduction to International Political Economy 5th edition*. Pearson : United State

⁸ Ibid.

berbeda dengan model pembangunan yang telah diterapkan pada masa penjajahan, namun terdapat sedikit perubahan terkait pandangannya mengenai liberalisasi.⁹

Pada awalnya, model pembangunan yang di terapkan masih mengarah pada ide pandangan liberal. Hal ini ditandai dengan adanya *The Industrial Policy Resolution* yang dikeluarkan pada tahun 1948. Kebijakan ini masih membebaskan sektor swasta dalam melakukan investasi dan izin usaha di beberapa sektor khusus di India. Namun hal ini tak bertahan lama, sebab pada tahun 1956 pemerintah India kemudian melakukan perbaikan atau mengatur ulang terkait kebijakan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya krisis neraca pembayaran yang diakibatkan oleh penganggaran valuta asing di India.¹⁰ Sehingga pada tahun 1956, pemerintah India mulai mengetatkan peraturan mengenai aturan dalam melakukan investasi dan izin usaha di sektor khusus di India. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai *License Raj*.¹¹

Pada akhirnya Perdana Menteri Jawaharlal Nehru memadukan semangat sosialis dalam model pembangunan awal ini dan yakin bahwa India dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri tanpa harus bergantung kepada negara asing.¹² Dalam mendukung semangat tersebut Nehru kemudian menekankan pada pembangunan yang berorientasi pada *Import Substitution Industrialization* dan *In-House* industri. Selain itu sentralisasi ekonomi yang

⁹ Panagariya, Arvind. 2008. *India: The Emerging Giant*, New York. Oxford University Press.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Merujuk pada izin sertifikasi dari pemerintah kepada pihak swasta untuk sebuah kepemilikan usaha. Hal ini bertujuan untuk terbentuknya sebuah ekonomi yang terencana, dimana semua aspek dapat diatur oleh pemerintah dan izin atau lisensi hanya akan diberikan kepada perusahaan atau usaha yang terpilih saja.

¹² J.S. Sodhi. 2008. "An Analysis of India's Development: Before and After Globalization". *India Journal of Industrial Relations* Vol.43 no.3. Jan, 2008. pp. 317-354

dimaksud oleh pemerintah dalam sistem ekonomi adalah segala sesuatu aktivitas ekonomi yang berjalan di India berada dibawah kendali pemerintah.

Menurut Radhakrisna (2006)¹³ hal ini terjadi karena adanya keyakinan bahwa India tidak memiliki kepercayaan pada kekuatan pasar serta perdagangan internasional, dikarenakan trauma yang diterima oleh India akibat jajahan Inggris yang membawa *Laissez Fairre policy* yang hanya mengurus kekayaan dan modal yang di miliki oleh India pada saat penjajahan. Hal ini kemudian memiliki kesamaan tujuan dengan apa yang telah di kemukakan mengenai tujuan negara India dalam sektor ekonomi pada tahun 1947, yakni;

“The objective for the country as a whole was the attainment, as far as possible, of national self-sufficiency. International trade was certainly not excluded, but we were anxious to avoid being drawn into the whirlpool of economic imperialism. We wanted neither to be victims of an imperialist power nor to develop such tendencies ourselves... The first charge on the country’s produce should be to meet the domestic needs of food, raw materials, and manufactured goods. Surplus production would not be dumped abroad but be used for exchange of such commodities as we might require. To base our national economy on export markets might lead to conflicts with other nations and to sudden upsets when those markets were closed to us.”¹⁴

Selanjutnya, model pembangunan yang diterapkan India masih berkenaan dengan model pembangunan Nehru. Namun pada masa pemerintahan Indira Gandhi, pola sosialisme lebih kuat. Hal ini terbukti dengan mengeluarkan undang-undang mengenai regulasi perusahaan bisnis besar. Undang-undang ini disebut dengan *Monopolies and Restrictive Trade Practies (MRTP) Act*. Hal ini dianggap sebagai pembersihab pemerintah terhadap perusahaan multinasional atau perusahaan besaryang terdapat di India. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *Red-book*, dimana kebijakan ini berisikan tentang daftar barang yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Panagariya, Arvind. 2008. *India: The Emerging Giant*, New York. Oxford University Press.

dapat di impor di India.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa pada masa ini aktivitas perdagangan internasional India sangat tertutup.

Selain itu, pada masa model pembangunan ini, pemerintah India mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran pemerintah mengeluarkan kebijakan *Garibi Hatao*¹⁶ dan program pendukung kebijakan tersebut pada tahun 1970'an.¹⁷ Namun ironisnya kebijakan dan program pendukung yang dikeluarkan oleh pemerintah India tidak berjalan mulus. Tingkat kemiskinan di India meningkat dan hampir mencapai 50%¹⁸ dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu seperti bahan politis untuk melembagakan pemerintahan saat itu yang didominasi oleh anggota partai Kongres Nasional India. Hal ini tentu merugikan masyarakat karena dana dari program tersebut hanya dijadikan korupsi bagi pejabat-pejabat terkait.¹⁹

Namun pada tahun 1980'an model pembangunan India pun akhirnya mengalami perubahan. Model pembangunan ini dibawa oleh Rajiv Gandhi yang

¹⁵ Panagariya, Arvind. 2008. *India: The Emerging Giant*, New York. Oxford University Press.

¹⁶ *Garibi Hatao* adalah sebuah slogan yang dibawa oleh Perdana Menteri India Indira Gandhi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di India. Hal ini dilakukan dengan melancarkan program-program pendukung seperti *The Integrated Rural Development Programme (IRDP)*, *Marginal Farmers and Agricultural Labourers Programme (MFAL)*, *Small and Marginal Farmers Development Programme (SFDA)*, *Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA)* untuk wanita pedesaan di India, *Training of Youth for Self Employment (TRYSEM)* untuk pemuda pengangguran, *National Rural Employment Programme (NREP)* and *Rural Employment Guarantee Programme (RLEGP)*, and *Jawahar Rojgar Yojana (JRY)* untuk pekerja di daerah pedesaan.

¹⁷ J.S. Sodhi. 2008. "An Analysis of India's Development: Before and After Globalization". *India Journal of Industrial Relations* Vol.43 no.3. Jan, 2008. pp. 317-354

¹⁸ WorldBank Data Poverty Gap India diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GAPS?locations=IN>

¹⁹ J.S. Sodhi. 2008. "An Analysis of India's Development: Before and After Globalization". *India Journal of Industrial Relations* Vol.43 no.3. Jan, 2008. pp. 317-354

bertujuan untuk mengubah sistem perekonomian India agar lebih terbuka dan liberal. Hal ini terbukti dengan menghapus aturan dari beberapa produk yang sebelumnya diatur dalam *License Raj*.²⁰ Dalam sektor perdagangan, pemerintah memfokuskan pada kebijakan impor. Selain itu pemerintah juga memperkenalkan OGL (*Open General Licensing*) bagi barang konsumsi.²¹ Untuk melindungi barang-barang tersebut, pemerintah melakukan monopoli dengan kanalisasi (*canalizing*), yakni sistem monopoli pemerintah yang memungkinkannya menyatukan seluruh produksi suatu jenis barang pada perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang telah ditunjuknya. Pada masa ini model pembangunan masih dikontrol oleh pemerintah namun sudah mulai terbuka pada aktivitas perdagangan internasional.

Tabel 2. Tingkat Pembangunan di India pada awal Kemerdekaan India 1950 sampai 1990²²

	1950	1961	1971	1981	1991
GDP	-	3.72%	1.64%	6.00%	1.05%
Tingkat Kemiskinan	-	-	-	-	-
Tingkat Pengangguran	-	-	-	-	3.996%
Tingkat Tabungan	-	-	-	20.04%	25.1%

Model pembangunan ini yang biasa disebut dengan model pembangunan Nehru, memiliki sifat nasionalis yang diterapkan pada saat awal kemerdekaan sampai 1991. Model pembangunan ini membawa karakter ISI dan melakukan proteksi terhadap perdagangan luar negeri. Pada awalnya model pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat India dan

²⁰ Panagariya, Arvind. 2008. *India: The Emerging Giant*, New York. Oxford University Press.

²¹ Ibid.

²² Hasil olahan data yang penulis ambil dari Worldbank data : GDP growth; Poverty Total; Unemployment total dan Saving di India. Diakses melalui [data.worldbank.org/indicator/...](http://data.worldbank.org/indicator/)



membawa pengaruh positif bagi India. Pertumbuhan ekonomi India dikenal sebagai *Hindu Growth* karena pertumbuhan ekonomi rata-rata di India hanya sebesar 3.5% pertahun.²³ Model pembangunan Nehru bertahan sampai delapan kali pergantian Perdana Menteri. Dimana model pembangunan Nehru tetap diterapkan meskipun kondisi eksternal India mengalami perubahan model pembangunan khususnya pada variabel peran negara dalam aktivitas ekonomi.

Adapun program perencanaan lima tahunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah India sejak tahun 1952 guna percepatan industrialisasi di negaranya yang memiliki tujuan untuk melanjutkan atau memperbaiki program sebelumnya, antara lain,²⁴

- a) *Five Year Plan*²⁵ 1952 – 1956 → Rencana lima tahunan pertama di India memiliki fokus untuk membangun sektor-sektor utama atau penggerak perekonomian.
- b) *FYP* 1956 – 1961 → Pada *FYP* kedua ini berfokus pada pembangunan sektor publik dan percepatan industrialisasi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan optimalisasi investasi pada sektor-sektor produktif yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- c) *FYP* 1961 – 1966 → Pada periode ketiga ini, *FYP* berfokus pada peningkatan dan perbaikan pada sektor agrikultur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi khususnya Gandum. Selain itu pada periode

²³ J.S. Sodhi. 2008. “ *An Analysis of India’s Development: Before and After Globalization*”. *India Journal of Industrial Relations* Vol.43 no.3. Jan, 2008. pp. 317-354

²⁴ Ram Kumar Mishra. 2014. *Roles of State Owned-Enterprise in India’s Economic Development*. OECD Conference Center, Room 4. Diakses melalui https://www.oecd.org/daf/ca/Workshop_SOEsDevelopmentProcess_India.pdf

²⁵ Selanjutnya *Five Year Plan* akan penulis singkat menjadi *FYP*

ini juga dilakukan pembangunan bendungan, saluran irigasi dan pabrik pupuk agar tujuan dari *FYP* ketiga ini dapat berhasil.

Selain itu pada *FYP* ini juga melakukan peningkatan pendidikan di daerah pedesaan.

d) *FYP* 1969 – 1974 → Pada *FYP* keempat, Pemerintah India melakukan nasionalisasi terhadap 14 bank besar India. Selain itu untuk melanjutkan *FYP* sebelumnya Perdana Menteri India mengeluarkan program Revolusi Hijau untuk memajukan pertanian India.

e) *FYP* 1974 – 1979 → Pada periode ini fokus untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan menegakkan keadilan. Selain itu masih melanjutkan semangat *FYP* sebelumnya untuk melakukan kemandirian terhadap ketahanan dan hasil produksi pertanian. Perbaikan pada infrastruktur juga dilakukan. Selanjutnya Pemerintah India juga mengeluarkan program *Minimum Needs Programme (MNP)* yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat India.

f) *FYP* 1980 – 1985 → Pada *FYP* keenam mulai terlihat India telah terbuka untuk melakukan liberalisasi dan keterbukaan ekonomi terhadap pihak luar. Hal ini terlihat dari mulai mudarnya peran pemerintah dalam mengontrol harga sehingga terjadi peningkatan harga dan peningkatan biaya hidup di India. Selain itu *FYP* ini juga memfokuskan untuk meredam ledakan penduduk di India dengan mengeluarkan program keluarga berencana. Selain itu Pemerintah India juga mendirikan Bank

Pembangunan Pertanian dan Pedesaan untuk mengembangkan daerah desa.

- g) *FYP* 1985 – 1990 → *FYP* ini bertujuan untuk melakukan peningkatan hasil produksi dan teknologi. Selain itu juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat India. Pada periode ini ditandai dengan usaha untuk melakukan kemandirian ekonomi India.

4.1.2. Model Pembangunan India Pasca Krisis Ekonomi India tahun 1991

Model pembangunan Nehru ternyata tidak mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi di India yang terjadi akibat resesi global dan juga kondisi internal India yang tidak stabil pada tahun 1990. Puncak krisis ekonomi India terjadi pada tahun 1991, sehingga pada saat itu Perdana Menteri India yakni P.V Narasimha Rao bersama dengan Manmohan Singh memutuskan untuk merubah model pembangunan India. Perubahan model pembangunan ini dikarenakan India memerlukan bantuan dana dimana yang bersedia untuk meminjamkan dana bantuan hanyalah IMF- *World Bank*. Bantuan yang diberikan juga memiliki syarat dimana syarat tersebut nantinya akan merubah model pembangunan di India.

India tidak memiliki pilihan lain sehingga pemerintah menyetujui syarat yang diberikan oleh IMF dan juga *World Bank* dimana syarat yang diberikan merupakan Model Pembangunan *Washington Consensus*. Dimana pada tahap awal pemerintah India menerapkan *Structural Adjustment* yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan neraca fiskal di negara penerima bantuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan atau melakukan reformasi diberbagai sektor

terutama pada sektor ekonomi. Yang bertujuan untuk membuat negara penerima lebih *market-oriented* dimana dalam hal ini meminimalisir peran negara dan berkonsentrasi pada perdagangan dan produksi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat.²⁶

Pada Juli 1991 India mulai menerapkan program yang terdapat pada *Structural adjustment* yakni dengan melakukan devaluasi mata uang yang lebih dari 9%.²⁷ Hal ini dilakukan untuk mendorong ekspor, yang akan mendatangkan mata uang asing yang sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menghapus pembatasan impor dan membuat sejumlah reformasi struktural untuk lebih jauh lagi mendorong ekspor.

Selanjutnya pemerintah juga menghapus subsidi ekspor sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan defisit India yang tidak terkontrol. Reformasi terus dilakukan oleh pemerintah India guna mengembalikan dan membangun perekonomian negaranya. Untuk menarik investor pemerintah melakukan keterbukaan investasi asing diberbagai sektor seperti Bank milik pemerintah, bandara dan industri minyak bumi. Selain itu untuk meningkatkan kestabilan investasi, pemerintah juga memperbolehkan badan-badan investor lainnya untuk membeli saham di perusahaan-perusahaan India pada bursa saham Bombay.

²⁶ *A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Casa of the Dominican Republic. Culture & Agriculture* 1997, Greenberg, James B. hal 85-93.

²⁷ Robyn Meredith, *The Elephant and The Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us*, Viva Books, New Delhi, 2008

Tabel 3. Tingkat Pembangunan di India pada Masa Model Pembangunan Washington Consensus²⁸

	1995	2000	2005	2010	2014
GDP	7.574%	3.841%	9.285%	10.26	7.179%
Tingkat Kemiskinan	-	-	-	-	-
Tingkat Pengangguran	3.974%	4.31%	4.4%	3.55%	3.53%
Tingkat Tabungan	28.19%	27.9%	37.9%	38.2%	33.6%

Model Pembangunan yang India terapkan pasca krisis yang dialami membuahkan hasil yang positif bahkan diluar dugaan. Hal ini dikarenakan banyak negara yang porak poranda setelah menerapkan model pembangunan ini namun India mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Secara garis besar India telak melakukan rangkaian reformasi ekonomi seperti 1) Fiskal dan Administrasi 2) Sektor Finansial; 3) Perdagangan Internasional dan Investasi 4) Sektor Industri; 5) Infrastruktur; 6) Tenaga Kerja dan 7) Privatisasi.²⁹ Oleh karena reformasi yang terdapat pada model pembangunan ini juga India menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi kedua setelah China. Hal ini lah yang kemudian menjadikan peran India di level internasional juga semakin diperhitungkan. Meskipun perekonomian India membaik namun masih ada kendala dalam yang belum dapat teratasi yakni masalah pengangguran dan juga pemerataan pendapatan disana. Hal ini tidak dialami India saja melainkan dialami banyak negara berkembang. Sehingga memunculkan model pembangunan baru yang menawarkan kembali peran negara agarmampu mengatasi permasalahan

²⁸ Hasil olehan data yang penulis ambil dari Worldbank data : GDP growth; Poverty Total; Unemployment total dan Saving di India. Diakses melalui [data.worldbank.org/indicator/...](http://data.worldbank.org/indicator/)

²⁹ Sandep Ahuja, et al., *Indian Economic Reform: Task Force Report*, International Policy Practicum 2005, University of Chicago. Diakses melalui <http://harris.uchicago.edu/sites/default/files/IPP%20Economic%20Reform%20in%20India.pdf>

pengangguran dan juga pemerataan pendapatan, salah satunya yakni *Neo-Developmentalism*.

Program *FYP* di India sempat terhenti karena terjadi krisis ekonomi. Namun selang satu tahun setelah itu program *FYP* di India kembali meneruskan program dan tujuan yang sempat tertunda dan terhenti akibat krisis ekonomi. Adapun program perencanaan lima tahunan pasca krisis ekonomi India tahun 1991 ;³⁰

a) *FYP* 1992 – 1997 → Pada periode ini fokus untuk melakukan perbaikan ekonomi India pasca krisis. Hal ini dilakukan melalui membuka perekonomian India pada pihak asing. Tujuan utama pada periode ini adalah melakukan modernisasi perindustrian di India untuk membantu memperbaiki ekonomi India.

b) *FYP* 1997 – 2002 → Pada periode ini *FYP* kesembilan ini bertujuan untuk memaksimalkan ekonomi laten yang belum di manfaatkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi India. Selain itu Pemerintah Pusat juga memastikan untuk pembangunan di negara bagian berjalan dengan baik dan berhasil melakukan pembangunan.

c) *FYP* 2002 – 2007 → Pada periode ini *FYP* berfokus untuk mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.

d) *FYP* 2007 – 2012 → Pada periode ini Pemerintah India memiliki tujuan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara agar seluruh masyarakat India dapat

³⁰ Op.Cit. Ram Kumar Mishara.2014.

merasakan pertumbuhan ekonomi India. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki sektor jasa dan sosial, pemberdayaan manusia melalui pendidikan dan keterampilan dan kesetaraan gender. Pada periode ini rencana pemerintah memiliki perbedaan dengan rencana lima tahunan lainnya.

- e) *FYP* 2012 – 2017 → Pada periode ini *FYP* ke-12 masih melanjutkan misi dan rencana yang belum terlaksana pada *FYP* sebelumnya. Berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperbaiki infrastruktur serta melakukan keterbukaan pada investasi asing atau swasta dimana hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah India.

Pembangunan adalah salah satu fokus utama yang India lakukan sampai saat ini. Hal ini terbukti dari program *FYP* yang bertujuan untuk percepatan industrialisasi guna memandu pembangunan di India. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian India dan mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan pada *FYP* tersebut.

Awal pembangunan ekonomi di India ditandai dengan menerapkan model pembangunan yang diciptakan sendiri yakni model pembangunan Nehru. Dimana model pembangunan ini membawa pandangan sosialis yang tertutup dan pesimis akan aktivitas perdagangan bebas. Namun model pembangunan ini tidak memberikan dampak positif dan *FYP* gagal diterapkan di India.

Tahun 1991 terjadi krisis ekonomi yang pada akhirnya mengubah model pembangunan dan orientasi ekonomi India. Model pembangunan *Washington Consensus* mengubah orientasi ekonomi India menjadi lebih terbuka. Model pembangunan ini juga disertai dengan *FYP* India agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Model pembangunan *Washington Consensus* membawa perubahan besar pada perekonomian India. Semula India yang dikenal sebagai negara dengan *Hindu Growth* menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh India. Tingkat pengangguran dan juga kemiskinan adalah salah satu agenda pembangunan di India yang belum dicapai.

Tenggelam dan gagalnya model pembangunan *Washington Consensus* di tandai dengan munculnya model pembangunan baru. Model pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan model pembangunan *Washington Consensus*. Salah satu model pembangunan pasca *Washington Consensus* adalah *Neo-Developmentalism* yang membawa kembali peran negara.

Pada tahun 2004-2014, India tidak hanya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan juga menurunnya tingkat kemiskinan dan juga pengangguran disana. Selain itu tujuan *FYP* yang memfokuskan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi juga menjadikan tujuan pembangunan dapat terlaksana. Hal tersebutlah yang menandakan kemungkinan adanya perubahan aktivitas pembangunan yang pada akhirnya terlaksana.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN INDIA PADA MASA PEMERINTAHAN MANMOHAN SINGH TAHUN 2004- 2014

Pembangunan merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh negara untuk memperbaiki negaranya. Sehingga sebuah negara harus memiliki suatu strategi pembangunan agar tujuan negara dapat tercapai. Dimana suatu negara pasti menginginkan negaranya memiliki tak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil namun juga tingkat kemiskinan dan pengangguran juga bisa menurun.

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang strategi pembangunan yang dilakukan oleh India pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014. Dimana telah penulis jelaskan mengenai strategi pada masa tersebut memiliki tujuan tidak hanya mendapatkan pendapatan negara yang tinggi namun juga berkelanjutan dan juga lebih menyeluruh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tulisan dari Cornel Ban untuk menjelaskan aktivitas pendukung dari tiga variabel utama yang terdapat pada paradigma *Neo-Developmentalism* yang ditulis oleh Luiz Carlos.

Dalam tulisan yang ditulis oleh Cornel Ban, terdapat enam belas instrumen pendukung dari *Neo-Developmentalism* untuk mempermudah pengklasifikasian dalam menganalisis strategi pembangunan yang dilakukan oleh India pasca

Washington Consensus. Variabel pertama yakni Kebijakan Ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi makro sebuah negara dan memperbolehkan negara untuk ikut campur dalam ekonomi makro jika dalam keadaan krisis. Selanjutnya variabel kedua yakni berkaitan dengan orientasi ekonomi yang bertujuan untuk membuka dan melakukan liberalisasi namun aktivitas yang dipilih dapat menguntungkan dan membangun perusahaan domestiknya namun tidak merugikan pihak asing. Terakhir adalah variabel yang berkenaan dengan Peran Pemerintah di India, dimana variabel ini bertujuan untuk mengontrol liberalisasi yang terjadi dengan peran aktif negara yang memihak pada objek yang membangun.

5.1. Economy Policy menurut Neo-Developmentalism

Pasca krisis ekonomi yang dialami oleh India tahun 1991, kondisi perekonomian India semakin membaik bahkan India mendapatkan pengakuan sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.¹

Setelah mendapatkan kondisi ekonomi yang memadai, India tentu berusaha untuk mempertahankan bahkan memperbaiki apa yang telah atau belum didapatkan.

Oleh karena itu pemerintah akan melakukan strategi agar mendapatkan tujuan tersebut. Namun karena terbatasnya masa jabatan pemerintahan maka terkadang tujuan dari sebuah pemerintahan berbeda satu dengan yang lainnya.

¹ Ibrahim Novansyah. *Kebangkitan India : Dari Model Nehru ke Model Knowledge Based Society*. Universitas Gajah Mada. Diakses melalui https://www.academia.edu/9497019/Kebangkitan_India_Dari_Pembangunan_Model_Nehru_ke_Model_Knowledge_Based_Society

Sesuai dengan ruang lingkup yang penulis ambil, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai variabel *Economy Policy* yang terdapat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh 2004-2014. Pada masa pemerintahan Manmohan Singh membawa semangat dan tujuan nasionalis. Dimana tujuan pembangunan yang dibawa oleh Manmohan Singh adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga bersifat inklusif dimana seluruh elemen masyarakat dapat menikmati keberhasilan ekonomi yang telah diraih.²

Berkenaan dengan tujuan dan rencana yang digagas oleh Manmohan Singh maka hal tersebut memiliki keselarasan dengan variabel *Economy Policy* pada *Neo-Developmentalism*. Dimana pada variabel ini memiliki tujuan agar sebuah negara mendapatkan stabilitas ekonomi makro dengan intervensi negara selama krisis berlangsung jika terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan *Counter-Cyclical*.³ Tujuan untuk mendapatkan stabilitas ekonomi makro itu sendiri adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan tujuan tersebut maka negara akan memperkuat perekonomian domestik dengan cara mengeluarkan program atau regulasi pembangunan yang dalam pelaksanaannya menyertakan langkah-langkah untuk dapat mengendalikan inflasi, stabilitas nilai tukar dan suku bunga.⁴

² India Nasionalist Congress. Profil Dr. Manmohan Singh diakses melalui <http://inc.in/organization/21/profile>

³ *Counter-Cyclical* adalah sebuah strategi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis atau resesi negaranya.

⁴ Anonim. 2009. Stabilitas Ekonomi Makro. Bappenas. Diakses melalui http://www.bappenas.go.id/files/7613/5022/6074/bab-24__20090202204616__1756__25.pdf

Tak hanya itu, untuk mendapatkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan maka harus melakukan penguatan pada sektor keuangan. Hal ini dilakukan agar mendorong kegiatan ekonomi lebih cepat. Dalam hal ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan di sektor keuangan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan industri keuangan, peningkatan fungsi intermediasi dana masyarakat, serta pengembangan sistem jaring pengamanan di sektor keuangan. Dalam hal ini pemerintah akan dibantu oleh perbankan nasional untuk mendorong pembangunan diberbagai sektor. Selain itu perbankan akan mempermudah penyaluran kredit kepada seluruh jangkauan masyarakat.⁵

Untuk mendukung tujuan Pemerintah India dibawah Manmohan Singh, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis aktivitas yang berdasarkan *Neo-Developmentalism* yakni ;

5.1.1. Control Inflation Through Inflation Targeting

Aktivitas pendukung untuk mendapatkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan adalah melakukan kontrol atas inflasi yang dilakukan dengan menargetkan tingkat inflasi di suatu negara. Inflasi merupakan salah satu kondisi ekonomi dimana akan terjadi peningkatan harga secara terus menerus dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu butuh penanganan agar inflasi dapat dikendalikan, salah satu caranya adalah dengan melakukan target pada tingkat Inflasi.⁶

⁵ Ibid.

⁶ Susesno, dan Siti Astiyah. 2009. *Inflasi*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/22.%20Inflasi.pdf>

*Inflation Targeting*⁷ merupakan strategi kebijakan moneter sebuah negara bahkan bisa disebut sebagai kerangka kerja pemerintahan.⁸ Dalam melakukan penargetan inflasi meliputi elemen penting diantaranya;⁹ 1) Kestabilan harga merupakan tujuan utama yang eksplisit dari kebijakan moneter, 2) Terdapat pemberitahuan secara publik akan penargetan inflasi, 3) Kebijakan Moneter didasari oleh serangkaian informasi yang luas, termasuk perkiraan dalam penargetan inflasi, 4) Transparansi dan 5) Mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Keuntungan sebuah negara dalam penerapan ini adalah kerangka kerja yang dibuat bank sentral, dimana dalam hal ini berbentuk aturan pada sektor swasta agar dapat memperkirakan inflasi yang akan datang. Dengan aturan tersebut maka Bank Sentral dapat bertahan dari adanya guncangan inflasi dan dapat menurunkan kembali sesuai target yang telah ditentukan.¹⁰

IT merupakan sebuah strategi yang telah dipopulerkan oleh *New Zealand* dan sudah diterapkan di berbagai negara baik di negara maju, berkembang ataupun negara yang sedang bertransisi seperti Ceko, Polandia dan juga Hungaria.¹¹ Untuk penerapan *IT* di India masih menjadi perdebatan karena masih dianggap sebagai sebuah tantangan di negara-negara *emerging economy* seperti

⁷ Selanjutnya *Inflation Targeting* akan penulis singkat menjadi *IT*.

⁸ Hammond, Gill. 2012. State of Art of Inflation Targeting. Centre for Central Banking Studies; Bank of England, London. Diakses melalui <http://www.bankofengland.co.uk/education/Documents/ccbs/handbooks/pdf/ccbshb29.pdf>

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mishkin, Frederic S. 2004. Inflation Targeting. Colombia University and National Bureau of Economic Research. Diakses melalui <https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2013/01ENCYC.pdf>

India. Hal ini berkaca pada negara-negara berkembang di Afrika Selatan yang mengalami berbagai kendala dan tantangan dalam menerapkan aturan tersebut.¹²

Di India usulan dalam melakukan penerapan *IT* itu sendiri sudah menjadi perdebatan sejak tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2009 telah direkomendasikan, agar kerangka kerja aturan dalam *IT* di implementasikan di India. Sampai saat ini *IT* belum diterapkan karena tingkat Inflasi di India cenderung rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Selanjutnya adanya perhatian dan kesadaran atas kualitas dan standar hidup di India, menjadikan pembuat kebijakan masih mempertimbangkan tingkatan harga untuk barang dan jasa disana.¹³

Tabel 1. Tingkat Inflasi di Negara Berkembang Berdasarkan Indeks Harga Konsumen¹⁴

Negara	2004	2009	2014
Brazil	6.599	4.886	6.332
India	3.767	10.877	6.65
Indonesia	6.244	4.814	6.395
Russia	10.861	11.661	7.826
South Africa	1.385	7.13	6.067

Selain hal tersebut, keengganan India untuk menerapkan *IT* adalah kesadaran pemerintah atas masih perlu mempertimbangkan indeks harga kostumer, model ekonometrik negaranya dan demografi, tingkat pengangguran serta jaminan sosial di India. Dimana hal tersebut masih ditemui permasalahannya di India.

¹² Singh, Charan. 2014. *Inflation Targeting in India : Select Issues*. Indian Institute of Management Bangalore, India: Working Paper No.475. Diakses melalui iimb.ac.in/research/sites/default/files/WP%20No.%20475.pdf

¹³ Ibid.

¹⁴ WorldBank Data. Tingkat Inflasi di berbagai negara berkembang menggunakan Indeks Harga Konsumen di Brazil, India, Indonesia, Russia dan South Africa. Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG>

Permasalahan indeks harga konsumen, diawali oleh adanya tekanan dari sisi penawaran dimana akan berdampak pada tingkat inflasi, terutama terjadi pada barang seperti makanan dan juga bahan bakar. Seperti contoh ketika terjadi permasalahan mengenai pasokan bawang di India, ketika harga bawang naik maka yang akan diuntungkan adalah petani dan perbankan. Konsumen akan dirugikan karena harga barang tersebut seharusnya tidak naik ketika memiliki pasokan yang cukup.¹⁵ Kondisi seperti ini masih terjadi di India dan hal ini disebabkan oleh masih bergantung sektor pertanian di India pada iklim. Sehingga dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam mengatur dan mengantisipasi lonjakan harga barang-barang tersebut.

Selanjutnya adalah permasalahan komposisi demografi yang terdapat di India. Komposisi penduduk di India 30.9% kelompok usia belum produktif 64% kelompok usia produktif dan 5.1% kelompok tidak produktif.¹⁶ Dimana aspek komposisi demografi masih sering diabaikan di India. Menurut Shirakawa,¹⁷ profesi tidak akan menentukan perbedaan antara kualitas pada suatu populasi, yang menentukan hal ini adalah perilaku individu pada sebuah populasi. Perilaku individu dari kelompok produktif dan tidak produktif akan berpengaruh pada transaksi berjalan. Hal inilah yang terjadi di India, dimana kelompok produktif India memiliki prosentase yang tinggi sehingga memiliki daya produksi dan pola

¹⁵ Singh, Charan. 2014. *Inflation Targeting in India : Select Issues*. Indian Institute of Management Bangalore, India: *Working Paper* No.475. Diakses melalui iimb.ac.in/research/sites/default/files/WP%20No.%20475.pdf

¹⁶ Worldbank Data. Populasi di India 0-14, 15-64 dan 65-Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?locations=IN>

¹⁷ Ibid.

konsumsi yang berbeda dengan kelompok tidak produktif.¹⁸ Hal ini terlihat dari gap antara tingkat tabungan dan tingkat investasi serta hipotesis *spending wave* terbukti memiliki pengaruh pada tingkat inflasi di suatu negara.¹⁹

Yang terakhir adalah masalah pengangguran yang terjadi karena terlalu rendah sebuah negara dalam melakukan penargetan inflasi. Dalam ekonomi tradisional terdapat *trade-off*²⁰ antara inflasi dan pengangguran, hal inipun terjadi di India. Belum menerapkan *IT*, tingkat pengangguran pada usia produktif di India masih tinggi, hampir mencapai 20%.²¹ Ketiga permasalahan tersebut masih ditemui di India dan menjadikan India enggan untuk mulai menerapkan *IT* pada masa pemerintahan Manmohan Singh 2004-2014 meskipun memiliki tujuan yang dapat mendukung program pembangunan di India.

5.1.2. *Market-Determined but Preferably Moderate Interest Rates*

Aktivitas selanjutnya adalah melakukan stabilitas terhadap tingkat suku bunga. Dalam *Neo-Developmentalism* aktivitas stabilisasi tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar namun tidak terlepas kemungkinan ada aspek lain yang dapat mengatur tingkat suku bunga.

Interest Rate adalah suatu tingkat tanggungan pada pinjaman yang biasanya dinyatakan dalam persen per jangka waktu yang telah disepakati bisa perbulan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Op.Cit* . Charan.

²⁰ *Trade-off* adalah sebuah keputusan yang diambil dari dua atau tiga pilihan dimana keputusan yang diambil akan mengorbankan salah satu pilihan. Jika dihubungkan dengan inflasi dan pengangguran maka biasanya sebuah negara akan menghadapi situasi dimana tingkat inflasi menurun namun tingkat pengangguran meningkat ataupun sebaliknya. Sehingga agak sulit untuk mendapatkan keduanya secara sekaligus.

²¹ *Op.Cit* Charan.

atau pertahun.²² Tanggungan ini dibayarkan kepada pihak yang meminjan aset kepada pemilik aset; dalam hal ini adalah bank. Selain itu *Interest Rate* juga disebut sebagai penghasilan yang diperoleh individu yang memiliki aset berlebih untuk digunakan sementara waktu oleh individu lain yang membutuhkan atau menggunakan aset tersebut untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu *Interest Rate* merupakan biaya atau harga yang dibayarkan untuk dana yang telah dipinjamkan.²³

Banyak sekali teori yang menjelaskan mengenai *Interest Rate*, antara lain; teori klasik dan juga Keynesian yang memiliki sedikit perbedaan. Menurut teori klasik suku bunga akan berhubungan erat dengan tabungan dan simpanan masyarakat. Hal ini terjadi karena semakin tinggi nilai suku bunga yang ada maka semakin tinggi pula antusias masyarakat untuk menyimpan aset yang mereka miliki. Namun hal ini berbeda pada investasi, semakin tinggi nilai suku bunga yang ditawarkan terhadap investasi maka semakin rendah keinginan masyarakat untuk melakukan investasi terhadap suatu bidang.²⁴ Selanjutnya adalah *Interest Rate* menurut Keynes dimana tingkat suku bunga akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap suatu aset itu sendiri. Oleh karenanya tingkat suku bunga akan ditentukan sendiri oleh pasar yang terjadi karena adanya permintaan dan penawaran.²⁵

²²Hertati, S. 2014. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/4985/3/BAB%20II.pdf>

²³ Ibid.

²⁴ Boediono. 2001. *Ekonomi Moneter* edisi ke-3, Yogyakarta: BPFE, Hal. 76. Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/1756/5/Bab%202.pdf>

²⁵ T. Appel, Katarzyna. 2016. *Keynes' Theory of The Interest Rate : A Critical Approach*. Club of Economics in Miskolc TMP Vol. 12. Diakses melalui <http://real.mtak.hu/37796/1/01.pdf>

Interest Rate merupakan salah satu hal yang harus di reformasi pada model pembangunan *Washington Consensus*. Pada model pembangunan ini tingkat suku bunga akan di tentukan oleh pasar *Market-Determined Interest Rate*. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidaktepatan sumberdaya atau aset yang disebabkan oleh birokrasi yang tidak sesuai.²⁶ Selain itu tingkat suku bunga juga harus memiliki nilai positif, sehingga dapat menghambat arus modal dan meningkatkan tingkat tabungan.²⁷

Berbeda dengan *Washington Consensus*, *Neo-Developmentalism* melihat tingkat suku bunga tidak secara melulu harus ditentukan oleh pasar atau *Market-Determined Interest Rate*. Dalam model pembangunan ini tingkat suku bunga dapat ditentukan oleh berbagai aspek meskipun pasar juga turut serta menentukan tingkat suku bunga.

Permasalahan tingkat suku bunga selalu berhubungan dengan perbankan. Perbankan memiliki model yang secara langsung diatur oleh pemerintah melalui Bank Sentral yang biasa disebut dengan model perbankan terpusat. Sehingga pada model ini sistem dan cara kerja perbankan diatur langsung oleh Bank Sentral dan tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Sedangkan model perbankan *capitalised* menggunakan pasar sebagai faktor penentu dari sebuah sistem dan

²⁶ Williamson, John. 1990. *What Washington Means By Policy Reform*. Peterson Institute for International Economics. Diakses Melalui <https://www.wcl.american.edu/hracademy/documents/Williamson1990WhatWashingtonMeansbyPolicyReform.pdf>

²⁷ Ibid.

juga cara kerjanya. Sehingga dalam hal ini negara tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan perbankan.²⁸

Model perbankan yang diterapkan oleh India adalah model perbankan kapitalis yang diatur dengan baik oleh bank sentral India yakni *Reserve Bank of India*.²⁹ Sehingga dapat diartikan bahwasanya model perbankan di India tidak hanya di kontrol oleh bank sentral melainkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem atau cara kerja dari perbankan di India.

Dalam hal tingkat suku bunga, India pernah membebaskan pasar untuk menetapkan tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Hal ini terjadi pada awal tahun 2000'an, namun hal tersebut tidak memberikan dampak positif bagi India. Hal tersebut mengakibatkan perlambatan laju perindustrian serta berdampak pada defisit fiskal yang terjadi di India.³⁰ Oleh karena itu pemerintah melakukan cara agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk, sehingga pemerintah melakukan pendisiplinan fiskal yang diatur oleh Undang-Undang Tanggung Jawab Pengelolaan Fiskal dan Anggaran yang bertujuan untuk dapat mencapai target pada tahun 2008-2009.³¹

Selain itu ada beberapa cara untuk menentukan tingkat suku bunga di India pada masa pemerintahan Manmohan Singh antara lain ; Karena telah terjadi

²⁸ Investopedia. 2014. *Who Determines Interest Rates*. Diakses melalui <http://www.investopedia.com/ask/answers/03/112003.asp>

²⁹ India Brand Equity Foundation. *Banking Sector in India*. Diakses melalui <https://www.ibef.org/industry/banking-India.aspx>

³⁰ B B Bhattacharya, dkk. 2008. *Modeling Interest Rate Cycles in India*. Development Planning Centre, Institute of Economic Growth : Delhi India. Diakses melalui <http://www.iegIndia.org/upload/publication/Workpap/wp268.pdf>

³¹ Ibid.

peningkatan harga minyak dunia yang akan berdampak pada inflasi maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas disegala sektor di India.³²

Hal ini dilakukan dengan cara pemerintah melalui bank sentral menanamkan sekitar Rs. 1.3 miliar kedalam fiskal agar liquiditas di India tidak semakin memburuk.³³

Faktor penentu tingkat suku bunga lainnya adalah berkaitan dengan kebijakan mengenai tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui *Reserve Bank of India*. Dimana dalam hal ini RBI mengupayakan agar tantangan untuk sistem perbankan yang akan datang lebih mudah sehingga memutuskan agar tingkat suku bunga diatur sedemikian rupa agar perekonomian tumbuh dengan baik.³⁴ Hal ini memperjelas sikap RBI yang anti-inflasi. Selain itu RBI juga merevisi proyeksi tingkat inflasi menjadi 8% pada maret 2011.³⁵

Faktor penentu tingkat suku bunga terakhir adalah adanya transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui RBI. Hal ini bertujuan untuk memandu ekspektasi pasar dengan beberapah langkah, antara lain; Menginformasikan program-program bantuan pinjaman dari pemerintah, Mengimplementasikan *roadmap* yang terdapat rekomendasi pada Mohanty Working Group, Bank di instruksikan agar memiliki metodologi untuk menentukan tingkat dasar pada suku

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Chakrabarty, Dr K C. 2011. *Speech - Banking and Beyond : New Challenges Before Indian Financial System*. Diakses melalui https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=553

³⁵ Kanagasabapathy, K. 2011. *What determines interest rate*. Diakses melalui <http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/k-kanagasabapathy/what-determines-interest-rates/article1588336.ece>

bunga, dan RBI harus melakukan praktik yang terbiasa untuk menginformasikan tingkat suku bunga pada pinjaman setiap tiga bulan sekali.³⁶

5.1.3. *Market-Determined Exchange Rates but with Selective Use of Capital Control*

Aktivitas ketiga adalah nilai tukar yang ditentukan pasar namun dengan kapital kontrol. Dalam *Neo-Developmentalism* hal ini diyakini dapat membantu untuk mencapai tujuan stabilitas makro sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai.

Nilai tukar adalah sebuah harga satu unit mata uang asing terhadap mata uang domestik.³⁷ Nilai tukar merupakan salah satu instrumen utama dalam sektor keuangan yang berpengaruh pada pengambil keputusan untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti investasi mata uang asing, eksportir, importir, pembisnis, institusi keuangan dan juga pembuat kebijakan baik di negara maju ataupun negara berkembang.³⁸ Fluktuasi nilai tukar juga mempengaruhi nilai portofolio investasi internasional, daya saing ekspor-impor, nilai mata uang untuk pembayaran hutang dan lainnya. Sehingga pergerakan nilai tukar memiliki implikasi penting bagi

³⁶ Ibid.

³⁷ Iskandar Simorangkir dan Suseno. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia No.12. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/12.%20Sistem%20dan%20Nilai%20kebijakan%20Nilai%20Tukar.pdf>

³⁸ Dua, Pami dan Rajiv Ranjan. 201. *Exchange Rate Policy and Modelling in India*. Mumbai : Departemen of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India. Diakses melalui <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/DRS33250210.pdf>

siklus bisnis, perdagangan dan arus modal ekonomi agar pembuat keputusan mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan aktivitas ekonomi.³⁹

Terdapat dua sistem yang mengatur nilai tukar di dunia ini, yakni *fixed exchange rate system* dan juga *floating exchange rate system*. Sistem nilai tukar tetap merupakan sistem nilai tukar yang dikendalikan atau ditetapkan pada suatu tingkatan oleh pemerintah terhadap suatu mata uang asing sedangkan *floating exchange rate system* mengacu pada penawaran dan permintaan pasar pada mata uang asing.⁴⁰ Namun terdapat pula sistem yang menggabungkan keduanya yakni *managed floating system* dimana negara dapat mengintervensi di beberapa kondisi dimana hal ini bertujuan untuk mendorong ekspor.⁴¹

Pada aktivitas ini untuk mencapai tujuan stabilitas makro maka nilai mata uang ditentukan oleh pasar dan juga dalam melakukan aktivitas liberalisasi maka pemerintah melakukan *capital control*. Hal ini dilakukan dengan cara membatasi arus modal asing yang masuk ataupun keluar dari perekonomian domestik. Hal ini bertujuan untuk menghalangi spekulasi atas nilai tukar yang dapat menghambat aktifitas ekspor.⁴²

Berdasarkan bank sentral *Reserve Bank of India*, nilai tukar mata uang rupee ditentukan oleh pasar, dimana terdapat pasar uang dan tidak ada campur tangan

³⁹ Ibid

⁴⁰ Suwita, Sudi Bawa. 2010. Peranan Faktor Fundamental dalam Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Januari 2000 – Desember 2009. Magister Perencanaan Publik dan kebijakan Publik Universitas Indonesia. Diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131352-T%2027626-Peranan%20faktor-Tinjauan%20literatur.pdf>.

⁴¹ Ibid.

⁴² Investopedia. Capital Control. Diakses melalui http://www.investopedia.com/terms/c/capital_control.asp

pemerintah dalam menentukan nilai mata uang tersebut.⁴³ Namun pada tahun 2009 banyak literatur menyarankan agar nilai mata uang India dipatokan dengan nilai mata uang asing khususnya Dollar Amerika, dimana terlihat pembuat kebijakan memiliki kemauan untuk mempengaruhi kurs bilateral terhadap Dollar Amerika. Saran ini muncul ketika nilai volatilitas⁴⁴ rupee terhadap dolar amerika rendah.⁴⁵ Sebagai contoh sejak tahun 1993-2006, volatilitas tahunan Ruppe terhadap Dollar Amerika adalah sebesar 4,2%⁴⁶ dan sebagai perbandingan, volatilitas tahunan tingkat dollar amerika terhadap yen adalah sebesar 11,3%.⁴⁷

Pada tahun 2013, nilai mata uang India Rupee telah terdepresiasi oleh mata uang Dollar Amerika.⁴⁸ Untuk melindungi nilai mata uang India, maka bank sentral India RBI akan melakukan kembali konvertibilitas mata uang dan kapital kontrol pada seluruh penduduk India. Tujuannya adalah untuk membendung arus keluar *Outflows* Dollar Amerika dari Inida pada saat ketersediaan *greenback*⁴⁹ tidak mencukupi. Keputusan yang diambil oleh pemerintahan India melalui RBI

⁴³ Ghosh,Ramya. 2011. *Capital Control and Exchange Rate Regime in India*. United State : UMI-Dissertation Publishing. Diakses melalui <https://research.cgu.edu/economic-policy-studies/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/Ghosh-2011.pdf>

⁴⁴ Volatilisasi adalah ukuran dalam prosentase yang menyatakan seberapa besar kemungkinan harga nilai mata uang dapat naik ataupun turun dalam satu periode tertentu.

⁴⁵ Ghosh,Ramya. 2011. *Capital Control and Exchange Rate Regime in India*. United State : UMI-Dissertation Publishing. Diakses melalui <https://research.cgu.edu/economic-policy-studies/wp-content/uploads/sites/25/2016/11/Ghosh-2011.pdf>

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Anup Roy ,dkk. 2013. *RBI Ushers in Capital Controls to protect rupee*. Live Mint diakses melalui <http://www.livemint.com/Money/vs1bcMIMj8A1hqiniASC50/RBI-announces-measures-to-limit-forex-outflows.html>

⁴⁹ *Greenback* adalah sebutan lain dari mata uang amerika (USD) dalam perdagangan *foreign exchange*

ini mengartikan bahwasanya India telah menghapus reformasi yang telah dilakukan atas kapital kontrol di India.⁵⁰

Pada saat tersebut nilai Rupee terhadap Dollar Amerika sebesar 61.44,⁵¹ dimana nilai tersebut dikatakan sebagai nilai terendah sepanjang sejarah nilai mata uang India terhadap Dollar Amerika.⁵² Untuk menindak lanjuti hal tersebut Menteri Keuangan India akan menarik Dollar di India dan RBI tidak memperbolehkan pengiriman dollar dalam jumlah yang lebih dari USD 75.000 yang pada awalnya sebesar USD 200.000 pertahun.⁵³

Selain itu dalam rilis yang di keluarkan oleh RBI, mengatakan bahwa semua perusahaan di India, kecuali perusahaan miik negara (*Navratna Companies*) tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi lebih dari 100% dari kekayaan bersih yang telah didapatkan di Luar Negeri tanpa adanya persetujuan dari RBI. Batas limitasi tersebut juga berlaku pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan India yang berdasarkan pada entitas yang tidak berada di luar negeri khususnya pada sektor energi dan sumber daya alam kecuali *Navratna Companies* dan *ONGC Videsh Ltd.*⁵⁴ Hal ini dikarenakan kedua perusahaan tersebut telah memiliki otonomi dan kebebasan sendiri dalam mendirikan anak perusahaan di luar negeri.⁵⁵

⁵⁰ *Op.Cit.* Anup Roy

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Anup Roy ,dkk. 2013. *RBI Ushers in Capital Controls to protect rupee*. Live Mint diakses melalui <http://www.livemint.com/Money/vs1bcMIMj8A1hqiniASC50/RBI-announces-measures-to-limit-forex-outflows.html>

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Menurut A. Subbbarao, aturan yang dikeluarkan oleh RBI akan mempersulit investor karena akan membuang waktu dan belum tentu dipersetujui meskipun tidak pada semua faktor. Hal ini akan berdampak terjadinya kemunduran dan keengganan perusahaan domestik yang ingin melakukan investasi di luar negeri.

Namun menurut Mehtan, hal ini dilakukan oleh pemerintahan India karena hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin agar dapat memperbaiki dan mencegah inflasi meskipun stabilitas mata uang India hanya akan bertahan pada beberapa waktu tertentu. Selain itu, menurut Mehtan juga hal ini memiliki indikasi bahwasanya pemerintah India menginginkan untuk perusahaan India melakukan investasi di domestiknya sendiri agar mendorong dan meningkatkan ekspor.⁵⁶

5.1.4. Independent Central Bank Tasked to Control Inflation

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang paling ditakuti oleh banyak negara. Inflasi mengacu pada kenaikan harga barang secara terus menerus dalam beberapa waktu.⁵⁷ Selain itu faktor pendorong terjadinya inflasi juga dikarenakan oleh tekanan yang terjadi pada sisi permintaan dan penawaran.

Seperti contoh pada tahun 2008 terjadi inflasi pada makanan dan juga bahan bakar dimana ketersediaan barang produksi tidak mencukupi permintaan yang ada.⁵⁸ Hal ini lalu tertransmisikan dari satu negara ke negara lain melalui perdagangan.⁵⁹

Dampak yang terjadi akibat inflasi tidak hanya sebatas kenaikan harga, namun juga berdampak pada lemahnya nilai dan daya beli mata uang suatu

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Basu, Kaushik. 2011. *Understanding Inflation and Controlling It*. Ministry of Finance, Government of India. Diakses melalui

⁵⁸ Oner, Ceyda. 2010. *Back to Basic : What is Inflation*. IMF. Diakses melalui <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/pdf/basics.pdf>

⁵⁹ Ibid.

negara. Jika sebuah negara mengalami penurunan daya beli mata uang maka akan berdampak pada individu, sektor usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, jika sebuah negara mengalami tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif terhadap perekonomian secara menyeluruh.⁶⁰ Oleh karena itu bank sentral lah yang harus bertanggung jawab dalam mengendalikan dan meredakan inflasi yang terjadi.

Isu inflasi di India merupakan salah satu masalah yang menarik, karena gap antara masyarakat mampu dan masyarakat tidak mampu yang cukup tinggi dan juga masih banyak penduduk India yang hidup di pedesaan. Gap tingkat kemiskinan di India tahun 2009 adalah 6.2%.⁶¹ Sehingga jika terjadi inflasi maka akan berdampak parah pada masyarakat tidak mampu terutama yang hidup di desa.⁶²

Pada dasarnya inflasi yang terjadi di India disebabkan oleh meningkatnya harga pangan dunia pada akhir tahun 2006. Meningkatnya harga pangan dunia memberikan efek domino pada sektor lain seperti meningkatnya harga minyak mentah, harga pupuk, spekulasi harga pada masa yang akan datang serta memperburuk perdagangan pada produk agrikultur. Sebagai akibatnya pada tahun 2008-2010 India terkena dampak dari hal tersebut.⁶³

⁶⁰ *Op.Cit* Susesno, dan Siti Astiyah

⁶¹ World Bank Data : Poverty Gapat National Poverty Line in India . Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAGP?locations=IN>

⁶² Tishampati Sen. *RBI Control of Inflation : Time to Look Beyond Monetary Measures?* . Diakses melalui <http://www.legalserviceindia.com/article/1177-RBIs-Control-of-Inflation.html>

⁶³ Lenna, M. Eapen dan Sthanu R. Nair. 2012. *Food Price Inflation in India (2008-2010) : A Commodity-wise Analysis of The Causal Factor*. Economic & Political Weekly : Vol. XLVII No.20. Diakses melalui

Harga pangan di India mulai mengalami peningkatan di beberapa komoditas unggulan. Tingkat inflasi pada komoditi *foodgrains* meningkat menjadi 12,34%, komoditi beras menjadi 12,75%, komoditi kaya protein seperti telur, ikan dan daging meningkat menjadi 17,66% serta komoditi gula sebesar 28,67%.⁶⁴

Kenaikan harga pangan di India mengakibatkan pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunnya permintaan konsumsi dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan daya produksi hasil pertanian.⁶⁵

Selain itu inflasi di India juga disebabkan oleh terjadinya krisis saham yang terjadi pada bursa saham di India. Hal ini terjadi karena dampak yang muncul karena negara-negara seperti Amerika, Eropa dan juga Jepang mengalami resesi ekonomi. Selain sektor agrikultur, pertumbuhan sektor manufaktur dan sektor jasa pun mengalami kemunduran akibat resesi global.⁶⁶

Berdasarkan *Annual Statement on Monetary Policy for the Year 2007-2008*, RBI menyarankan untuk berhati-hati pada kenaikan harga pangan dunia yang telah terjadi pada tahun 2006-2007.⁶⁷ Oleh karena itu maka dikeluarkan beberapa langkah untuk mencegah hal terburuk yang dapat terjadi pada India. Untuk mencegah tingginya tingkat inflasi, maka RBI memiliki beberapa langkah untuk menangani hal tersebut. Langkah tersebut antara lain ;

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Pettinger, Tejvan. 2008. *Indian Economy 2009*. Diakses melalui <http://www.economicshelp.org/blog/677/economics/Indian-economy-2009/>

⁶⁷ Reserve Bank of India. Melalui Notifikasi yang dikeluarkan oleh Dr. Y Venugopal Reddy. Diakses melalui <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/76972.pdf>

Menaikkan *Repo Rate*⁶⁸ dimana memiliki maksud untuk membeli surat-surat berharga milik pemerintah dengan kesepakatan kepemilikan kembali (*repossession*) dari bank umum. Hal ini merupakan pinjaman jangka pendek dari bank sentral untuk menyuntikkan dana guna meredam gap antara permintaan uang dengan deposito di bank.⁶⁹ Selanjutnya RBI juga meningkatkan tingkat *Cash Reserve Ratio* dimana dimaksudkan agar tingkat ketersediaan uang pada bank umum ditingkatkan.⁷⁰ RBI juga mengurangi tingkat suku bunga pada kas yang disetorkan bank kepada RBI.⁷¹ Hal ini dilakukan guna memacu bank umum untuk menaikkan suku bunga kredit (pinjaman) dan mengurangi pinjaman dan kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain RBI melakukan pengetatan terhadap bank umum untuk menyetujui kredit yang akan dikeluarkan.⁷²

Terakhir RBI melakukan penarikan dan pembelian uang asing (Dollar Amerika) dari bank umum dan juga para eksportir. Hal ini dimaksudkan agar mencegah mata uang asing tersebut membanjiri pasar domestik India dimana akan memperburuk nilai mata uang Rupee itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh RBI adalah untuk menjaga nilai Rupee agar tetap stabil yang akan membantu aktivitas ekspor agar lebih kompetitif.⁷³

⁶⁸ *Op.Cit* Tishampati.

⁶⁹ Anonim. *The Role Of Reserve Bank of India in Controlling Inflation : Traditional or Beyond Monetary Measures?*

⁷⁰ *Op.Cit* Tishampati.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*

Oleh karena adanya langkah preventif yang telah diberikan oleh RBI, maka tingkat inflasi di India segera dapat di tangani. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi India dapat membaik kembali.

Tabel 2. Pengaruh Bank Sentral dalam mengontrol Inflasi di India pada tahun 2008-2010⁷⁴

Tahun	Foreign Direct Investment		GDP	Tingkat Inflasi
	Inflow	Outflow		
2007	25.2%	17.02%	8.60%	6.37%
2008	43.4%	19.25%	3.89%	8.35%
2009	35.5%	16.09%	8.48%	10.87%
2010	27.3%	15.96%	10.26%	11.99%
2011	36.4%	12.6%	6.63%	8.85%

Hasil yang diterima oleh India atas kontrol yang dilakukan oleh RBI pada saat terjadi inflasi pada tahun 2008-2010 cukup baik dan dapat dikatakan berhasil.

Hal ini bisa dilihat dari menurunnya tingkat inflasi di India pada tahun 2011.

Selain itu tujuan dari mengendalikan uang asing khususnya Dollar Amerika pada pasar domestiknya juga berhasil. Hal ini dapat dilihat dari laju investasi keluar yang menurun karena terbatasnya mata uang asing di India itu sendiri.

5.1.5. Primary Surplus : Current Account Balance, The Accumulation of Domestic Public Savings to Finance Investment and Strong Counter-cyclical Fiscal Policy Through The State Banks and Sovereign Wealth Funds

Aktivitas selanjutnya untuk mendukung tujuan dari *Neo-Developmentalism* pada stabilitas ekonomi adalah mengenai surplus yang diharapkan. Dimana dalam *Neo-Developmentalism* menganggap dengan mendapatkan surplus yang bersumber dari seimbangannya transaksi berjalan,

⁷⁴ Hasil olahan data yang penulis ambil dari Worldbank data : FDI Inflow; FDI Outflow; GDP dan Inflation CPI di India. Diakses melalui data.worldbank.org/indicator/...



akumulasi dari tabungan domestik yang akan membantu dan membiayai investasi serta melakukan kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical* pada perbankan dan juga *Sovereign Wealth Funds*. Terdapat perbedaan yang cukup jelas dengan model pembangunan *Washington Consensus*, dimana pembiayaan investasi masih bergantung pada tabungan asing serta tidak melakukan *counter-cyclical*.

Dalam aktivitas ini terdapat tiga aktivitas lainnya yang mendukung untuk mendapatkan surplus. Tiga aktivitas tersebut telah penulis sebutkan pada paragraf sebelumnya. Namun karena keterbatasan data penulis tidak mendapatkan data pendukung yang cukup untuk menganalisis satu persatu aktivitas pendukung dari surplus yang diharapkan.

Pada aktivitas keseimbangan transaksi berjalan, penulis tidak mendapatkan menemukan pembahasan yang menyatakan bahwa India pernah mengalami atau tidak pernah mengalami surplus pada aktivitas ini. Namun dalam hal ini penulis mendapatkan data mentah berupa tingkat keseimbangan transaksi berjalan di India, berikut data yang penulis dapatkan;

Tabel 3. Current Account Balance di India⁷⁵

Tahun	Current Account Balance *
2004	0.780
2005	-10.28
2006	-9.26
2007	-8.07
2008	-30.97
2009	-26.18
2010	-54.5

⁷⁵ Worldbank data : Current Account Balance (BOP, Current US\$). Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?locations=IN>

2011	-62.5
2013	-49.12
2014	-27.31

*Milyar USD

Dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, dalam mendapatkan surplus India tidak bersumber dari keseimbangan transaksi berjalan.

Hal ini terlihat dari data diatas yang memperlihatkan defisit yang lebih sering India alami dibandingkan surplus yang diterima. Sehingga pada aktivitas ini tidak berpengaruh pada surplus di India.

Selanjutnya adalah akumulasi tabungan domestik yang digunakan untuk membiayai investasi. Dalam aktivitas ini penulis hanya mendapatkan data berupa jurnal yang menyatakan bahwasanya terdapat hubungan antara tabungan dan investasi di Inida.⁷⁶ Namun pada jurnal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik investasi pada sektor apa dan dampak dari adanya hubungan diantara keduanya.

Aktivitas terakhir pada surplus yang diharapkan adalah melakukan kebijakan fiskal berupa *counter-cyclical* pada perbankan dan *Sovereign Wealth Funds*. Kebijakan fiskal *counter-cyclical* merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dari ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi ataupun resesi.

Jika *counter-cyclical* dikeluarkan ketika terjadi resesi, maka pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pajak dan menganggarkan penyesuaian

⁷⁶ Dr. Girish Jain dan Meenu Baliyan.2014. Determinants of Saving and Investment in India. SSARSC International Journal of Geo Science and Geo Informatics ISSN 2349-6975 Volume 1 Issue 1, July 2014. Diakses melalui http://www.ssarsc.org/documents/meenu_balun_6.pdf

pengeluaran. Dengan mengurangi tarif pajak dan meningkatkan pengeluaran maka akan menciptakan permintaan dan meningkatkan daya produksi pada perekonomian. Jika *counter-cyclical* dikeluarkan pada saat krisis maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyeimbangkan laju kegiatan ekonomi yang sedang meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara memningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran publik.

Untuk kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical* telah diterapkan di India saat krisis yang terjadi pada tahun 2008-2010.⁷⁷ Hal ini di tandai dengan dikurang anggaran pembelanjaan dan meningkatkan tingkat pajak di India. Dalam meningkatkan tarif pajak, India mulai menerapkan tarif pajak progresif. Dimana dalam meningkatkan tarif pajak terindikasi bahwasanya India telah menerapkan *counter-cyclical policy*.

Selanjutnya indikasi India telah menerapkan *counter-cyclical policy* adalah dengan mengurangi anggaran pembelanjaan pemerintah. Dalam data yang penulis dapatkan, terlihat adanya upaya India dalam penurunan pembelanjaan pemerintah dari sektor pelayanan masyarakat dan sektor infrastruktur. Berikut data yang penulis dapatkan :

Tabel 4. Pengeluaran Pemerintah⁷⁸

Tahun	Pengeluaran untuk sektor Pelayanan Masyarakat	Pengeluaran untuk sektor Infrastruktur
2007 – 2008	83.4	16.6

⁷⁷ Atri, Mukherjee. 2013. *Cyclicality of Fiscal Policy in India*. Reserve Bank of India. Diakses melalui <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/altri-atti-convegni/2013-fiscal-policy/Mukherjee.pdf>

⁷⁸ Atri, Mukherjee. 2013. *Cyclicality of Fiscal Policy in India*. Reserve Bank of India. Diakses melalui <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/altri-atti-convegni/2013-fiscal-policy/Mukherjee.pdf>



2008 – 2009	89.8	10.2
2009 – 2010	89.0	11.0
2010 – 2011	86.9	13.1

Sehingga dapat disimpulkan bahwa India telah menerapkan aktivitas *countner-cyclical* pada sektor fiskal untuk mengatasi krisis yang terjadi pada tahun 2008-2009. Namun disini penulis menyadari bahwasanya data yang penulis dapatkan masih kurang sehingga hasil analisis kurang mendalam.

5.1.6. Broadening The Tax Base, Cuts in Marginal Tax Rate but more Progressive Income Tax and with Counter-Cyclical Reforms of Direct and Consuntion Taxes During Crises

Aktivitas terakhir yang mendukung adanya stabilitas ekonomi makro adalah dengan cara memperluas basis pajak, dimana dalam hal ini dilakukan dengan memotong tarif pajak marjinal dan lebih mempromosikan atau bertumpu pada pajak progresif. Hal ini dilakukan dengan melakukan reformasi *counter-cyclical* pada jenis pajak langsung dan pajak konsumsi selama krisis berlangsung.

Dalam pencarian data, disini penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan data pendukung untuk di analisis. Sehingga penulis tidak mendapatkan data yang sesuai dengan penerapan aktivitas ini di India. Namun dalam hal ini penulis mendapatkan informasi atau data berupa penerapan pajak progresif di India. Berikut datayang penulis dapatkan mengenai tarif pajak progresid di India pada tahun 2013;

Tabel 5. Tarif Pajak Progresif di India⁷⁹

⁷⁹ Basic Concept Income Tax Law in India. Diakses melalui http://dl4a.org/uploads/pdf/19764ipcc_it_vol1_cp1.pdf

Tingkat Pendapatan	Tarif Pajak
\leq Rs 200.000	Tidak dikenakan pajak
\geq Rs 200.000 - \leq Rs 500.000	Dikenakan pajak sebesar 10%
\geq Rs 500.000 - \leq Rs 10.00.000	Dikenakan pajak sebesar 20%
\geq Rs 10.00.000	Dikenakan pajak sebesar 30%

Sehingga disini penulis menyimpulkan bahwa India menerapkan pajak progresif namun karena keterbatasan data penulis tidak mengetahui apakah India telah melakukan seluruh aktivitas terkait dengan memperluas basis pajak yang dimaksudkan oleh pandangan *Neo-Developmentalism*.

5.1.7. Hasil Analisis

Variabel pertama dalam *Neo-Developmentalism* memiliki tujuan untuk mendapatkan stabilitas makro yang didapatkan dengan cara melakukan intervensi melalui *counter-cyclical* ketika krisis terjadi. Tujuan ini dilakukan dengan enam aktivitas yang telah penulis dapatkan datanya di India. Untuk mencapai stabilitas makro di India, pemerintah melakukan beberapa aktivitas yang sama seperti apa yang terdapat pada *Neo-Developmentalism*. Ketika krisis global pada tahun 2008-2010 berdampak pada semua negara tak terkecuali India. India memiliki cara untuk meminimalisir dampak pada perekonomian domestik sehingga perekonomian India dapat stabil. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penanaman modal kedalam sektor fiskal sebesar Rs 1.3 milyar guna menjaga tingkat likuiditas di India.

Selanjutnya adalah melakukan kontrol terhadap laju investasi keluar yang bertujuan untuk menggiring investor dalam negeri untuk berinvestasi dan membangun perusahaan milik negara. Serta mengeluarkan kebijakan *counter-*

cyclical disaat krisis terjadi. Hal ini ditandai dengan berkurangnya anggaran belanja pemerintah dan meningkatnya tarif pajak di India dan menerapkan tarif pajak progresif guna menyeimbangkan laju kegiatan ekonomi yang sedang meningkat di India.

Hal tersebutlah yang dilakukan oleh India untuk mendapatkan stabilitas ekonomi yang terjadi pada saat krisis global tahun 2008-2010. Berkat aktivitas tersebut pertumbuhan ekonomi di India tidak terlalu menurun drastis dan tidak berdampak besar pada perekonomian India.

5.2. Economy Oriented menurut Neo-Developmentalism

Saat ini banyak negara telah melakukan orientasi ekonomi keluar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Orientasi ekonomi sebuah negara dapat dikatakan sebagai strategi dari ekonomi yang dilakukan oleh negara. Bagi negara berkembang strategi orientasi keluar memiliki tujuan untuk fokus pada industrialisasi dan membuka ekonomi pada perdagangan bebas. Sehingga strategi ini dapat dikatakan sebagai keterbukaan pasar domestik dan peningkatan perdagangan internasional.⁸⁰ Aktivitas utama yang mendukung orientasi ekonomi keluar adalah dengan melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain. Selain itu orientasi keluar juga diidentikkan dengan mengurangi hambatan perdagangan serta membuka pasar modal.⁸¹

Orientasi ekonomi yang dimaksud oleh model pembangunan *Neo-Developmentalism* adalah melakukan orientasi ekonomi secara selektif. Dimana

⁸⁰Anonim. *Development*. Diakses melalui <https://ib-econ.wikispaces.com/Q78+-+Development>

⁸¹Ibid

dalam hal ini dimaksudkan untuk memperkuat perdagangan bebas dengan partner yang ada baik unilateral, bilateral ataupun multilateral. Selain itu fokus *Neo-Development* dalam perdagangan bebas adalah dengan melakukan ekspor, karena menganggap bahwa banyak negara berkembang telah melewati masa *infant industry* sehingga tidak lagi memerlukan kebijakan proteksi dan pesimis dalam melakukan perdagangan bebas.

Untuk mencapai tujuan dari orientasi ekonomi yang dibawa oleh *Neo-Development* maka terdapat beberapa aktivitas yang mendukung. Diantaranya adalah melakukan pengambilan kebijakan industri yang ditargetkan pada industri-industri strategis yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi secara internasional. Dalam hal ini penulis akan menganalisis orientasi yang dilakukan oleh India, dimana pada aktivitas ekspor selalu mengalami peningkatan.

Tabel 6. Tingkat Ekspor India⁸²

Tahun	Ekspor
2000	12.77
2003	14.69
2006	21.07
2009	20.61
2012	24.53
2014	23.03

Sehingga dalam hal ini penulis ingin melihat apakah dengan meningkatnya ekspor India telah melakukan orientasi ekonomi yang sesuai dengan *Neo-*

⁸² WorldBank Data. *Export of Goods and Services (% OF GDP)*. Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2014&locations=IN&start=2000>

Developmentalism. Selain aktivitas ekspor, terdapat beberapa aktivitas lain yang mendukung model pembangunan ini, antara lain;

5.2.1. Remove Barriers to Entry For International Financial Institutions but Consolidate State Banks and Subsidize Domestic Financial Market Consolidation

Aktivitas pertama untuk mendukung strategi ini adalah dengan melakukan penghapusan hambatan bagi institusi keuangan internasional seperti *World Bank*, *Asian Development Bank* dan institusi lainnya. Namun dalam melakukan penghapusan hambatan tersebut pemerintah melakukan konsolidasi dengan Bank Sentral dan juga memberikan subsidi pada pasar keuangan domestik.

*International Financial Institutions*⁸³ merupakan institusi yang memberikan dukungan finansial (bisa berupa hibah ataupun pinjaman) untuk kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara berkembang.⁸⁴ Jenis bantuan yang diberikan IFI's bisa berupa pinjaman, hibah, dan juga bantuan teknis baik kepada pemerintah serta perusahaan swasta. IFI's juga memiliki peran yang cukup penting dalam hal privatisasi dan regulasi pada sektor publik dan sumber daya alam.⁸⁵

Menurut *Neo-Developmentalism*, negara berkembang harus menghapus hambatan masuk bagi IFI's namun negara tetap berkonsolidasi dengan bank milik negara dan pasar keuangan domestik agar tujuan suatu negara dapat tercapai.

⁸³ Selanjutnya *International Financial Institutions* akan penulis singkat menjadi IFI's

⁸⁴ <http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Chapter20.pdf>

⁸⁵ Anonim. *International Financial Institutions*. Global GreenGrants Fund. Diakses melalui <https://www.greengrants.org/about/our-community/grant-advisors/ifi-advisory-board/>

Menurut Justin Lin,⁸⁶ kebiasaan yang terdapat pada IFI's adalah mengurangi atau mencegah suatu negara untuk menggunakan kebijakan industri untuk mencapai tujuan mereka. Namun Lin menganggap pentingnya konsolidasi antara mekanisme pasar dan intervensi negara dalam pembangunan akan memberikan keuntungan yang besar bagi negara tersebut dan mencapai tujuannya.⁸⁷

Biasanya hambatan masuk di pasar jasa keuangan mencakup undang-undang pemberian lisensi, persyaratan modal, akses terhadap pembiayaan, kepatuhan terhadap peraturan dan masalah keamanan.⁸⁸ Di antara sektor pasar yang berbeda, sektor jasa keuangan memiliki hubungan yang rumit secara unik dengan persaingan dan hambatan masuk. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dua faktor: persepsi bank dan perantara keuangan lainnya sebagai kekuatan pendorong di balik stabilitas ekonomi atau ketidakstabilan dan teori yang berlaku di antara banyak pembuat kebijakan bahwa "persaingan yang berlebihan" dalam layanan keuangan mengganggu efisiensi sektor secara keseluruhan.

Menurut *Neo-Developmentalism* dengan menghapus hambatan masuk bagi IFI's maka suatu negara akan mengalami keterbukaan. Namun keterbukaan ini terbatas pada akun modal suatu negara. Dimana suatu negara akan menghindari ketergantungan pada tabungan eksternal dan bahayanya *The Dutch Disease*. Jika

⁸⁶ Lin, J and Chang, H. J. 2011. *Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha- Joon Chang*. Development Policy Review. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?!*. *Review of International Political Economy*. Routledge. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

suatu negara tidak menghindari hal tersebut maka nilai mata uang negara akan terdepresiasi oleh dollar.

Namun dalam hal ini penulis mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi mengenai maksud dari *Neo-Developmentalism* mengenai instrumen ini.

Sedikitnya informasi mengenai hal ini menjadikan penulis tidak bisa menganalisis mengenai instrumen ini di India.

5.2.2. Trade Liberalization With Extensive Export Subsidies and The Active Transformation of Inherited Comparative Advantage, Trade Structure and Trade Partners

Aktivitas selanjutnya berkenaan dengan perdagangan bebas yang dalam prakteknya melakukan subsidi ekspor industri, melakukan transformasi aktif agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan melakukan perdagangan bebas yang terstruktur dan juga terikat dengan rekan perdagangan.

Dalam *Neo-Developmentalism* ekspor dianggap memiliki dua keuntungan. Pertama dengan negara melakukan ekspor maka pasar yang tersedia tidak hanya tersedia pada pasar domestik saja dan yang kedua perusahaan yang unggul dan berkualitas yang akan mendapatkan keuntungan. Sehingga banyak negara yang menginginkan agar dapat melakukan ekspor pada produk unggulan negara mereka. Namun banyak dijumpai permasalahan di negara berkembang dimana produk negara mereka tidak memiliki kualitas yang baik sehingga tidak dapat berkompetisi dengan produk dari negara lainnya.⁸⁹ Maka dari itu subsidi ekspor

⁸⁹ Anonim. *Export Subsidies and Competition*. Diakses melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd08_export_e.htm

merupakan salah satu cara agar produk ekspor dari negara berkembang dapat berkompetisi secara seimbang dengan produk dari negara lainnya khususnya produk yang di produksi oleh negara maju.

Permasalahan subsidi ekspor telah diatur oleh *World Trade Organization*, namun hal ini masih menjadi perdebatan karena banyak negara berkembang yang merasa aturan mengenai subsidi ekspor masih tidak adil. Dimana negara maju diperbolehkan memberikan subsidi yang tinggi sedangkan negara berkembang hanya diperbolehkan memberikan subsidi yang tidak lebih dari 10%. Pada tahun 2013 India dan negara ASEAN pada akhirnya mengusulkan penghapusan subsidi ekspor di negara-negara maju dan memperbolehkan negara berkembang untuk melakukan subsidi ekspor dengan tujuan pemasaran produk mereka.⁹⁰

Untuk meningkatkan perdagangan, pada tahun 2012 India mulai mengenalkan kembali insentif untuk meningkatkan gairah ekspor dinegaranya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian yang mulai melambat dan mengendalikan defisit perdagangan yang semakin meningkat.⁹¹ Dalam melaksanakan aktivitas tersebut, mula-mula India mulai mencabut larangan ekspor produk kapas dan beras basmati. Selanjutnya pemerintah akan memberikan subsidi kepada produk tersebut guna meningkatkan kualitas produk tersebut dan

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Khan dan James Fontanella. 2012. *Indian to Boost Exports with Subsidies*. Diakses melalui <https://www.ft.com/content/95751eee-9a92-11e1-83bf-00144feabdc0?mhq5j=e3>

produsen tertarik untuk melakukan perdagangan luar negeri.⁹² Program subsidi ekspor tersebut memberikan subsidi sebesar Rs 20 miliar.⁹³

Selanjutnya dalam memperkuat dan meningkatkan kerjasama baik bilateral, regional ataupun multilateral, India secara aktif melakukan perundingan dan kesepakatan kerjasama dengan banyak negara. Hal ini bertujuan untuk melakukan diversifikasi dan perluasan pasar untuk ekspor yang dilakukan dengan mitra dagang. Selain itu India juga melanjutkan semangat *Look East Policy*⁹⁴ yang telah dibuat pada masa pemerintahan Perdana Menteri P.V Narasimha Rao.⁹⁵ Adapun beberapa perjanjian bilateral utama yang dilakukan oleh India antara lain CEPA dengan Korea Selatan dan Jepang, CECA dengan Malaysia, melanjutkan hubungan perdagangan dengan Amerika, Uni Eropa, Asia Tenggara, Asia Timur dan negara lainnya.⁹⁶

Dengan adanya upaya memperkuat hubungan dagang yang dilakukan, India berhasil meningkatkan perdagangannya kepada negara-negara mitra, antara lain

Tabel 7. Pangsa pasar dan Hasil Perdagangan dengan Negara Mitra Tahun 2012-2013⁹⁷

Hasil Perdagangan Negara	Pangsa Pasar Ekspor India tahun 2012-2013	Pangsa Pasar Impor India tahun 2012-2013	Perdagangan India dengan Negara Mitra Dagang 2012-2013	
			Ekspor	Impor
Eropa	18.81%	16.89%	39.80%	61.64%

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ *Look East Policy* adalah sebuah upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan strategi India dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta meningkatkan power dikawasan regionalnya dan strategi untuk membendung pengaruh perdagangan Tiongkok.

⁹⁵ Annual Report 2012-2013. *Commercial Relations, Trades Aggrements and International Trade Organizations*. Diakses melalui http://commerce.nic.in/publications/annualreport_chapter6-2012-13.asp#a1

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.



Afrika	9.67%	8.7%	20.45%	31.75%
Amerika	19.26%	11.62%	40.76%	42.42%
Asia	50.45%	60.63%	106.74%	221.28%
CIS dan Baltics	1.28%	1.87%	2.71%	6.82%
Regional lainnya	0.54%	0.3%	1.14%	1.08%

Terakhir adalah mengenai keuntungan komperatif dimana barang dang jasa yang dihasilkan lebih banyak dan biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Namun dalam aktivitas ini penulis mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan data terkait hal tersebut. Sehingga pada aktivitas ini penulis tidak mendapatkan data untuk dianalisis.

5.2.3. Selective Privatization of State Enterprises with Restricted Access to Foreign Bidders

Selanjutnya adalah melakukan privatisasi perusahaan milik negara dengan akses terbatas pada modal asing. Menurut *Neo-Developmentalism* hal ini dilakukan oleh bank pembangunan milik negara, dimana bank tersebut akan mengeluarkan aturan mengenai privatisasi pada perusahaan negara. Bank Pembangunan Negara akan mengatur strategi privatisasi yang akan dilakukan oleh negara tersebut, termasuk larangan privatisasi dengan modal asing dibeberapa sektor strategis.

Namun dalam hal ini penulis kesulitan untuk menemukan data terkait mengenai aturan perbankan mengenai privatisasi yang terbatas untuk modal asing di India. Dalam hal privatisasi penulis hanya mendapatkan data dan informasi mengenai peran India dalam melakukan privatisasi. Dimana kebanyakan dari privatisasi yang dilakukan oleh India tidak secara terang-terangan melakukan privatisasi secara sepenuhnya. Namun dalam hal ini Pemerintah India melakukan

disinvestasi dimana pemerintah akan menjual sebagian modal yang dikeluarkan kepada pihak lain.⁹⁸ Pihak lain yang dimaksud dapat merujuk pihak asing ataupun pihak swasta.

Sehingga dalam instrumen ini penulis tidak mendapatkan data dan informasi lebih mendalam mengenai privatisasi perusahaan negara menurut *Neo-Developmentalism*.

5.2.4. *Selective Industrial Policy*

Aktivitas selanjutnya adanya kebijakan industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah India. Semenjak kemerdekaan India pada tahun 1941, percepatan industrialisasi merupakan salah satu bentuk kesepakatan bersama yang ingin dicapai oleh negara India tidak hanya sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga kedaulatan ekonomi. Yang mana dalam prakteknya kebijakan industri tersebut berturut-turut diterapkan dalam suatu Resolusi kebijakan Industri dan Pernyataan Kebijakan Industri.⁹⁹ Prioritas terperinci dari kebijakan industri di India sendiri sebenarnya dapat dilihat dari Rencana Lima Tahun (*Five Years Plan/FYP*) yang mulai dikeluarkan Pemerintah India sejak tahun 1951 sebagai FYP yang pertama.

Antara tahun 1991 hingga 2013, kebijakan industri di India telah terliberalisasi dengan diadakannya kelonggaran besar-besaran batasan FDI (*Foreign Direct Investment*) yang masuk ke India. Banyak jalan yang telah

⁹⁸ Disinvestment. Diakses melalui <http://www.investopedia.com/terms/d/disinvestment.asp>

⁹⁹ Ram Kumar Mishra. 2014. *Roles of State Owned-Enterprise in India's Economic Development*. OECD Conference Center, Room 4. Diakses melalui https://www.oecd.org/daf/ca/Workshop_SOEsDevelopmentProcess_India.pdf

dibuat oleh pemerintah India agar sektor swasta dan perusahaan global dapat bekerja sama dengan perindustrian sektor publik yang ada di India.¹⁰⁰ Hal ini tak lepas dari adanya revolusi ekonomi di India pada tahun 1991 yang mempengaruhi kebijakan industri yang ada di India. Pada tahun 2004, batasan FDI pada sektor perbankan swasta telah dinaikkan lebih dari 74%, eksplorasi minyak lebih dari 100 %, pemasaran produk minyak tanah juga lebih dari 100 %, jalur pipa gas alam dan gas alam cair (LNG) lebih dari 100% dan percetakan dari majalah dan jurnal ilmiah dan teknis juga lebih dari 100%. Pada Februari 2005, FDI pada sektor telekomunikasi berkembang pesat meningkat dari 49% menjadi 74%.¹⁰¹

Adanya beberapa pencapaian yang penulis dapatkan dari Pemerintah India di atas, mengindikasikan bahwa terdapat upaya dari Pemerintah India dalam merubah kebijakan industri di India utamanya agar dapat menarik FDI dari luar agar mampu mengangkat daya saing sektor industri yang ada di India sebagaimana yang terdapat dalam variabel *Economy Oriented* dengan tujuan orientasi di luar India.

5.2.5. Hasil Analisis

Selanjutnya adalah variabel mengenai orientasi ekonomi. Dimana dalam hal ini bertujuan untuk melakukan secara selektif aktivitas perdagangan. *Neo-Developmentalism* menganggap sebuah negara akan lebih mendapatkan keuntungan yang lebih jika negara tersebut melakukan aktivitas dagang dengan aturan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu *Neo-*

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

Developmentalism menyarankan untuk memperkuat mitra dagang mereka dengan cara perjanjian bilateral, multilateral, regional dan sebagainya.

Dalam variabel ini didukung empat aktivitas untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Di India sendiri untuk mencaapai tujuan ini melakukan dua aktivitas yakni dengan cara memperkuat hubungan dagang dengan mitra dagang dan mengeluarkan kebijakan industri guna percepatan industrialisasi di negaranya. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan domestik agar mampu berkompetisi dengan perusahaan lain baik pada level domestik ataupun pada level global.

Hasilnya hubungan dagang dengan mitra atau partner dagang menguat yang ditandai dengan munculnya kembali semangat *Look East Policy* pada masa pemerintahan Manmohan Singh. Serta munculnya perusahaan-perusahaan India yang mulai berkompetisi dengan perusahaan asing pada level internasional seperti *ONGC Vides* serta anak perusahaan yang dimiliki oleh *Tata Groups*.

5.3. Role of The State

Seiring dengan berjalannya waktu, peran negara dalam sebuah pembangunan ekonomi semakin di minimalisir. Dalam perspektif merkantilis, negara merupakan sebuah aktor utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya peran negara pada sektor ekonomi yang bertujuan untuk membantu atau menuntun sebuah perekonomian negara tumbuh dengan ekonomi yang baik.¹⁰² Karakter yang dibawa oleh perspektif ini adalah proteksi

¹⁰² Balaam, David N. dan Bradford Dillman. 2011. *Introduction to International Political Economy 5th edition*. Pearson : United State

guna melindungi perindustrian negaranya dari politik ekonomi sehingga hal ini dirasa dapat menjaga dan meningkatkan kekayaan negaranya.¹⁰³

Namun pandangan akan pentingnya peran negara dalam pertumbuhan ekonomi mulai hilang ketika terjadi *great depression* dimana banyak yang beranggapan bahwa negara terlalu banyak mencampuri aktivitas ekonomi pasar pada suatu negara. Oleh karena adanya peristiwa tersebut maka muncullah perspektif baru yakni liberalisme. Dimana dalam pandangan ini meyakini bahwasanya aktivitas ekonomi dan pasar bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus dicampuri oleh negara.¹⁰⁴ Pada masa perspektif ini muncul Organisasi Internasional dengan menganut *Bretton Wood system* yakni *World Bank*, *International Monetary Funds*, dan *World Trade Organization*.¹⁰⁵

Namun hal ini tidak bertahan lama, sebab muncul pandangan baru yang mengakui bahwa terdapat sebuah kegagalan pasar yang tidak dapat menyalahkan salah satu pihak. Pandangan ini sering disebut dengan pandangan Keynesian. Dimana menganggap bahwa sebuah aktivitas ekonomi dan pasar bisa berjalan dengan baik namun tidak dapat dipungkiri aktivitas tersebut bisa juga gagal. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah peran dari negara untuk bisa memperbaiki dan mencegah kegagalan yang terjadi akibat *market failure*.¹⁰⁶

Seiring dengan munculnya pandangan baru mengenai penting tidaknya sebuah negara ikut campur dalam sebuah aktivitas ekonomi. Hal memberikan

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

dampak yang cukup besar bagi perkembangan sebuah negara dalam menentukan arah model pembangunan yang akan diterapkan sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut berhasil. Terdapat model pembangunan yang pada umumnya negara terapkan agar tujuan dari pembangunan berhasil, antara lain *Washington Consensus* dimana model pembangunan ini berlandaskan perspektif liberal dan memiliki sedikit reformasi sehingga model pembangunan ini disebut dengan munculnya liberalisme baru atau neoliberal. Model pembangunan ini menyerahkan aktivitas ekonomi pada pasar sehingga dapat mencapai tujuan dari pembangunan. Selanjutnya adalah *Developmental state* dimana dalam model pembangunan ini mempercayakan sepenuhnya pada negara untuk mencapai sebuah tujuan dari pembangunan. Dalam model ini negara akan membantu para aktor pendukung ekonomi selain negara untuk bisa memajukan dan mendapatkan tujuan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan stimulus pada aktor tersebut agar dapat berkembang. Selanjutnya baru-baru ini muncul model pembangunan baru dimana posisi peran negara berada di tengah antara liberal dan merkantilis. Model pembangunan ini adalah *Neo-developmentalism*.

Tujuan dari model pembangunan pada model ini adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh secara domestik tanpa harus melakukan proteksi pada aktivitas ekonomi internasional. Selain itu dalam melakukan sistem pasar bebas negara diperbolehkan untuk berperan aktif dalam ekonomi bebas yang dibarengi dengan tujuan pembangunan. Untuk mencapai

tujuan tersebut, model pembangunan ini memiliki aktivitas pendukung akagar tujuan dari model pembangunan ini dapat tercapai, antara lain ;

5.3.1. *Secure Property Rights*

Aktivitas pertama untuk mendukung tujuan dari munculnya kembali peran negara dalam aktivitas ekonomi adalah melindungi hak kepemilikan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah India untuk melakukan perlindungan atas *property rights* yang terjadi selama masa pemerintahan Manmohan Singh (2004-2014). Selain itu juga penulis akan menginformasikan hasil yang telah dilakukan atas upaya perlindungan hak kepemilikan tersebut.

Property berkaitan dengan aset kepemilikan yang tidak bergerak, seperti tanah atau rumah.¹⁰⁷ Sedangkan *Rights* berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh individu.¹⁰⁸ Sehingga *property rights* mengacu pada hak/kontrol atas aset yang dimiliki oleh setiap individu.¹⁰⁹ Kontrol ini dapat bersumber dari berbagai aturan, hukum, norma sosial ataupun kebijakan. Kumpulan hak ini menggambarkan apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukannya dengan aset atau sumber daya yang dimiliki: sejauh mana dia memilikinya, menggunakan, mengubah, mewariskan, mentransfer atau mengecualikan orang lain dari propertinya.¹¹⁰

¹⁰⁷ Locke, Anna. 2013. Property Rights and Development Briefing : Property Rights and Economic Growth. Overseas Development Institute. Diakses melalui <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8513.pdf>

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Anonim. Public Property and Property Rights Theory. LSE. Diakses melalui http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th_%20Symposium/PA_PERS_PPS/LAW_CITIZENSHIP/ALEXANDROPOULOU.pdf

Contohnya adalah *Property Rights* yang berada pada kepemilikan privat atau pribadi memiliki hak eksklusif dimana individu dapat menentukan apa yang akan dilakukan pada asetnya dan mendapatkan hak atas asetnya. Individu yang memilik apartemen dengan hak kepemilikan yang lengkap berhak untuk menentukan apartemen tersebut. Apartemen dapat digunakan sendiri atau disewakan jika demikian pemilik berhak untuk memilih siapa yang akan menyewa dan berhak pula mendapatkan pendapatan atas penyewaan apartemen tersebut.

Hal ini adalah hak untuk memberikan jasa atas kepemilikan aset yang dimiliki.¹¹¹

Sehingga bisa dikatakan *Property Rights* dapat mencakup hak untuk mendelegasikan, menyewakan, ataupun menjual sebagian hak atas kepemilikan tersebut. Dengan demikian, tiga elemen dasar dari properti pribadi adalah (1) eksklusivitas hak untuk memilih penggunaan sumber daya, (2) eksklusivitas hak atas layanan sumber daya, dan (3) hak untuk bertukar sumber daya dengan persyaratan yang disepakati bersama.¹¹²

Pentingnya negara melakukan perlindungan *Property Rights* adalah untuk membantu memaksimalkan manfaat yang terdapat pada *property* itu sendiri. Jika aset tersebut berupa tanah subur maka akan bermanfaat jika tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan. Dimana hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut tentu akan bermanfaat bagi pemilik dan juga negara karena telah melakukan aktivitas ekonomi dan menyumbang

¹¹¹ Anonim. Public Property and Property Rights Theory. LSE. Diakses melalui http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th_%20Symposium/PAPERS_PPS/LAW_CITIZENSHIP/ALEXANDROPOULOU.pdf

¹¹² Ibid.

pendapatannya pada pendapatan negara. Sehingga negara wajib untuk melindungi hak kepemilikan agar setiap individu dapat memaksimalkan aset yang mereka miliki.

Masalah *Property Right* di India bukanlah permasalahan baru yang muncul.

Banyak masyarakat India yang tidak memperoleh hak kepemilikan yang sesungguhnya dan dilindungi secara baik oleh pemerintah India. Selain itu terdapat pula aturan yang membatasi setiap individu yang memiliki properti untuk menggunakannya.¹¹³ Dimana hal ini akan merugikan masyarakat tidak mampu. Sebab jika pemerintah tidak berpihakdan tidak melindungi properti yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat enggan mengeksploitasi properti tersebut bahkan menyembunyikannya.

Pada tahun 2008, pemerintah India mengeluarkan program *National Land Records Modernization Programme* yang bertujuan untuk memperbarui manajemen pencatatan tanah, meminimalisir sengketa tanah, mendorong transparansi dalam sistem pencatatan tanah, dan secara bertahap melakukan penjaminan pada aset yang tidak bergerak.¹¹⁴ Selain itu pada tahun 2013 pemerintah juga mengeluarkan draf kebijakan mengenai program untuk melakukan reformasi tanah (*land reform*).¹¹⁵ Hal ini bertujuan untuk memberikan

¹¹³ Anonim. *Property Rights*. India Institue. Diakses melalui <http://Indiai.org/property-rights/>

¹¹⁴ Meghan, Bal. *Securing Property Rights in India Through Distributed Ledger Technology*. Diakses melalui <http://www.orfonline.org/research/securing-property-rights-in-India-through-distributed-ledger-technology/>

¹¹⁵ Departement of Land Resource. 2013. *Draft National Land Reforms Policy*. Ministry Of Rural Development: Goevrnment of India. Diakses melalui http://rural.nic.in/sites/downloads/latest/Draft_National_Land_Reforms_Policy_July_2013.pdf

tanah (aset) dari yang kaya menuju yang miskin.¹¹⁶ Hal tersebut mencakup peraturan kepemilikan, penyewaan, penjualan, ataupun warisan.¹¹⁷ Program tersebut antara lain ;

- a) Memberikan lahan pada masyarakat pedesaan yang tidak memiliki lahan ;
- b) Mengembalikan lahan yang diambil secara paksa dari komunitas tertentu seperti contoh Dalits dan Tribals ;
- c) Melindungi lahan milik Dalits and Tribals termasuk yang mereka yakini dapat berkembang ;
- d) Meliberalisasi hukum persewaan ;dan
- e) Meningkatkan hak kepemilikan wanita.

Hasil dari program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah India tidak terlalu memuaskan. Sebab pada tahun 2014 India menempatkan diri pada peringkat ke 46 dari 97 negara di dunia dalam *International Property Rights Index*.¹¹⁸ Dan sangat disayangkan masalah *property rights* tidak terlalu di tonjolkan pada wacana publik sehingga permasalahan ini kurang ditangani dengan baik oleh pemerintah India.¹¹⁹

¹¹⁶ Kaushik Basu. *Land Reform in Inida*. Oxford University Press. Diakses melalui <http://personal.lse.ac.uk/ghatak/landref.pdf>

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ India Property Rights Alliance. *Current Situation in Inida*. Diakses melalui <http://indiapropertyrights.org/current-situation-in-India/>

¹¹⁹ Ibid.

5.3.2. Privatization of State Enterprises but With State Control Over Industrial Champions and With The Exclusion From Privatization of Federal Banks, Utilities and Strategic Commodities

Selanjutnya adalah melakukan privatisasi pada Badan Milik Negara. Namun dalam melakukan privatisasi pemerintah dapat mengontrol BUMN mana yang layak untuk diprivatisasi. Dalam hal ini maksud dari layak atau tidaknya adalah dengan melihat BUMN tersebut mampu tidak untuk mendorong perekonomian India, namun privatisasi tidak dilakukan pada sektor strategis dan bank federal. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai privatisasi yang dimaksud dalam aktivitas yang dimaksud oleh *Neo-Developmentalism*.

Privatisasi merupakan aktivitas penjualan saham milik negara, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak privat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai dalam sektor perindustrian. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan ukuran dan kedinamisan sektor privat serta memberikan keleluasaan hak kepemilikan kepada sebagian populasi.¹²⁰ Singkatnya, privatisasi dilakukan agar suatu sektor perindustrian dapat ramah terhadap pasar. Dalam perjalannya privatisasi menuai pro dan kontra, dimana privatisasi akan memperoleh keuntungan bagi mereka yang berhasil mengembangkan perindustrian tersebut. Sedangkan berdampak buruk bagi mereka yang tidak siap dan layak untuk bersaing pada skala global.

¹²⁰ M. Rajeev dan Dr. S. M Abdul Kader. 2016. *A Study of Impact of Privatization on The Performance of India General Insurance Sector*. International Journal Of Engineering Research and Modern Education, Vol I Issue II. Diakses melalui <http://ijerme.rmodernresearch.com/wp-content/uploads/2016/10/126.pdf>

Salah satu sektor yang strategis untuk dilakukan privatisasi adalah sektor publik. Hal ini dikarenakan oleh orientasi dari privatisasi yang akan menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan efisiensi dan performa dari sektor tersebut. Privatisasi juga melahirkan keteraturan dan kedisiplinan yang akan meningkatkan produktivitas sektor tersebut.¹²¹

Privatisasi di India sudah mulai muncul pada saat krisis tahun 1991, dimana dalam hal ini sektor publik dianggap berkontribusi dalam terjadinya krisis tersebut. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa sektor publik di India saat itu tidak memiliki kredibilitas yang baik dan tidak mampu memberikan keuntungan yang telah ditargetkan sebelumnya.¹²² Buruknya sektor publik di India saat itu dikarenakan masih terbatasnya teknologi yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia, serta masih kurangnya penelitian dan pembangunan.¹²³

Untuk memenuhi model pembangunan atas privatisasi saat itu di India, pemerintah lebih memilih untuk melakukan disinvestasi sebagai salah satu tujuan dari privatisasi. Disinvestasi merupakan suatu aktivitas yang menjual atau mencairkan aset yang dimiliki atau aset anak perusahaan yang dimiliki.¹²⁴ Namun menjual dalam hal ini bukan berarti menjual aset yang dimiliki namun mengurangi sebagian pengeluaran modal, yang dapat memfasilitasi alokasi ulang sumber daya perusahaan untuk lebih efektif dan produktif.¹²⁵

¹²¹ Anonim. *Chapter 4: Privatization in Indian Economic*. Diakses melalui http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3798/10/10_chapter%204.pdf

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Disinvestment. Diakses melalui <http://www.investopedia.com/terms/d/disinvestment.asp>

¹²⁵ Ibid.

Aturan untuk melakukan disinvestasi di India telah mengalami banyak reformasi. Namun pada tahun 2004, pemerintah India mengeluarkan program *National Common Minimum Programme* yang berkomitmen untuk menguatkan dan mengefektifkan sektor publik di India dengan berbagai aturan yakni ;¹²⁶

- a) Semua aktivitas privatisasi akan dipertimbangkan secara transparan dan konsultatif oleh satu persatu kasus;
- b) Perusahaan yang telah memberikan keuntungan tidak akan di privatisasi;
- c) Pemerintah akan mempertahankan perusahaan Navratna yang terdapat pada sektor publik, dimana pemerintah memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat meningkatkan sumber daya dari pasar modal;
- d) Berusaha untuk memodernisasi dan merekonstruksi sektor publik yang buruk, perusahaan dan sektor industri yang tidak produktif. Selain itu perusahaan yang merugikan secara kronis akan di jual dan di tutup (dengan catatan pegawai telah mendapatkan kompensasi bayaran yang sah)
- e) Pemerintah meyakini bahwasanya privatisasi akan menciptakan kompetisi yang sehat bukan mengurangi kompetisi. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mendukung munculnya persaingan monopoli dan membatasi persaingan.

Selanjutnya pada tahun 2005, pemerintah menyetujui *National Investment Fund*. Hal ini didanai oleh hasil disinvestasi yang telah dilakukan oleh

¹²⁶ Anonim. *Chapter 4: Privatization in Indian Economic*. Diakses melalui http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3798/10/10_chapter%204.pdf

pemerintah. Tujuannya adalah untuk pembiayaan sektor sosial yang terpilih sebesar 75% yang akan mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja dan 25% yang akan digunakan untuk membiayai investasi yang menguntungkan pada sektor publik, dimana akan dapat mengembalikan modal tersebut guna memperbesar modal mereka untuk melakukan ekspansi.¹²⁷

Selain itu pada pertengahan tahun 2005, Menteri Keuangan India mengumumkan untuk melakukan disinvestasi sebesar 10% pada perusahaan milik negara *Navratna BHEL*. Namun setelah dipertimbangkan disinvestasi tersebut gagal dilaksanakan karena kurangnya dukungan atas hal tersebut. Selain itu *Minister of Heavy Industries and Public Enterprise* juga mengumumkan bahwa terjadi penundaan disinvestasi pada perusahaan *Navratna* dan perusahaan lainnya. Strategi Menteri Keuangan dengan membatasi penawaran terhadap penjualan aset (disinvestasi) namun tetap membuka penawaran penjualan terhadap 13 sektor publik yang dianggap menguntungkan.

Pada tahun 2006, Pemerintah India melakukan disinvestasi kembali sebesar 10% pada sektor publik *NALCO* dan *NLC*. Namun disinvestasi yang dilakukan pada sektor publik *NLC* tidak berhasil karena terjadi demo buruh yang menentang disinvestasi tersebut.¹²⁸ Pada tahun 2009, isu disinvestasi kembali muncul dan pemerintah akan melakukan penjualan saham pada sektor-sektor strategis seperti *India Oil Ltd*, *NHPC* dan lain-lain. Aktivitas disinvestasi tersebut berhasil dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya terdapat keinginan pemerintah untuk

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

menaikkan anggaran disinvestasi, namun pada kenyataannya tahun 2010-2011 anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tidak mengalami kenaikan.¹²⁹

5.3.3. *No Privatization of Public Services*

Aktivitas selanjutnya adalah mengenai tidak dilakukannya privatisasi pada sektor jasa publik. Sektor jasa publik merupakan sebuah sektor yang menyediakan sebuah pelayanan yang diberikan untuk masyarakat umum disebuah negara, seperti. Sektor publik merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi sektor ini memiliki prospek yang bagus. Sehingga beberapa negara memilih untuk melakukan privatisasi pada sektor publik mereka untuk mengembangkan dan memperbaiki agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Di India, sektor jasa publik di India merupakan salah satu kunci penggerak pertumbuhan ekonomi.¹³⁰ Hal ini terbukti dari meningkatnya kontribusi sektor jasa pada tahun 2002-2003 sebesar 47.4% menjadi 51.8% pada tahun 2013-2014 ke dalam pendapatan negaranya.¹³¹

Namun seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, India tidak melakukan privatisasi secara kaku melainkan dengan cara lain. Namun pada sektor jasa publik penulis menemukan bahwasanya India telah banyak melakukan privatisasi sektor jasa publik. Dimana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan pengembangan perusahaan tersebut.

¹²⁹ Ibid

¹³⁰ Anonim. Services Sectors in India. IBEF. Diakses melalui <https://www.ibef.org/industry/services.aspx>

¹³¹ WorldBank Data. Services, etc., Value Added (% of GDP). Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS?locations=IN>

Adapun beberapa bandar udara di India yang telah di privatisasi guna meningkatkan efisiensi dan pengembangan bandar udara tersebut agar lebih baik. bandar udara yang telah diprivatisasi pada tahun 2004-2014 tersebut antara lain Bandara Mumbai dan Bandara Delhi yang telah dilakukan privatisasi pada tahun 2006. Hal ini bertujuan untuk memodernisasi bandara tersebut agar menjadi bandar udara yang sesuai dengan kriteria bandar udara internasional lainnya. Bandara Mumbai tidak sepenuhnya dimiliki oleh swasta namun juga dimiliki oleh *Airports Authority of India*. Bandar udara ini merupakan *join venture* dengan swasta GVK Ltd. Dengan kepemilikan sebesar 74%.¹³²

Selain itu India juga melakukan privatisasi pada jasa telekomunikasi. *Videsh Sanchar Nigam Limited*¹³³ merupakan sektor publik yang bergerak pada layanan telekomunikasi jarak jauh dimana memiliki peran yang kuat baik pada skala domestik atau pun global. Namun tahun 2002 pemerintah mulai melakukan privatisasi pada VSNL kepada Tata Group dan pada tahun 2008 VSNL sepenuhnya telah diakuisisi oleh Tata Group.¹³⁴

Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pada instrumen ini India tidak melakukan seperti apa yang *Neo-Developmentalism*. Dimana India melakukan privatisasi pada sektor jasa publik karena dianggap dapat membantu memperbaiki badan usaha tersebut.

¹³² Association of Private Airport Operators. *Mumbai International Airport Limited*. Diakses melalui http://www.apaoIndia.com/?page_id=164

¹³³ Selanjutnya *Videsh Sanchar Nigam Limited* akan penulis singkat menjadi VSNL

¹³⁴ Anonim. *Videsh Sanchar Nigam Limited*. IBEF. Diakses melalui https://www.ibef.org/download/VSNL_23oct.pdf

5.3.4. Moderate Financial Deregulation

Deregulasi sektor keuangan merupakan salah satu poin utama dalam melakukan liberalisasi perdagangan. Aktivitas ini dibawa oleh model pembangunan *Washington Consensus*. Namun aktivitas tersebut memiliki perbedaan dengan aktivitas yang dikeluarkan *Neo-Developmentalism* dimana dalam melakukan deregulasi pada sektor keuangan tidak sepenuhnya dibebaskan pada pasar melainkan tetap ada kontrol dari negara. Sehingga dalam hal ini deregulasi pada sektor keuangan dilakukan secara moderat.

Deregulasi merupakan pengurangan sebuah cara untuk meminimalisir regulasi pemerintah terhadap suatu aktivitas. Sehingga dalam hal ini deregulasi sektor keuangan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir peran dan aturan negara dalam mengatur sektor keuangan pada suatu negara. Hal ini biasanya bertujuan untuk mengatasi rendahnya aktivitas keuangan di sebuah negara. Selain itu hal ini juga bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena akan mempermudah investasi dan aktivitas keuangan lainnya yang akan dilakukan.

Banyak aktivitas pendukung untuk mendukung dari deregulasi sektor keuangan. Dalam menerapkan aktivitas ini India melakukan deregulasi terhadap tingkat suku bunga pada tahun 2011.¹³⁵ Setelah pada tahun 2003 menciptakan *Benchmark Prime Lending Rate*¹³⁶ namun gagal diterapkan maka RBI merekomendasikan sistem baru yang mencakup a) Penyesuaian suku bunga pada

¹³⁵ *United Nations Conference of Trade and Development*. 2012. *Twenty Years of India's Liberalization : Experiences and Lessons*. Diakses melalui http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpg2420093_en.pdf

¹³⁶ *Benchmark Prime Lending Rate* adalah..

retail yang menyetorkan dibawah Rs 15 lakh pertahun untuk giro dan tabungan pada; b) Penyesuaian pada nilai yang membawa pengaruh negatif pada CRR dan SLR; c) Biaya tambahan yang tidak dapat dialokasikan untuk bank, dan d) Rata-rata pengembalian kekayaan bersih.

Pada tahun 2011 RBI mengeluarkan deregulasi terhadap suku bunga deposit.¹³⁷ Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada bank untuk memobilisasi simpanan yang disimpan oleh bukan penduduk. Selain itu bank umum diberikan kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunga tabungan dan deposit dengan jangka satu tahun ke atas kepada yang bukan penduduk baik diluar atau di dalam negeri.¹³⁸ Namun suku bunga yang ditawarkan tidak lebih tinggi daripada penabung dan pelaku deposito penduduk domestik.¹³⁹

Selain itu hal tersebut juga bertujuan untuk menekan inflasi yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara menaikkan nilai suku bungan jangka pendek yang dipinjamkan ke bank umum. Menurut RBI hal ini akan menguntungkan para penabung karena akan memungkinkan bahwa pemberi kreditur akan memberikan inovasi baru untuk menarik dana dari masyarakat dengan pendapatan rendah.¹⁴⁰

Dengan dilakukan hal tersebut maka akan semakin banyak masyarakat yang tertarik dan menyimpan uang mereka di bank umum. Dengan semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas ini maka inflasi yang terjadi akan segera

¹³⁷ RBI. 2011. Deregulation of Interest Rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposits and Ordinary Non-Resident (NRO) Accounts. Diakses melalui <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/323CD281211F.pdf>

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Anonim. 2011. *Interest Rate on Saving Bank Deposits Deregulated*. The Hindu Business Line: Mumbai. Diakses melalui <http://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/interest-rate-on-savings-bank-deposits-deregulated/article2571228.ece>

menurun. Selain itu cara ini juga dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi lainnya.

Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi bahwa India telah menerapkan deregulasi pada sektor keuangan dalam hal tingkat suku bunga pada deposito. Namun aktivitas yang dilakukan oleh India tidak memiliki korelasi dengan aktivitas yang ditawarkan oleh *Neo-Developmentalism* mengenai deregulasi sektor keuangan secara moderat. Selain itu dalam menganalisis aktivitas ini, penulis kesulitan untuk menemukan data yang relevan dengan aktivitas yang dimaksud oleh *Neo-Developmentalism* sehingga analisis yang penulis tulis mengenai aktivitas ini tidak mendalam.

5.3.5. *No Labor Market Deregulation and Consolidation of Corporatist Institution*

Selanjutnya aktivitas yang mendukung *Neo-Developmentalism* dalam peran pemerintah adalah tidak melakukan deregulasi atas pasar tenaga kerja dan berkonsolidasi dengan institusi terkait. Pasar tenaga kerja mengacu pada permintaan dan penawaran pekerja dimana pekerja akan memberikan penawaran dan permintaan pada institusi atau perusahaan. Sehingga dalam aktivitas ini diartikan bahwa tidak ada lagi deregulasi terhadap permintaan dan penawaran pekerja secara bebas. Serta melakukan konsolidasi pada institusi terkait ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja.

Aktivitas perdagangan bebas dan pasar bebas akan menimbulkan *trade-off* kepada sebuah negara jika tidak mengimbangnya dengan bijak. Hal ini

dikarenakan oleh dampak lain dari perdagangan bebas yang akan menimbulkan pengangguran serta upah yang tidak stabil. Terlebih lagi liberalisasi akan membawa pasar tenaga kerja menjadi lebih bebas tanpa adanya aturan yang mengikat dari pemerintah. Hal inilah yang akan muncul jika sebuah negara tidak melakukan aturan yang tepat untuk melindungi tenaga kerja di era liberalisasi dunia.

Struktur tenaga kerja di India sangat beragam, terdapat banyak pengklasifikasian disana. Terdapat pekerja formal pada sektor informal ataupun sebaliknya. Selain itu undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan di India juga beragam. Saat ini hampir 90% angkatan kerja India bekerja di sektor informal¹⁴¹ dan hampir 50% pendapatan negara bersumber dari sektor ini.¹⁴² Persaingan yang ketat dan juga peluang yang besar namun terbatasnya sumber daya mengakibatkan munculnya sektor informal di India.

Pekerja formal dan informal terbagi menjadi dua sektor yakni sektor terorganisir dan tidak terorganisir (informal). Menurut Komisi Nasional untuk Usaha di Sektor Unorganised (NCEUS) sektor informal disini diartikan sebagai perusahaan swasta atau milik pribadi yang memiliki kurang dari sepuluh pekerja.¹⁴³ Selanjutnya pekerja informal merupakan pekerja yang tidak memiliki jaminan atau ikatan hukum yang kuat baik itu pada sektor formal ataupun sektor

¹⁴¹ A. Srija dan Shrinivas V. Shirke. 2014. *An Analysis of The Informal Labour Market in India*. Confederation of Indian Industry. Diakses melalui

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

informal. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan peminat pekerja pada sektor formal dengan perbandingan 17:83 dari 13:87 pada tahun 2005.¹⁴⁴

Namun disini yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor formal dikarenakan adanya peraturan India yang kaku dan juga aturan yang berlebihan.¹⁴⁵ Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pasar tenaga kerja mereka.¹⁴⁶ Oleh karena itu banyak perusahaan dan perindustrian yang memilih untuk menggunakan tenaga kerja informal untuk menghindari Undang-Undang yang terkesan menyulitkan. Peraturan untuk mematuhi sebuah peraturan pemberian kompensasi dari perusahaan yang akan memberhentikan pekerja dan perusahaan tersebut juga harus menginformasikan hal tersebut kepada kantor pemerintahan. Undang-undang ketenaga kerjaan di India pada dasarnya menjamin tenaga kerja di India untuk mendapatkan jaminan hidup pasca pemberhentian mereka.

Tabel 8. Tingkat Pengangguran di India¹⁴⁷

Tahun	Tingkat Pengangguran
2000	4.31%
2005	4.4%
2010	3.5%
2014	3.4%

Dengan demikian upaya pemerintah India untuk melindungi pasar tenaga kerja domestik dari serangan liberalisasi yang dapat mengancam tingginya

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Phillipe Aghio, dkk. 2007. *The Unequal Effects of Liberalization : Evidence From Dismantling The Licence Raj in India*. Working Paper No. 345. Diakses melalui http://www.econ.uzh.ch/static/wp_iew/iewwp345.pdf

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ WorldBank Data: Unempoyment Total – ILO. Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IN>



pengangguran dapat dikatakan berhasil. Meskipun tenaga kerja India masih banyak terserap pada sektor informal. Peraturan pemerintah India dalam pasar tenaga kerja merupakan peraturan yang paling ketat di antara negara lain.¹⁴⁸ Namun peraturan ini dianggap banyak peneliti untuk melakukan peraturan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.

5.3.6. *Conditional Cash Transfers to The Poor Plus Expansionary Minimum Income Policy*

Aktivitas terakhir dalam peran negara dalam mencapai tujuan *Neo-Developmentalism* adalah mengenai bantuan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di India. Berkaca pada tujuan *Neo-Developmentalism* pada peran negara untuk mencapai sistem pasar bebas yang berfokus pada tujuan pembangunan, maka aktivitas ini dianggap penting untuk mencapai tujuan tersebut. *Conditional Cash Transfers*¹⁴⁹ merupakan sebuah program pemerintah yang memiliki tujuan yang ganda.¹⁵⁰

Skema pemberian CCT adalah dengan cara memberikan uang tunai secara langsung kepada keluarga tidak mampu. Dimana hal ini merupakan sebuah respon terhadap individu atau keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi pendidikan yang layak untuk anak kecil, kesehatan, serta partisipasi dalam pelaksanaan imunisasi dan jenis bantuan sosial lainnya.¹⁵¹ Skema ini diciptakan untuk

¹⁴⁸ The Economist. 2007. *A Himalayan Challenge*. Diakses melalui <http://www.economist.com/node/9955756>

¹⁴⁹ Selanjutnya penulisan *Conditional Cash Transfers* akan penulis singkat menjadi CCT.

¹⁵⁰ United Nations Development Programme. 2009. *Conditional Cash Transfers Schemes for Alleviating Human Poverty : Relevance fo India*. Discussion Paper UNDP India. Diakses melalui http://www.undp.org/content/dam/India/docs/cct_dp.pdf

¹⁵¹ Ibid.

menyesuaikan perilaku mereka terhadap tujuan nasional. Secara teknis, tujuan dari program ini untuk memperbaiki kegagalan pasaryang terkait dengan eksternalitas positif noninternatif.¹⁵² Dengan kata lain negara menggunakan program ini untuk a) memberikan insentif kepada perilaku pribadi untuk menjamin eksternalitas positif seperti peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, serta b) Menargetkan kelompok usia lanjut yang tidak mendapatkan akses yang layak pada barang dan jasa karena penurunan siklus pendapatan dan guncangan eksogen.

Program bantuan sosial sudah menjadi tradisi lama di India, baik diselenggarakan dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah di negara bagian. Program bantuan sosial telah dimulai sejak tahun 1951 dimana telah diterapkan sebagai keamanan sosial ekonomi di India.¹⁵³ Pada masa 2004-2014, program bantuan ini dilakukan untuk mencapai tujuan *Millennium Development Goals* dan juga Konstitusi India, Pemerintah India mengeluarkan beberapa program yang mencakup keamanan ekonomi, seperti Skema Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional (NREGS), serta jaminan sosial yang melindungi tunjangan pensiun bagi kelompok tua, janda dan orang cacat fisik.

Adapun beberapa program CCT yang diterapkan baik di negara bagian dan juga secara nasional, antara lain,¹⁵⁴

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Prabhu, K. S., 2001, 'Socio-Economic Security in the Context of Pervasive Poverty: A Case Study of India', SES Discussion Paper, International Labour Organization, Geneva. Diakses melalui http://www.undp.org/content/dam/India/docs/cct_dp.pdf

¹⁵⁴ Ibid.

a) *Janani Suraksha Yojana (JSY)* → Program nasional yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga.

Program bantuan ini adalah pembaruan dari program bantuan sosial yang telah diterapkan pada tahun 1995. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka kematian Ibu dan bayi melalui kelahiran yang ditangani oleh pihak yang berwenang. Bantuan akan diberikan kepada ibu yang berasal dari keluarga tidak mampu sebesar Rs. 500 dengan kondisi kelahiran yang selamat. Serta diberikan tambahan bantuan sebesar Rs.100 jika tinggal di daerah pedesaan dan Rs. 200 jika tinggal di daerah kota.

Serta terdapat penggantian dana jika Ibu tersebut menggunakan transportasi sendiri untuk mencapai rumah sakit.

b) *Dhanalakshmi* → Program nasional yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh Kementerian Perempuan dan Anak . Program ini juga sering disebut

dengan *Dhanalakshmi* atau Skema CCT untuk Anak Perempuan, yang mencakup Asuransi. Transfer tunai akan diberikan kepada anak (lebih baik

Ibu) ini yang memenuhi persyaratan sebagai berikut berikut; Telah

mendaftarkan kelahiran anak perempuan, catatan mengenai kemajuan imunisasi, pendaftaran dan retensi di sekolah. Mereka akan mendapatkan

tunjangan sebesar Rs. 100.000 melalui *Life Insurance Corporation of India*, dengan syarat tidak menikah sebelum usianya 18 tahun.

c) *Skema Kasturba Gandhi Balika Vidyalay* → Program Nasional yang dikeluarkan pada tahun 2004 oleh Kementerian Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Pemerintah India dan bergabung dengan SSA¹⁵⁵ pada tahun 2007. Program ini memiliki tujuan untuk melihat dan memperbaiki tingkat putus sekolah pada anak perempuan di tingkat pendidikan menengah dan memastikan retensi sampai usia 18 tahun. Program ini dilengkapi dengan skema transfer tunai untuk pendidikan selama satu kali sebesar Rs. 3000. Dengan ketentuan disetorkan atas nama anak tersebut dan terdaftar di kelas sembilan dan belum menikah.

- d) *Ladli Schemes* → Program yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Delhi pada tahun 2008. Program ini bertujuan untuk mengurangi aborsi yang dilakukan oleh perempuan dan meningkatkan status sosial anak perempuan tersebut dengan memberikan pendidikan dan melindungi mereka dari diskriminasi. Program ini memberikan dana sebesar Rs. 10.000 atas nama anak perempuan tersebut saat kelahirannya, kemudian memberikan Rs 5.000 pada saat pendaftaran sekolah di tingkat dasar pertama, ke enam, ke sembilan, ke-10 dan ke-12.

Banyak sekali program CCT nasional dengan skema yang bertujuan untuk memperkuat kuantum dan kualitas layanan yang diberikan untuk meningkatkan pencapaian di sektor sosial. Seperti contoh skema *Integrated Child Development* dimana dapat memenuhi persyaratan gizi anak-anak usia nol sampai enam tahun, Skema *The Mid Day Meal* (STET) yang bertujuan untuk menyediakan makanan

¹⁵⁵ *Sarva Shiksha Abhiyan* (SSA) mulai beroperasi sejak tahun 2000. Memiliki fokus pada piagam universal, akses, retensi dan prestasi anak-anak di kelompok usia enam sampai 14 tahun. SSA memiliki skema yang berusaha untuk meningkatkan pendaftaran melalui penyediaan layanan, beberapa di antaranya adalah distribusi buku teks gratis untuk kelas dasar dan kelas atas, pengembangan kurikulum dan buku teks, perekrutan guru tambahan, khususnya perempuan. SSA sedang dilaksanakan dalam kemitraan dengan pemerintah negara bagian untuk mencakup seluruh negara dan memenuhi kebutuhan 192 juta anak di setiap 1,1 juta tempat tinggal.

bergizi bagi anak-anak di sekolah dasar dan Bagi kelompok tua (pensiunan) berada dibawah Skema Program Bantuan Sosial Nasional untuk orang-orang di atas 65. Skema yang baru diluncurkan seperti *Sarva Shiksha Abhiyan*, *The National Rural Health Mission* dan *The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission* yang bertujuan untuk meningkatkan peyediaan pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur.

5.3.7. Hasil Analisis

Terakhir adalah variabel mengenai peran negara yang bertujuan untuk mengontrol aktivitas perdagangan bebas dengan peran aktif negara dalam memilih aktivitas pendukung yang bertujuan juga untuk membangun. Dalam variabel ini memiliki enam aktivitas pendukung guna tercapainya tujuan pembangunan.

Di India sendiri peran negara saat ini terlihat dari adanya perlindungan hak kepemilikan guna melindungi pemilik agar dapat melakukan aktivitas ekonomi yang dapat menambah nilai guna suatu *property*. Selain itu tujuan India melakukan privatisasi juga untuk mendorong dan memperbaiki perusahaan yang memiliki peluang besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi di India. Hal ini India lakukan dengan cara disinvestasi dimana dalam hal ini pemerintah masih dapat mengontrol aktivitas dari perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan yang melakukan disinvestasi adalah *India Oil Ltd. NHPC* dan perusahaan lainnya. Selain itu juga India melakukan privatisasi pada sektor jasa yang dianggap memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yakni Bandar Udara dan juga sektor telekomunikasi di India.

Selain itu untuk mengurangi dampak dari perdagangan bebas khususnya pada pasartena kerja. India melakukan perlindungan melalui aturan kerja yang ketat di India. Sehingga pekerja formal di India mendapatkan jaminan ketika sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Terakhir adalah untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh perdagangan bebas maka Pemerintah India dalam hal ini mengeluarkan program-program guna membantu menyejahterakan penduduk serta guna mencapai tujuan pembangunan di India juga. Program ini adalah pemberian bantuan tunai bersyarat kepada penduduk yang tidak mampu.

Dengan adanya peran pemerintah yang dapat mengatur aktivitas perdagangan bebas, maka dampak negatif dari perdagangan bebas dapat diminimalisir dan bahkan dapat membantu pembangunan di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan mulai menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di India pada masa pemerintahan Manmohan Singh 2004-2014.

Dalam memperoleh pencapaian ekonomi yang telah India dapatkan pada masa Manmohan Singh 2004-2014. India telah melakukan aktivitas baru yang sama dengan aktivitas model pembangunan *Neo-Developmentalism*. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pencapaian India yang tidak hanya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan mendapatkan penurunan pada angka kemiskinan dan pengangguran yang dipengaruhi oleh aktivitas *Neo-Developmentalism*.

Tak hanya itu perekonomian India yang stabil juga dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan India yang sesuai dengan *Neo-Developmentalism*. Pada

aktivitas perdagangan bebas juga India mendapatkan penguatan hubungan dagang. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan India mencapai dan berhasil dalam membangun perekonomiannya pada masa pemerintahan Manmohan Singh 2004-2014.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Neo-Developmentalism adalah model pembangunan yang dipelopori oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin khusus Brazil. Model pembangunan ini merupakan model pembangunan yang membantu negara berkembang untuk bertransisi model pembangunan dari *Washington Consensus* menuju *Neo-Developmentalism*. Beralih menuju model pembangunan ini diakibatkan karena gagalnya model pembangunan *Washington Consensus* yang diterapkan di banyak negara berkembang. *Neo-Developmentalism* muncul untuk membantu negara berkembang agar perekonomian negaranya tidak semakin memburuk.

Di dalam *Neo-Developmentalism* terdapat strategi pembangunan yang baru yakni kapitalis nasionalis. Dimana strategi pembangunan tersebut menawarkan kembali peran negara dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah agar negara dapat mengontrol aktivitas ekonomi sehingga tujuan dari pembangunan suatu negara dapat tercapai. Namun dengan kembalinya peran negara dalam *Neo-Developmentalism* bukan berarti perekonomian negara tersebut langsung tertutup melainkan negara akan membantu dan mengarahkan aktivitas yang baik agar tujuan pembangunan negara dapat tercapai. Oleh karena itu negara yang akan menerapkan model pembangunan ini akan mendapatkan keuntungan dari keterbukaan ekonomi tanpa harus khawatir negaranya akan mengalami

permasalahan pembangunan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.

Dalam *Neo-Developmentalism* terdapat aktivitas pendukung strategi pembangunan guna mencapai keberhasilan tujuan pembangunan. Setidaknya ada 16 aktivitas yang akan mencerminkan suatu negara memiliki persamaan dengan strategi pembangunan yang dibawa oleh *Neo-Developmentalis*. Dimana dalam penelitian ini penulis akan melihat aktivitas dalam strategi pembangunan India menggunakan aktivitas yang terdapat pada *Neo-Developmentalism*. Hal ini bertujuan untuk menemukan jawaban mengenai apakah aktivitas dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah India pada tahun 2004-2014 memiliki kesamaan dengan model pembangunan ini. Dimana pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2004-2014 mengalami kemajuan serta stabil dan juga permasalahan pengangguran dan kemiskinan disana dapat menurun berkat strategi pembangunan yang diterapkan oleh Manmohan Singh.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bukti bahwasanya dalam menerapkan strategi pembangunan pada masa pemerintahan Manmohan Singh pada tahun 2004-2014 India melakukan beberapa aktivitas yang sama dengan aktivitas yang dikemukakan oleh *Neo-Developmentalism*. Dimana dalam hal ini, telah Cornel Ban tulis mengenai indikator atau ukuran suatu negara dapat dikatakan telah menerapkan model pembangunan *Neo-Developmentalism*. Cornel Ban menyebutkan bahwa, jika suatu negara telah menerapkan satu aktivitas yang sama dengan aktivitas *Neo-Developmentalism* maka bisa dikatakan negara tersebut telah menerapkan model pembangunan *Neo-Developmentalism*.

Hasil penelitian yang mencerminkan adanya aktivitas India yang sama dengan *Neo-Developmentalism* antara lain; Pertama adalah aktivitas yang memperbolehkan faktor lain dalam menentukan nilai suku bunga di India.

Selanjutnya adalah aktivitas mengenai pasar menentukan nilai mata uang India yang terdapat kontrol dari negara dalam menentukan tingkat tersebut. Aktivitas ketiga adalah mengenai Bank sentral dalam melakukan kontrol terhadap Inflasi dimana di India melalui RBI yang melakukan kontrol terhadap tingkat Inflasi.

Aktivitas selanjutnya yang mencerminkan *Neo-Developmentalism* adalah mengenai melakukan subsidi ekspor dan melakukan transformasi aktif terhadap mitra dagang. Dimana India melakukan subsidi ekspor pada produk kapas dan beras basmati. Serta melakukan penguatan hubungan yang tercermin pada *Look East Policy*. Aktivitas kelima adalah mengenai kebijakan industri, dimana dalam hal ini sudah terbukti dari program *FYP* yang selalu India keluarkan untuk tujuan pembangunan.

Aktivitas selanjutnya yang mencerminkan *Neo-Developmentalism* selanjutnya adalah mengenai perlindungan atas hak kepemilikan. Dimana di India telah melakukan upaya untuk melindungi kepemilikan yang terbukti dari adanya program *Land Reform* dan *National Land Records Modernization Programme*.

Aktivitas ketujuh adalah mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan perbaikan pada BUMN yang kompetitif. Aktivitas ini telah dilakukan di India namun dilakukan dengan cara disinvestasi pada *India Oil Ltd.*, *NHPC*. Selanjutnya adalah mengenai aktivitas deregulasi pada sektor keuangan secara moderat. Aktivitas ini terbukti dengan RBI melakukan deregulasi pada

produk deposito. Dimana RBI mengizinkan bank umum untuk menentukan tingkat suku bunga pada deposito.

Aktivitas selanjutnya yang mencerminkan *Neo-Developmentalism* adalah mengenai tidak melakukan deregulasi pada pasartena kerja. Dimana aktivitas ini telah terbukti dengan aturan yang telah India terapkan untuk melindungi pekerja India dan menjamin kehidupan pekerja formal di India pasca pensiun.

Aktivitas terakhir yang mencerminkan adanya aktivitas yang sama dengan *Neo-Developmentalism* di India adalah dalam melakukan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat di India. Dimana hal ini terbukti dari program yang dikeluarkan India antara lain *Janani Suraksha Yojana, Dhanalakshmi, Skema Kasturba Gandhi Balika Vidyalyay, dan Ladli Schemes.*

Sehingga disini penulis dapat menyimpulkan berdasarkan tolak ukur yang telah Cornel Ban jelaskan dalam *Neo-Developmentalism*. Secara keseluruhan untuk mencapai tujuan dari strategi pembangunan ekonomi India pada masa pemerintahan Manmohan Singh tahun 2004-2014 dapat dikatakan melakukan beberapa aktivitas yang sama dengan aktivitas yang terdapat pada model pembangunan *Neo-Developmentalism*. Setidaknya terdapat sembilan aktivitas yang *Neo-Developmentalism* keluarkan dan India lakukan untuk mencapai tujuan pada strategi pembangunan ekonomi India pada tahun 2004-2014.

Aktivitas lain yang terdapat pada *Neo-Developmentalism* bukan berarti tidak diterapkan, namun ada kemungkinan aktivitas tersebut diterapkan namun disini penulis mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan dan mengeksplorasi pemahaman dan tujuan yang dimaksud dalam *Neo-Developmentalism*. Oleh

karena itu, India telah menerapkan *Neo-Developmentalism* untuk mencapai tujuan dari strategi pembangunan yang dikeluarkan oleh Manmohan Singh pada tahun 2004-2014. Dimana terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di India. Selain itu hubungan India dengan mitra dagang juga tidak mendapatkan permasalahan yang serius, bahkan hubungan perdagangan semakin kuat akibat muncul kembali semangat *Look East Policy*.

6.2. Saran

Penelitian yang penulis lakukan disini bukanlah penelitian yang spaling sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian penulis. Masih banyaknya data dan informasi serta pemahaman mpenulis mengenai *Neo-Developmentalism* juga mengakibatkan kurang mendalamnya penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan disini bukanlah penelitian yang sempurna. *Neo-Developmentalism* merupakan sebuah model pembangunan baru yang menarik untuk diteliti lebih dalam karena model pembangun ini telah menarik perhatian dunia. Namun dibalik kekurangan penulis dalam penelitian ini, penulis yakin bahwasanya penelitian ini akan membantu mahasiswa yangmemiliki minat yang sama dengan apa yang penulis teliti.

Saran lainnya yang dapat penulis berikan adalah objek penelitian dimana kemungkinan besar lebih mudah untuk dilakukan penelitian pada negara-negara di kawasan Amerika Latin. Selain itu jika memang menginginkan India sebagai objek penelitian mengenai model pembangunan yang diterapkan mungkin dapat

menggunakan model pembangunan lain yang muncul pasca *Washington Consensus*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Balaam, David N. dan Bradford Dillman. 2011. *Introduction to International Political Economy 5th edition*. Pearson : United States

Bhattacharya, B.B. dkk. 2008. *Modeling Interest Rate Cycles in India*. Development

Greenberg, James B. 1997. *A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Case of the Dominican Republic. Culture & Agriculture*.

Manfred B. Steger. 2003. *Globalization : A Very Short Introduction*. New York : Oxford University Press

Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Meredith, Robyn. 2008. *The Elephant and The Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us*, Viva Books, New Delhi.

Meredith Woo-Cumings. 1999. *The Developmental State*. Cornell University Press : Ithaca, New York

Robyn Meredith, *The Elephant and The Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us*, Viva Books, New Delhi, 2008

Panagariya, Arvind. 2008. *India: The Emerging Giant*, New York. Oxford University Press.

Peet, Richard dan Elaine Hartwick. 2009. *Theories of Development : Contentions, Arguments, Alternatives Second Edition*. New York: The Guilford Press.

Sandep Ahuja, et al., *Indian Economic Reform: Task Force Report*, International Policy Practicum 2005, University of Chicago.

Srija, A. dan Shrinivas V. Shirke. 2014. *An Analysis of The Informal Labour Market in India*. Confederation of Indian Industry.

Suprayogo Imam dan Drs. Tobroni, M.Si. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

United Nations. 2012. *Report : World Economic Situation and Prospects*.

United Nations Conference of Trade and Development. 2012. *Twenty Years of India's Liberalization : Experiences and Lessons*.

Artikel

Sakina Rakhman (Kompas.com/Bisniskeuangan). 2015. Sentuh 7.4 persen, Pertumbuhan Ekonomi India lampau China

Jurnal

_____. *The Role Of Reserve Bank of India in Controlling Inflation : Traditional or Beyond Monetary Measures?*

_____. *Five Year Plans India. Chapter 7* diakses melalui http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical_year_book_india_chapters/Five%20Year%20Plan%20writeup_0.pdf

Ahuja, Sandep. et al., *Indian Economic Reform: Task Force Report*, International Policy Practicum 2005, University of Chicago. Diakses melalui <http://harris.uchicago.edu/sites/default/files/IPP%20Economic%20Reform%20in%20India.pdf>

Anup,Roy ,dkk. 2013. *RBI Ushers in Capital Controls to protect rupee*. Live Mint diakses melalui <http://www.livemint.com/Money/vs1bcMIMi8A1hqiniASC50/RBI-announces-measures-to-limit-forex-outflows.html>

Atri, Mukherjee. 2013. *Cyclicity of Fiscal Policy in India*. Reserve Bank of India. Diakses melalui <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegna/2013-fiscal-policy/Mukherjee.pdf>

Ban, Cornel. 2012. *Brazil's Liberal Neo-Developmentalism: New Paradigm or Edited Orthodoxy?. Review of International Political Economy*. Routledge.

Banga R dan Kumar D. 2011. *India's exports of software services : Role of External Demand and Productivity*. Science Technology and Society.

Basu, Kaushik. 2011. *Understanding Inflation and Controlling It*. Ministry of Finance, Government of India. <http://personal.lse.ac.uk/ghatak/landref.pdf>

Boediono. 2001. *Ekonomi Moneter edisi ke-3*. Yogyakarta: BPFE , Hal. 76. Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/1756/5/Bab%202.pdf>

Bresser-Pereira L. C. 2006. *The New Developmentalism and Conventional Orthodoxy. Article for SEADE's Sao Paulo em Perspectiva review*.

Chakrabarty, Dr K C. 2011. *Speech - Banking and Beyond : New Challenges Before Indian Financial System.* Diakses melalui

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=553

Dua, Pami dan Rajiv Ranjan. 201. *Exchange Rate Policy and Modelling in India.* Mumbai : Departemen of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India. Diakses melalui <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/DRS33250210.pdf>

Ghosh, Ramya. 2011. *Capital Control and Exchange Rate Regime in India.* United State : UMI- Dissertation Publishing. Diakses melalui <https://research.cgu.edu/economic-policy-studies/wpcontent/uploads/sites/25/2016/11/Ghosh-2011.pdf>

Hammond, Gill. 2012. *State of Art of Inflation Targeting.* Centre for Central Banking Studies; Bank of England, London. Diakses melalui http://www.bankofengland.co.uk/education/Documents/ccbs/handbooks/pdf/ccbs_hb29.pdf

Hertati, S. 2014. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/4985/3/BAB%20II.pdf>

Government of India. 2011. Report and Committee on Comprehensive Review of National Small Savings Fund (Chairperson : Gopinath S.) New Delhi. Government of India.

Iskandar Simorangkir dan Suseno. *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar.* Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan- Bank Indonesia No.12. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/12.%20Sistem%20dan%20Nilai%20kebijakan%20Nilai%20Tukar.pdf>

Jain, Girish dan Meenu Baliyan. 2014. *Determinants of Saving and Investment in India.* SSARSC International Journal of Geo Science and Geo Informatics ISSN 2349-6975 Volume 1 Issue 1, July 2014. Diakses melalui http://www.ssarsc.org/documents/meenu_balun_6.pdf

Kanagasabapathy, K. 2011. *What determines interest rate.* Diakses melalui <http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/k-kanagasabapathy/what-determines-interest-rates/article1588336.ece>

Lenna, M. Eapen dan Sthanu R. Nair. 2012. *Food Price Inflation in India (2008-2010) : A Commodity-wise Analysis of The Causal Factor.* Economic & Political Weekly : Vol. XLVII No.20.

Locke, Anna. 2013. Property Rights and Development Briefing : Property Rights and

Economic Growth. Overseas Development Institute. Diakses melalui

<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8513.pdf>

LSE IDEAS. 2012. *India : The Next Super Power ?*. LSE Publication Report

Mishara, Ram Kumar. 2014. *Roles of State Owned-Enterprise in India's Economic*

Development. OECD Conference Center, Room 4. Diakses melalui

https://www.oecd.org/daf/ca/Workshop_SOEsDevelopmentProcess_India.pdf

Mishkin, Frederic S. 2004. Inflation Targeting. Colombia University and National Bureau

of Economic Research. Diakses melalui

<https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2013/01ENCYC.pdf>

Novansyah,Ibrahim. *Kebangkitan India : Dari Model Nehru ke Model Knowledge Based*

Society. Universitas Gajah Mada. Diakses melalui

https://www.academia.edu/9497019/Kebangkitan_India_Dari_Pembangunan_Model_Nehru_ke_Model_Knowledge_Based_Society

Oner, Ceyda. 2010. *Back to Basic : What is Inflation*. IMF. Diakses melalui

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/pdf/basics.pdf>

Prabhu, K. S., 2001, 'Socio-Economic Security in the Context of Pervasive Poverty: A Case

Study of India', SES Discussion Paper, International Labour Organization, Geneva.

Diakses melalui http://www.undp.org/content/dam/India/docs/cct_dp.pdf

Rajeev,M dan Dr. S. M Abdul Kader. 2016. *A Study of Impact of Privatization onThe*

Performance of India General Insurance Sector. International Journal Of Engineering

Research and Modern Education, Vol I Issue II. Diakses melalui

<http://ijerme.rmodernresearch.com/wp-content/uploads/2016/10/126.pdf>

Singh, Charan. 2014. *Inflation Targeting in India : Select Issues*. Indian Institute of

Management Bangalore, India: *Working Paper* No.475. Diakses melalui

<iimb.ac.in/research/sites/default/files/WP%20No.%20475.pdf>

Sodhi, J.S. 2008. " *An Analysis of India's Development: Before and After Globalization*".

India Journal of Industrial Relations Vol.43 no.3.

Stiglitz, Joseph. 1998. *Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and*

Processes. Diakses melalui

https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/1998_2_Toward_s_a_New_Paradigm_for_Development.pdf

Susesno dan Siti Astiyah. 2009. *Inflasi*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/22.%20Inflasi.pdf>

Suwita, Sudi Bawa. 2010. Peranan Faktor Fundamental dalam Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Januari 2000 – Desember 2009. Magister Perencanaan Publik dan kebijakan Publik Universitas Indonesia. Diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131352-T%2027626-Peranan%20faktor-Tinjauan%20literatur.pdf>

Swaran Singh. 2005. *China-India Economy Engagement Building Mutual Confidence*

T. Appel, Katarzyna. 2016. *Keynes' Theory of The Interest Rate : A Critical Approach*. Club of Economics in Miskolc TMP Vol. 12. Diakses melalui <http://real.mtak.hu/37796/1/01.pdf>

The Boao Forum for Asia : *Annual Report* 2009. 2010. *The Development of Emerging Economies*

U. Sagena. 2005. "Developmental State, Japan Transformation". *Jurnal Sosio-Politika*, Vol.6 no.12, Desember 2005.

Williamson, John. 1990. *What Washington Means By Policy Reform*. Peterson Institute for International Economics. Diakses Melalui <https://www.wcl.american.edu/hracademy/documents/Williamson1990WhatWashingtonMeansbyPolicyReform.pdf>

World Bank. Trade Liberalization : Why So Much Controversy

Website

_____.Annual Report 2012-2013. *Commercial Relations, Trades Aggrements and International Trade Organizations*. Diakses melalui http://commerce.nic.in/publications/annualreport_chapter6-2012-13.asp#a1

_____.Association of Private Airport Operators. *Mumbai International Airport Limited*. Diakses melalui http://www.apaolIndia.com/?page_id=164

_____.Basic Concept Income Tax Law in India. Diakses melalui http://dl4a.org/uploads/pdf/19764ipcc_it_vol1_cp1.pdf

_____. *Chapter 4: Privatization in Indian Economic*. Diakses melalui

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3798/10/10_chapter%204.pdf

_____. Departement of Land Resource. 2013. *Draft National Land Reforms Policy*.

Ministry Of Rural Development: Government of India. Diakses melalui

[.http://rural.nic.in/sites/downloads/latest/Draft National Land Reforms Policy July 2](http://rural.nic.in/sites/downloads/latest/Draft_National_Land_Reforms_Policy_July_2)

[013.pdf](#)

_____. *Development*. Diakses melalui <https://ib-econ.wikispaces.com/Q78+>

[+Development.pdf](#)

_____. *Export Subsidies and Competition*. Diakses melalui

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd08_export_e.htm

_____. [.http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Chapter20](http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Chapter20).

_____. India Brand Equity Foundation. *Banking Sector in India*. Diakses melalui

<https://www.ibef.org/industry/banking-India.aspx>

_____. *India Nasionalist Congress*. Profil Dr. Manmohan Singh Diakses melalui

<http://inc.in/organization/21/profile>

_____. India Property Rights Alliance. Current Situation in Inida. Diakses melalui

<http://Indiaproperyrights.org/current-situation-in-India/>

_____. *Interest Rate on Saving Bank DepositsDeregulated*. The Hindu Business Line:

Mumbai. Diakses melalui <http://www.thehindubusinessline.com/money-and>

[banking/interest-rate-on-savings-bank-deposits-deregulated/article2571228.ece](http://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/interest-rate-on-savings-bank-deposits-deregulated/article2571228.ece)

_____. *International Financial Institutions*. Global GreenGrants Fund.Diakses melalui

<https://www.greengrants.org/about/our-community/grant-advisors/ifi-advisory-board/>

_____. Investopedia. Capital Control. Diakses melalui

http://www.investopedia.com/terms/c/capital_conrol.asp

_____. Investopedia. 2014. Disinvestment. Diakses melalui

<http://www.investopedia.com/terms/d/disinvestment.asp>

_____. Investopedia. 2014. *Who Determines Interest Rates*. Diakses melalui

<http://www.investopedia.com/ask/answers/03/112003.asp>

_____. Public Property and Property Rights Theory. LSE. Diakses melalui

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th_%20Sy

[mposium/PAPERS_PPS/LAW_CITIZENSHIP/ALEXANDROPOULOU.pdf](http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th_%20Symposium/PAPERS_PPS/LAW_CITIZENSHIP/ALEXANDROPOULOU.pdf)

_____.Planning Centre, Institute of Economic Growth : Delhi India. Diakses melalui <http://www.iegIndia.org/upload/publication/Workpap/wp268.pdf>.

_____.*Property Rights*. India Institue. Diakses melalui [http://www.orfonline.org/research/securing-property-rights-in-India-through-distributed-ledger-technology/](http://Indiai.org/property-rights/Meghan, Bal. Securing Property Rights in India Through Distributed Ledger Technology. Diakses melalui http://www.orfonline.org/research/securing-property-rights-in-India-through-distributed-ledger-technology/)

_____.RBI. 2011. Deregulation of Interest Rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposits and Ordinary Non-Resident (NRO) Accounts. Diakses melalui <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/323CD281211F.pdf>

_____.Reserve Bank of India. Melalui Notifikasi yang dikeluarkan oleh Dr. Y Venugopal Reddy. Diakses melalui <http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/76972.pdf>

_____.Services Sectors in India. IBEF. Diakses melalui <https://www.ibef.org/industry/services.aspx>

_____.2009. Stabilitas Ekonomi Makro. Bappenas. Diakses melalui http://www.bappenas.go.id/files/7613/5022/6074/bab24__20090202204616__1756__25.pdf

_____.The Economist. 2007. *A Himalayan Challenge*. Diakses melalui <http://www.economist.com/node/9955756>

_____.*United Nations Conference of Trade and Development*. 2012. *Twenty Years of India's Liberalization : Experiences and Lessons* .Diakses melalui http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpg2420093_en.pdf

_____.United Nations Development Programme. 2009. *Conditional Cash Transfers Schemesfor Alleviating Human Poverty : Relevance fo India*. Discussion Paper UNDP India. Diakses melalui http://www.undp.org/content/dam/India/docs/cct_dp.pdf

_____.*Videsh Sanchaar Nigam Limited*. IBEF. Diakses melalui https://www.ibef.org/download/VSNL_23oct.pdf

_____.Worldbank data : *Current Account Balance* (BOP, Current US\$). Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD?locations=IN>

_____.WorldBank Data GDP Growth (annual %) – India. Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=IN&start=1961>

_____.WorldBank Data. *Export of Goods and Services (% OF GDP)* . Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2014&locations=IN&start=2000>

_____.World Bank Data. Poverty Gap at National Poverty Line in India . Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAGP?locations=IN>

_____.WorldBank Data. Poverty Gap India Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GAPS?locations=IN>

_____.Worldbank Data. Populasi di India 0-14, 15-64 dan 65- Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?locations=IN>

_____.WorldBank Data. Services, etc., Value Added (% of GDP). Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS?locations=IN>

_____.WorldBank Data: Unemployment Total – ILO. Diakses melalui <http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IN>

Aghio, Phillip. dkk. 2007. *The Unequal Effects of Liberalization : EvidenceFrom Dismantling The Lisence Raj in India*. Working Paper No. 345. Diakses melalui http://www.econ.uzh.ch/static/wp_iew/iewwp345.pdf

Khan dan James Fontanella. 2012. *Indian to Boost Exports with Subsidies*. Diakses melalui <https://www.ft.com/content/95751eee-9a92-11e1-83bf-00144feabdc0?mhq5j=e3>

Lin, J and Chang, H. J. 2011. *Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha- Joon Chang*. Development Policy Review. Diakses melalui http://blogs.bu.edu/cban/files/2012/12/brazilfinal-proofs_oct-20n-2012.pdf

Tishampati Sen. *RBI Control of Inflation : Time to Look Beyond Monetary Measures?* . Diakses melalui <http://www.legalserviceIndia.com/article/I177-RBIs-Control-of-Inflation.html>